



ISSN 2301 - 5853

VOLUME 6 TAHUN 2017

# KUNDUNGGGA

BULETIN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

**CAGAR BUDAYA DAN MASYARAKAT**



**Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur  
Wilayah Kerja Kalimantan**

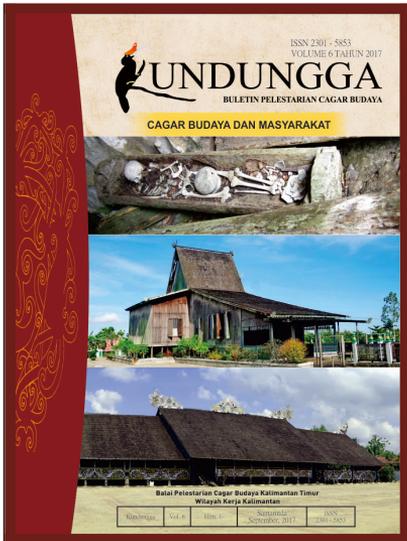
Kundungga

Vol. 6

Hlm. 1- 122

Samarinda  
September, 2017

ISSN  
2301 - 5853



# Buletin Kundungga

Buletin Pelestarian Cagar Budaya

Volume 6 Tahun 2017

ISSN 2301-5853

Buletin Kundungga merupakan salah satu media publikasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur tentang berbagai aspek mengenai pelestarian Cagar Budaya di Kalimantan yang dihimpun dari para peneliti, pemerhati dan pecinta kebudayaan untuk dapat dimanfaatkan oleh semua pihak. Sehingga memacu kesadaran semua pihak untuk saling menjaga dan melestarikan Cagar Budaya Indonesia khususnya di Kalimantan.

## Penanggung Jawab

Drs. Budhy Sancoyo, M.A

## Pemimpin Redaksi

Drs. Budi Istiawan

## Editor

Vinsensius Ngesti Wahyuono

## Sekretaris

Dian Purnamasari, S.S

## Tata Letak

Andika Arief Drajat Priyatno, S.S

Ahmad Rizki Zulfikar, S.Kom

## Alamat Redaksi

Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur

Wilayah Kerja Kalimantan

Jl. H.A.M. Rifaddin No. 69 Samarinda

Kalimantan Timur

Telp. (0541) 4104522

Fax. (0541) 4104523

E-mail: [bpcb\\_samarinda@yahoo.com](mailto:bpcb_samarinda@yahoo.com)

## Dicetak Oleh:

CV. Wiratama

## KATA PENGANTAR

Keanekaragaman Cagar Budaya yang ada di Indonesia harus dipandang sebagai sebuah kekayaan yang perlu dijaga dan dilestarikan. Keanekaragaman Cagar Budaya yang ada membuktikan bahwa masyarakat kita memiliki inovasi dalam mengolah dan menghasilkan budaya dari zaman prasejarah hingga masa kini. Upaya pelestarian Cagar Budaya yang berkesinambungan dalam prakteknya sejalan dengan kepentingan ilmu pengetahuan yang direpresentasikan melalui kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian menunjang kegiatan pelestarian dengan menyediakan data objek Cagar Budaya tinggalan kehidupan masa lalu yang diperlukan dalam kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Sejalan dengan kepentingan tersebut, maka buletin Kundungga Volume 6 Tahun 2017 mengangkat tema tentang “Cagar Budaya dan Masyarakat”. Sebagai artikel pembuka, Yosua Adrian Pasaribu mengangkat judul “Sistem Percepatan Regnas”. Saat ini pemerintah pusat telah membuat sistem jejaring [www.cagarbudaya.kemdikbud.go.id](http://www.cagarbudaya.kemdikbud.go.id) yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah maupun provinsi untuk mendaftarkan Cagar Budaya yang ada di daerahnya. Namun dalam implementasinya di masyarakat masih terdapat beberapa kendala yang coba diuraikan dalam tulisan ini. Selanjutnya Ahmad Rizki Zulfikar membahas tentang salah satu teknologi masa kini yang dapat diterapkan terhadap Cagar Budaya untuk kemudahan dalam pengumpulan data teknis di lapangan yang tertuang dalam artikel berjudul “Pemodelan 3D Bangunan Cagar Budaya Menggunakan Fotogrametri (Studi Kasus Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau, Kalimantan Selatan)”. Kemudian penulis Kadek Dedy Prawirajaya R. Mengemukakan pendapatnya mengenai strategi pelestarian yang dapat diterapkan pada sebuah situs dengan tujuan untuk melestarikan nilai-nilai penting yang terkandung di dalamnya pada artikel berjudul “Strategi Pelestarian Warisan Budaya Pura Goa Gajah”.

Pada artikel keempat, Bambang Sugiyanto mencoba mengangkat potensi situs hunian masa prasejarah di Kalimantan Selatan dengan artikel yang berjudul “Gua Debu Situs Hunian Prasejarah di Balangan”. Selanjutnya nilai kesejarahan yang terdapat di Situs Candi Nagari Baru Ketapang mendapat perhatian serius oleh Imam Hindarto. Dalam artikel “Kesejarahan Candi Nagari Baru” dapat kita lihat bagaimana kedudukan temuan candi bata yang ada di Kalimantan bagian Barat Daya dalam kesejarahan lokal maupun nasional. Kemudian Andika Arief Drajat Priyatno juga memaparkan tentang temuan beberapa makam kuno Dayak yang mulai dijarah oleh orang yang tidak



bertanggung jawab sehingga perlu dilakukan tindakan pelestarian, yang termuat dalam artikel berjudul “Temuan Situs-Situs Penguburan di Desa Merasa, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau”. Model pengelolaan Cagar Budaya untuk kepentingan pelestarian dan pariwisata juga dikemukakan oleh Andi Sultra Handayani. Dalam artikel berjudul “Potensi Tanah Laut sebagai Daerah Pariwisata”, penulis coba menjelaskan beberapa hal yang dapat dilakukan terkait potensi pariwisata yang ada di daerah tersebut. Selain itu, kegiatan pelestarian Candi Muara Jambi dalam penanganan mitigasi bencana banjir musiman dengan menilik kedudukan kanal kuno yang ada di sekitar situs diungkapkan oleh penulis Asyahadi Mufsi Sadzali dengan artikel yang berjudul “Kanal Kuno Candi Muara Jambi: Mitigasi Banjir Musiman di Situs Candi Muara Jambi”.

Dalam konteks Cagar budaya dan Masyarakat, Syamsul Rijal mencoba mengungkapkan tentang pesan moral kaum pendatang yang ada di Samarinda berdasarkan tinggalan Makam La Mohang Daeng Mangkona, salah satu pendiri kota Samarinda. Dengan artikel yang berjudul “Senjata, Kemaluan dan Nisan Semiotika Budaya Pesan Penjaga Makam Daeng Mangkona Untuk Perantau” dijabarkan beberapa pesan yang dapat diambil dari tinggalan material makam tersebut. Dan artikel terakhir oleh Nasrullah, membahas tentang perubahan fungsi mendasar yang terdapat dalam artikel “Lamin Pemung Tawai sebagai Wadah Pertunjukan Seni di Desa Budaya Pampang” sebagai bagian dari perkembangan budaya Dayak dan pengelolaan pariwisata pada masa kini. Segala sesuatu tidak terlepas dari kekurangan, demikian pula dengan Buletin Kundungga Volume 6 Tahun 2017 ini. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun. Kritik dan saran dapat dikirimkan lewat email kami: [bpcb\\_samarinda@yahoo.com](mailto:bpcb_samarinda@yahoo.com) atau ke alamat BPCB Kalimantan Timur Jl. H.A.M. Rifaddin No 69, Samarinda, Kalimantan Timur.

Akhir kata, Redaksi Buletin Kundungga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan terbitnya Buletin Kundungga Volume 6 Tahun 2017 ini. Selamat membaca dan Salam Budaya!

**Redaksi Buletin Kundungga**



## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pada tahun 2017 ini Buletin Kundungga Volume 6 Tahun 2017 dapat diterbitkan, walaupun ada beberapa hambatan yang tidak dapat dihindari. Pada terbitan kali ini kami mengangkat tema “CAGAR BUDAYA DAN MASYARAKAT”. Pada kesempatan ini kami sampaikan terimakasih kepada para penulis yang telah memberikan waktu, tenaga dan ide-idenya dalam bentuk artikel sehingga buletin ini dapat diterbitkan. Sepuluh buah artikel yang disajikan dalam buletin ini merupakan karya dari penulis-penulis yang mempunyai kompetensi sesuai dengan tema artikel dengan latar belakang yang berbeda, yaitu dari instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah dan pengajar dari berbagai universitas negeri di Indonesia. Berikut ini adalah artikel-artikel yang dimuat pada edisi kali ini:

1. Yosua Adrian Pasaribu: Sistem Percepatan Regnas;
2. Ahmad Riski Zulfikar: Pemodelan 3D Bangunan Cagar Budaya Menggunakan Fotogrametri (Studi Kasus Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau, Kalimantan Selatan);
3. Kadek Dedy Prawirajaya R.: Strategi Pelestarian Warisan Budaya Pura Goa Gajah;
4. Bambang Sugiyanto: Gua Debu Situs Hunian Prasejarah di Balangan;
5. Imam Hindarto: Kesejarahan Candi Nagari Baru;
6. Andika Arief Drajat Priyatno: Temuan Situs-Situs Penguburan di Desa Merasa, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau;
7. Andi Sultra Handayani: Potensi Tanah Laut sebagai Daerah Pariwisata;
8. Asyhadi Mufsi Sadzali: Kanal Kuno Candi Muara Jambi: Mitigasi Banjir Musiman di Situs Candi Muara Jambi;
9. Syamsul Rijal: Senjata, Kemaluan dan Nisan Semiotika Budaya Pesan Penjaga Makam Daeng Mangkona Untuk Perantau; dan
10. Nasrullah: Lamin Pemung Tawai sebagai Wadah Pertunjukan Seni di Desa Budaya Pampang.

**REDAKSI**



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ucapan Terima Kasih .....	iii
Daftar Isi .....	iv
<b>Yosua Adrian Pasaribu</b>	
Sistem Percepatan Regnas.....	1
<b>Ahmad Rizki Zulfikar</b>	
Pemodelan 3D Bangunan Cagar Budaya Menggunakan Foto Grametri (Studi Kasus Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau Kalimantan Selatan) .....	12
<b>Kadek Dedy Prawirajaya R.</b>	
Strategi Pelestarian Warisan Budaya Pura Goa Gajah.....	29
<b>Bambang Sugiyanto</b>	
Gua Debu Situs Hunian Prasejarah di Balangan .....	39
<b>Imam Indarto</b>	
Kesejarahan Candi Nagari Baru.....	50
<b>Andika Arief Drajat Priyatno</b>	
Temuan Situs-Situs Penguburan di Desa Merasa, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau.....	61
<b>Andi Sultra Handayani</b>	
Potensi Tanah Laut sebagai Daerah Pariwisata.....	78
<b>Asyhadi Mufsi Sadzali</b>	
Kanal Kuno Candi Muara Jambi: Mitigasi Banjir Musiman di Situs Candi Muara Jambi.....	92
<b>Syamsul Rijal</b>	
Senjata, Kemaluan dan Nisan Semiotika Budaya Pesan Penjaga Makam Daeng Mangkona Untuk Perantau .....	103



**Nasrullah**

Lamin Pemung Tawai sebagai Wadah Pertunjukan Seni di Desa Budaya

Pampang .....111



## Strategi Percepatan Penyusunan Register Nasional Cagar Budaya

Oleh: Yosua Adrian Pasaribu

### **Pelestarian Cagar Budaya Secara Otonomi Daerah**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pelestarian Cagar Budaya dengan melakukan pencatatan, penetapan, pengelolaan, dan penerbitan izin membawa Benda Cagar Budaya keluar wilayahnya. Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pendaftaran benda-benda, bangunan-bangunan, lokasi-lokasi, dan satuan ruang geografis milik negara dan masyarakat untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya oleh Bupati/Walikota.

Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya mengamanatkan pengelolaan Cagar Budaya yang dilakukan secara sentralistik oleh pemerintah. Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara otonomi oleh pemerintah daerah merupakan amanat baru Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang berlandaskan dengan semangat reformasi. Perubahan tersebut tentunya harus diikuti dengan program peralihan manajemen Cagar Budaya, mulai dari sum-

ber daya manusia (SDM), sarana-prasarana, dan program-program pelestariannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya sebenarnya telah melakukan pelestarian Cagar Budaya. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota umumnya menetapkan, menempatkan tenaga juru pelihara, membangun sarana-prasarana, dan melakukan pelestarian situs-situs arkeologi dan bangunan-bangunan bersejarah di wilayahnya. Oleh karena itu, umumnya pelestarian bangunan dan situs di lapangan dilakukan bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kondisi tersebut menimbulkan kesemrawutan di lapangan, misalnya terdapat dua petugas juru pelihara dari pemerintah pusat dan dari pemerintah daerah. Permasalahan pembangunan sarana dan prasarana seperti fasilitas bangunan dan jalan, umumnya juga menimbulkan masalah penataan ruang akibat tidak baiknya koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Per-



masalah perizinan penelitian maupun kegiatan lain di bangunan atau situs Cagar Budaya pun menjadi rumit jika tidak diatur dalam kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

### **Penyusunan Register Nasional Cagar Budaya**

Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri. Register Nasional Cagar Budaya disusun melalui tahap pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Register Nasional Cagar Budaya. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pendaftaran Cagar Budaya yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya membuka jalan bagi pelestarian objek berupa benda (benda ber-

gerak seperti perabotan antik, guci kuno, benda seni, dan lain-lain) milik masyarakat. Pendaftaran dan penetapan objek sebagai Cagar Budaya oleh Bupati/Walikota merupakan langkah awal pelestarian Cagar Budaya di tingkat pemerintah daerah. Pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya di tingkat kabupaten/kota merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan karena dengan adanya register Cagar Budaya di Pemerintah Kabupaten/Kota, kasus-kasus kehilangan Cagar Budaya, pencurian Cagar Budaya, pasar gelap Cagar Budaya, dan sebagainya dapat diminimalisir. Adanya Register Nasional Cagar Budaya di pemerintah kabupaten/kota juga dapat dijadikan sebagai dasar pengelolaan Cagar Budaya di tingkat kabupaten/kota, baik berupa pariwisata, lelang ekonomis, dan lain-lain yang sifatnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah pelaksana utama kebijakan pelestarian Cagar Budaya secara umum dan pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya secara khusus. Penerapan kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya pendaftaran dan peneta-



pan Cagar Budaya telah dimulai sejak tahun 2013. Penerapan kebijakan nasional ini merupakan pekerjaan besar karena membutuhkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan bersentuhan langsung dengan properti milik masyarakat yang wajib didaftarkan jika memenuhi kriteria Cagar Budaya. Penyusunan sistem Register Nasional Cagar Budaya telah difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui pembentukan jejaring [cagarbudaya.kemdikbud.go.id](http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id). Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Kebudayaan belum memiliki rencana strategi jangka panjang (*masterplan*) untuk melaksanakan program penyusunan Register Nasional Cagar Budaya.

Tulisan ini membahas mengenai hasil implementasi penyusunan Register Nasional Cagar Budaya berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pada tulisan ini dipaparkan mengenai hasil penerapan kebijakan pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya berdasarkan peraturan perundang-undangan selama tahun 2013-2016. Tulisan ini mengevaluasi strategi implementasi kebijakan nasional mengenai pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya pada tahun 2013-2016. Dari hasil evaluasi, disusulah usulan strategi percepatan

pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya.

Program penyusunan Register Nasional Cagar Budaya sebagai penerapan kebijakan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya selama ini dilakukan melalui pendudukan Direktorat Jenderal Kebudayaan terhadap pemerintah kabupaten/kota. Pendudukan tersebut dilakukan dengan fasilitasi peralatan pendaftaran Cagar Budaya, *workshop* pendaftaran Cagar Budaya, dan fasilitasi sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya. Sementara itu, hingga saat ini belum ada kabupaten/kota yang membuka pendaftaran Cagar Budaya bagi masyarakat. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah strategi apakah yang dapat diterapkan untuk keberhasilan program penyusunan Register Nasional Cagar Budaya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

### Metode Kajian

Metode kajian evaluasi strategi penerapan kebijakan nasional mengenai penyusunan Register Nasional Cagar Budaya pada tulisan ini menggunakan metode kuantitatif. Strategi program penyusunan register nasional Cagar Budaya akan dijabarkan dalam angka-angka sehingga hasil



evaluasi tersebut kemudian digunakan untuk menyusun usulan strategi percepatan pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya.

Analisis strategi pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya selama tahun 2013-2016 juga dilakukan dengan metode perbandingan dengan strategi penerapan kebijakan nasional yang lain. Penerapan kebijakan nasional yang mewajibkan masyarakat mendaftarkan diri kepada pemerintah seperti pendaftaran Cagar Budaya yang dijadikan bahan perbandingan adalah:

1. Program e-KTP Kementerian Dalam Negeri.
2. Program Tax Amnesty Kementerian Keuangan.

Dua program tersebut merupakan penerapan kebijakan nasional yang memiliki kesamaan dengan program pendaftaran Cagar Budaya dalam hal kewajiban masyarakat untuk mendaftarkan diri atau propertinya kepada pemerintah. Perbandingan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan kebijakan nasional dan hasil yang diperoleh. Pada tulisan ini akan diuraikan mengenai strategi penyusunan Register Nasional Cagar Budaya oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2013-2016 serta hasil yang diperoleh, kemudian dilakukan kajian perbandingan dengan dua program lain yang

serupa.

### **Strategi Program Penyusunan Register Nasional Cagar Budaya Tahun 2013-2016**

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelestarian Cagar Budaya mengamanatkan bahwa pelestarian Cagar Budaya dilakukan secara otonomi daerah (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam Registrasi Nasional Cagar Budaya, serta pelestarian Cagar Budaya peringkat nasional. Oleh karena itu, secara logika implementasi peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pemerintah sifatnya berupa sosialisasi dan pendukungan terhadap pelestarian Cagar Budaya di tingkat pemerintah daerah selain pelestarian Cagar Budaya peringkat nasional yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Strategi Direktorat Jenderal Kebudayaan pada penyusunan Register Nasional Cagar Budaya tahun 2013-2016 adalah menyerahkan pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya ke pihak kabupaten/kota. Direktorat Jenderal Kebudayaan memberikan fasilitas peralatan pendaftaran dan



melakukan pelatihan pendaftaran Cagar Budaya terhadap dua orang dari masing-masing kabupaten/kota. Berikut adalah pembagian kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya pada strategi tersebut.



Gambar 1. Pembagian Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya

Pemerintah telah membentuk sistem jejaring ([cagarbudaya.kemdikbud.go.id](http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id)) yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mendaftarkan objek miliknya sebagai Cagar Budaya. Akan tetapi untuk dapat menetapkan suatu objek sebagai Cagar Budaya, dibutuhkan adanya Tim Ahli Cagar Budaya yang bekerja di pemerintah daerah. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Ahli Cagar Budaya dibantu oleh Tim Pendaftaran Cagar Budaya yang bekerja bagi pemerintah daerah untuk menyusun berkas pendaftaran objek sebagai dasar kajian Tim Ahli Cagar Budaya.

Direktorat Jenderal Kebudayaan telah mengadakan kegiatan-kegiatan pendukung pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya di daerah, antara lain workshop pendaftaran Cagar Budaya, fasilitasi pendaftaran Cagar Budaya, dan sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya. Pada dasarnya, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan bersifat sosialisasi dan pelatihan terhadap dinas-dinas yang membidangi pelestarian Cagar Budaya di pemerintah daerah. Hingga tahun 2016, dari 548 pemerintah daerah di Indonesia, 380 pemerintah daerah sudah mengikuti *workshop* pendaftaran Cagar Bu-

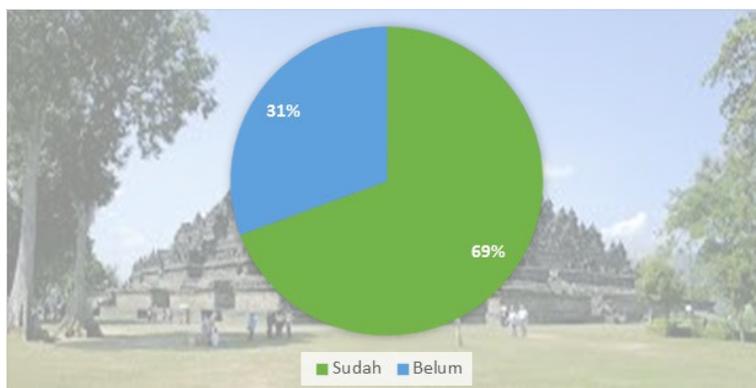


pencapaian strategi dapat terlihat.

Direktorat Jenderal Kebudayaan telah mengadakan kegiatan-kegiatan pendukung pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya di daerah, antara lain workshop pendaftaran Cagar Budaya, fasilitasi pendaftaran Cagar Budaya, dan sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya. Pada dasarnya, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan bersifat sosialisasi dan pelatihan terhadap dinas-dinas yang membidangi pelestarian Cagar Budaya di pemerintah daerah. Hingga tahun 2016, dari 548 pemerintah daerah di Indonesia, 380 pemerintah daerah sudah mengikuti *workshop* pendaftaran Cagar Budaya. Oleh karena itu, dapat dikatakan lebih dari setengah (69%) pemerintah daerah di Indonesia telah mengetahui peraturan perundang-undangan terbaru mengenai pelestarian Cagar Budaya.

Kegiatan Direktorat Jenderal Kebudayaan berupa pendukung

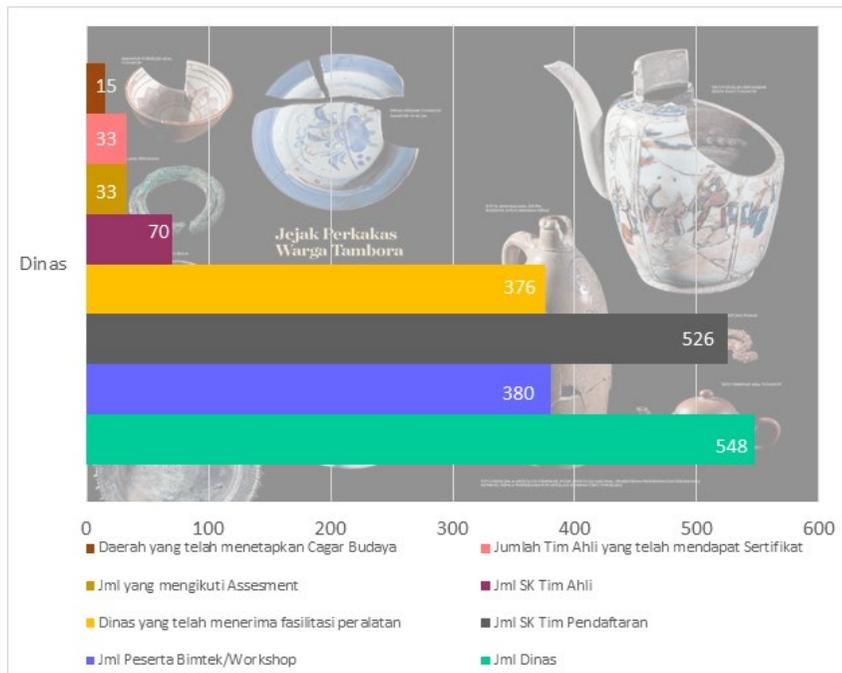
pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya (terutama *workshop* pendaftaran Cagar Budaya) kepada pemerintah daerah telah merangkul 69% pemerintah daerah di Indonesia. Pemerintah daerah yang telah membentuk Tim Pendaftaran Cagar Budaya sebanyak 516 pemerintah daerah (96%). Fasilitasi peralatan pendaftaran Cagar Budaya telah diberikan kepada 376 pemerintah daerah (68%). Tim Ahli Cagar Budaya telah dibentuk oleh 70 pemerintah daerah (57 kabupaten/kota dan 13 provinsi) atau 12% namun hanya 33 pemerintah daerah atau 6% yang telah memiliki tim ahli yang bersertifikat dan dapat merekomendasikan penetapan Cagar Budaya kepada kepala daerah. Pada akhir tahun 2016, hanya 15 pemerintah daerah (13 pemerintah kabupaten/kota dan 2 pemerintah provinsi) atau 2% yang melakukan penetapan Cagar Budaya.



Gambar 2. Pencapaian Sosialisasi Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya. (ilustrasi Kepala Daerah diambil dari website kemendagri.go.id)



Berikut adalah grafik persentase pencapaian strategi pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 2013-2016.



Gambar 3. Pencapaian Program Pendukung Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya  
(Foto latar belakang karya Dwi Oblo dalam artikel Tambora, National Geographic Indonesia edisi April 2015)

Berdasarkan statistik yang ditampilkan melalui grafik tersebut, diketahui bahwa strategi penyusunan Register Nasional Cagar Budaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan belum menyentuh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Prestasi terbaik dari strategi ini adalah bahwa 96% pemerintah daerah di Indonesia telah membentuk Tim Pendaftaran Cagar Budaya. Meseki demikian, baru 15 pemerintah daerah (13 pemerintah kabupaten/kota dan 2 pemerintah provinsi) atau 2% yang melakukan penetapan

Cagar Budaya. Penetapan tersebut juga dilakukan sepihak oleh kantor dinas yang menangani pelestarian Cagar Budaya dan belum menyentuh properti masyarakat yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Hingga saat ini belum ada pemerintah kabupaten/kota yang membuka pendaftaran Cagar Budaya bagi penduduknya sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.



## **Analisis Perbandingan dengan Kebijakan Nasional yang Lain**

Analisis dilakukan dengan kebijakan nasional program e-KTP Kementerian Dalam Negeri dan program Tax Amnesty Kementerian Keuangan. Perbandingan tersebut dilakukan untuk mengkaji ulang program Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan melihat kekuatan dan kelemahannya. Berikut adalah analisis perbandingan perbandingan program pendaftaran Cagar Budaya dan dua program kebijakan nasional tersebut.

### **1) Program e-KTP**

E-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Proyek e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya.

Program e-KTP oleh Direktorat

Jenderal Sipil Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan sejak tahun 2011 merupakan proyek besar dengan tujuan merekam data penduduk Indonesia. Data tersebut kemudian digunakan untuk menerbitkan satu kartu identitas bagi setiap penduduk Indonesia (e-KTP).

Pelaksanaan perekaman data e-KTP terhadap penduduk dilakukan dengan fasilitasi peralatan dari Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri). Pemerintah kabupaten/kota mendukung dengan anggaran, sosialisasi, sarana teknik informasi, personil pelayanan, dan penambahan daya listrik. Pemerintah kecamatan mendukung fasilitasi tempat pelayanan, listrik, personil keamanan, dan pengaturan jadwal perekaman data. Pemerintah desa/kelurahan mendukung dengan mobilisasi wajib KTP (mendistribusikan undangan dan melakukan koreksi data wajib KTP).

Berdasarkan berita di jejaring [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menargetkan proses perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) akan selesai akhir tahun 2017. Masih menurut sumber yang sama, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif memaparkan proses perekaman data e-KTP telah mencapai 97 persen. Saat ini masih terdapat sekitar enam



juta warga yang belum melakukan perekaman data.

## 2) Program *Tax Amnesty*

Berdasarkan jejaring [pajak.go.id](http://pajak.go.id), amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Program ini disusun untuk membantu pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Hal ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Setiap wajib pajak mendaftarkan diri untuk berpartisipasi dalam program ini ke Kantor Pelayanan Pajak

tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Program pengampunan pajak atau *tax amnesty* yang berjalan sembilan bulan sejak 1 Juli 2016 sudah berakhir, tepat pada tanggal 31 Maret 2017. Jumlah deklarasi harta dalam negeri tercatat sebesar Rp 3.676 triliun dan deklarasi harta luar negeri sebesar Rp 1.031 triliun. Repatriasi atau pengalihan harta tercatat mencapai Rp 147 triliun, sedangkan total uang tebusan yang masuk kas negara mencapai Rp 114 triliun, pembayaran tunggakan Rp 18,6 triliun, dan pembayaran bukti permulaan Rp 1,75 triliun (Estu Suryowati, Kompas.com - 04/04/2017, 21:38 WIB).

## Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan terhadap strategi penyusunan Register Nasional Cagar Budaya tahun 2013-2016 dan perbandingan dengan dua program nasional pada sektor lain, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyusunan Register Nasional Cagar Budaya belum memiliki masterplan. Program pemerintah untuk mencatat seluruh Cagar Budaya di dalam dan di luar negeri tentunya harus disusun berdasarkan suatu *masterplan* yang terinci mengenai pelaksanaan dan jangka waktunya. Penyusunan *masterplan* dirasakan merupakan hal



yang mendesak untuk segera dilaksanakan.

## 2. Otonomi Daerah

Berbeda dengan program e-KTP dan program Tax Amnesty yang dilaksanakan secara terpusat oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, program penyusunan Register Nasional Cagar Budaya sangat bergantung kepada pemerintah kabupaten/kota. Pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya sebagai rangkaian penyusunan Register Nasional Cagar Budaya wajib dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, oleh karena itu diperlukan sistem untuk memacu pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan program tersebut. Berikut merupakan alternatif pekerjaan yang dapat dilakukan:

- Program penyusunan Register Nasional Cagar Budaya dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu, misal tahun 2018 untuk Pulau Sumatera, maka Direktorat Jenderal Kebudayaan memusatkan perhatian untuk mendukung pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumatera untuk melakukan pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya, tahun 2019 untuk Pulau Jawa, dan demikian seterusnya. Pendukung Direktorat Jenderal Kebudayaan dapat berupa:
  - a. Penempatan sumber daya manusia dan fasilitas oleh Direktorat Jenderal

untuk melakukan pendaftaran Cagar Budaya (Tim Pendaftaran Cagar Budaya).

- b. Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya dan pendanaannya di Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan.

- Program penyusunan Register Nasional Cagar Budaya secara serentak yang melibatkan Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia dalam penyusunan Register Nasional Cagar Budaya. Pembagian kewajiban dapat meniru strategi pengumpulan data pada program e-KTP, yaitu dengan fasilitasi peralatan dari pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Pemerintah kabupaten/kota mendukung dengan anggaran, sosialisasi, sarana teknik informasi, dan personil pelayanan. Pemerintah kecamatan mendukung fasilitasi tempat pelayanan, listrik, personil keamanan, dan pengaturan jadwal perekaman data. Hal ini pun hanya dapat dilakukan jika seluruh kabupaten/kota sudah memiliki Tim Ahli Cagar Budaya untuk melakukan kajian penetapan Cagar Budaya.

Kedua alternatif tersebut memiliki kunci yaitu koordinasi dengan Pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, diperlukan sistem koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penyusunan



sunan Register Nasional Cagar Budaya.

### Penutup

Penyusunan Register Nasional Cagar Budaya diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai suatu program yang mengedepankan otonomi daerah, berbeda dengan program e-KTP dan program *tax amnesty* yang dilakukan secara terpusat. Oleh karena itu, terdapat kesulitan terutama mengenai koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar melakukan pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya. Terdapat juga kebutuhan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk melakukan register Cagar Budaya tingkat provinsi, yakni daftar resmi Cagar Budaya di kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut.

Berdasarkan permasalahan dan kajian perbandingan, maka dapat diperoleh usulan langkah-langkah yang dapat segera diambil, yaitu:

1. Penyusunan masterplan program Penyusunan Register Nasional Cagar Budaya;
2. Koordinasi dengan pemerintah daerah terutama kabupaten/kota untuk melaksanakan penetapan Cagar Budaya;
3. Fasilitasi dari pemerintah terutama dalam hal SDM untuk melaksanakan

3. Fasilitasi dari pemerintah terutama dalam hal SDM untuk melaksanakan pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya di kabupaten/kota.



# PEMODELAN 3D BANGUNAN CAGAR BUDAYA MENGGUNAKAN TEKNOLOGI FOTOGRAMETRI KOMBINASI DATA FOTO TERESTRIS DAN FOTO UDARA (Studi Kasus Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau, Kalimantan Selatan)

Oleh: Ahmad Rizki Zulfikar

## ABSTRAK

Teknologi adalah manifestasi dari imajinasi manusia tentang sebuah dunia yang lebih baik. Melalui teknologi manusia membangun masa depan kebudayaan dan kehidupan mereka. Perkembangan teknologi tidak saja ditentukan oleh nilai-nilai budaya yang ada, tetapi ia justru dapat membentuk budaya-budaya baru: budaya media, budaya informasi atau budaya virtual 3 dimensi. Dalam relasi antara teknologi dan budaya. Salah satu upaya kegiatan tersebut adalah melalui teknik pemodelan 3D Bangunan cagar budaya menggunakan metode Fotogrametri. Fotogrametri merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk merekonstruksi objek 3 dimensi dengan pengolahan dari foto - foto yang bertampalan. Selama ini pemodelan 3D untuk kepentingan dokumentasi lebih banyak terfokus pada pemodelan benda cagar budaya bukan pada Bangunan cagar budaya yang cakupannya lebih luas. Oleh sebab itu kegiatan ini dilakukan untuk pembuatan model 3D Bangunan rumah adat untuk selanjutnya diharapkan mampu memberikan gambaran utuh terkait bangunan cagar budaya. Metode yang digunakan adalah Fotogrametri jarak dekat dengan dua cara pengambilan data yaitu pengambilan foto secara *terestris* (menggunakan kamera yang dipegang langsung oleh fotografer), dan pengambilan foto secara *aerial* (meletakkan kamera pada wahana terbang UAV). Perangkat lunak yang digunakan untuk membentuk model 3 dimensi dalam pelaksanaan tugas akhir ini adalah Agisoft PhotoScan Professional dengan Objek yang dimodelkan adalah Bangunan Cagar Budaya Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau. Cara kombinasi ini membantu mendapatkan data yang tidak terlihat jika hanya menggunakan cara *terestris* atau cara *aerial* saja. Proyek ini menghasilkan model 3D Bangunan Cagar Budaya Rumah Adat Bubungan Tinggi hasil penggabungan dari dua model 3D yaitu model 3D Bangunan dan model 3D objek.

Kata kunci: *teknologi, cagar budaya, kebudayaan, 3 dimensi, fotogrametri.*



## 1. Pendahuluan

Pencapaian *sains* dan teknologi mutakhir memperlihatkan pengaruh yang semakin besar terhadap perkembangan kebudayaan, yang kini berkembang ke arah bentuk yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi dan efeknya yang luar biasa baik negatif maupun positif tidak saja dapat mengubah sebuah bangsa, tetapi seluruh umat manusia dan lingkungan hidupnya. Terlepas dari gambaran suram itu, yang jelas berdasarkan sejarah peradaban, sains dan teknologi digunakan sebagai wahana untuk menggapai sebuah masa depan imajiner (*imaginary future*), yaitu imajinasi tentang sebuah masyarakat masa depan, yang kemudian direalisasikan lewat peran sains dan teknologi di dalamnya. Sains dan teknologi, dengan demikian, berperan besar dalam mewujudkan sebuah komunitas yang diimajinasikan (*imagining community*) melalui produk teknologi. Meskipun demikian, sering imajinasi itu adalah sesuatu yang sesungguhnya tidak pernah ada atau tidak mungkin dicapai dalam konteks masa kini. Oleh karena itu dewasa ini pembuatan model tiga dimensi untuk kepentingan dokumentasi benda maupun kawasan cagar budaya sangat diperlukan dalam kegiatan pelestarian sehingga mampu mempertahankan unsur-unsur karya budaya

yang ada dalam keadaan cukup lengkap sedemikian rupa sehingga masih mampu memberikan gambaran yang utuh tentang cagar budaya yang ada dan mencerminkan nilai-nilai penting yang dikandungnya (Mulyadi, 2012). Pemanfaatan teknologi *Electronic Total Station (ETS)* dan *3D Laser Scanner* dalam pemodelan 3D untuk pendokumentasian Cagar Budaya, memberikan ketelitian yang tinggi, namun ke dua teknologi tersebut membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sehingga diperlukan suatu metode alternatif yang dapat digunakan untuk pemodelan 3D cagar budaya dengan ketelitian baik dan biaya yang relatif lebih murah: yaitu menggunakan metode fotogrametri jarak dekat. Fotogrametri Jarak Dekat merupakan suatu teknik pengukuran tiga dimensi tanpa kontak langsung dengan obyek dan menggunakan kamera untuk mendapatkan geometri obyek (Cooper & Robson, 1996). Cara pengambilan data pada fotogrametri jarak dekat dibagi menjadi tiga cara, yaitu pengambilan foto secara *terestris*, pengambilan foto secara *aerial* dan dengan metode kombinasi keduanya.

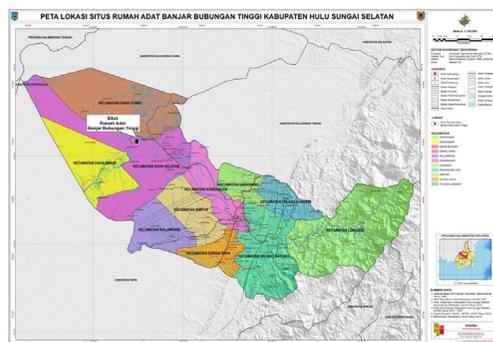
Pada pelaksanaan kegiatan ini digunakan metode fotogrametri jarak dekat kombinasi antara teknik pengambilan data *terestris* dan *aerial* untuk pemodelan 3D cagar budaya dengan pelaksanaan studi kasus di



Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau, Kalimantan Selatan. Selama ini pemodelan 3D untuk kepentingan dokumentasi lebih banyak terfokus pada pemodelan benda cagar budaya bukan pada cagar budaya yang cakupannya lebih luas. Pekerjaan pemodelan untuk suatu cagar budaya masih relatif sedikit dibandingkan pemodelan benda cagar budaya. Berdasarkan karakteristik dari Candi Sambisari, maka untuk kepentingan pendokumentasian diperlukan pemodelan 3D dengan cakupan. Apabila pemodelan hanya mencakup pada obyek Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau saja maka unsur-unsur karya budaya yang ada dalam Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau tidak bisa tersimpan dengan lengkap sehingga tidak mampu memberikan gambaran yang utuh tentang cagar budaya yang ada tersebut. Oleh sebab itu, kegiatan ini dikhususkan untuk pembuatan model 3D Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau untuk selanjutnya diharapkan mampu memberikan gambaran utuh terkait cagar budaya yang ada di area Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau.

Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau terletak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Secara astronomi terletak di antara  $02^{\circ} 29' 59'' - 02^{\circ} 56' 10''$  LS dan  $114^{\circ} 51' 19'' - 115^{\circ} 36' 19''$  BT, sedangkan ibukota Kabupaten

Hulu Sungai Selatan yakni Kandangan berada pada koordinat  $02^{\circ} 47' LS$  serta  $115^{\circ} 40' BT$ . Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah di sebelah Utara; Kabupaten Banjar dan Kabupaten Kotabaru di sebelah Timur; Kabupaten Tapin di sebelah Selatan; dan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin disebelah Barat. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki luas wilayah 1.804,92 Km<sup>2</sup> atau 2,89% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang beribu kota Kandangan ini berjarak 135 km kearah utara dari ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dan mempunyai 11 kecamatan yang terdiri atas 144 desa dan 4 kelurahan.



Peta 1.

Peta wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Lokasi wilayah Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau yang masuk dalam wilayah Kecamatan Daha Selatan (Dok.BPCB Kaltim, 2017)





Foto 1. Bangunan Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau

Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau berada di Jalan Pelayaran, Desa Habirau, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara astronomis terletak pada koordinat UTM 50 M N 2882285 dan E 9708719. Rumah adat ini merupakan salah satu tinggalan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata melalui Surat Keputusan Nomor KM7/PW007/Mkp 03 pada Tanggal 4 Maret 2003 sebagai Benda Cagar Budaya Nasional. Rumah adat ini masuk dalam kategori Cagar Budaya yang dipelihara dalam wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur. Akses menuju Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau dapat dilakukan dengan dua jalur darat dan jalur sungai. Jalur darat dapat ditempuh  $\pm$  2 jam dari Kota Banjar Baru dengan menggunakan kendaraan roda dua dan

dan roda empat, dengan melewati Kabupaten Banjar Baru, dan Kabupaten Tapin. Sedangkan jalur kedua dengan menyusuri Sungai Barito di Kabupaten Banjar Baru kemudian masuk melalui Sungai Nagara yang merupakan anak Sungai Barito dengan waktu tempuh selama  $\pm$  7 jam.

Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau memiliki tipologi yang sama dengan Rumah Adat Bubungan Tinggi di Martapura, namun berbeda dalam hal ukiran dan motif hias pada arsitekturalnya. Perbedaan juga terdapat pada pola tata ruang, dimana ada ruang yang memiliki sekat dan berfungsi sebagai ruang istirahat pada Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau. Selain itu Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau sudah ditetapkan dalam SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dengan Nomor KM7/PW007/Mkp03 Tanggal 4 Maret 2003 yang dilindungi sebagai Cagar Budaya. Seiring den-



gan berkembangnya jaman, Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau pun mengalami kerusakan baik kerusakan struktural maupun kerusakan arsitektural.

Pemodelan 3D Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau dengan cakupan area yang cukup luas  $\pm 1.000 \text{ m}^2$  memerlukan teknik fotogrametri jarak dekat metode kombinasi antara teknik pengambilan data *terestris* untuk pemodelan benda cagar budaya dan *aerial* untuk pemodelan cagar budaya. Diharapkan dengan metode kombinasi ini dapat membantu mendapatkan data yang tidak bisa terlihat apabila hanya menggunakan salah satu metode *terestris* atau *aerial* saja. Sehingga hasil dari pemodelan 3D ini bisa dimanfaatkan sebagai salah satu model yang bisa merepresentasikan bentuk dan desain dari cagar budaya untuk mendukung upaya pelestarian kawasan cagar budaya di Kalimantan Selatan.

## 2. Perekaman Data dan Pendokumentasian Cagar Budaya

Proses perekaman data, sistem pendokumentasian dan manajemen informasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Rangkaian kegiatan tersebut digunakan sebagai salah satu usaha pelestarian dan pemeliharaan obyek Cagar Budaya. Dalam sebuah manajemen

informasi dan sistem pendokumentasian obyek Cagar Budaya perlu melibatkan berbagai multi disiplin ilmu untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh dan lengkap. Sistem informasi yang menyeluruh dan lengkap dapat dimanfaatkan, antara lain:

- a) Sebagai sarana pengetahuan, pemahaman tentang suatu maksud/arti dan nilai-nilai dari keberadaan suatu benda cagar budaya;
- b) Sebagai sarana mempromosikan suatu benda cagar budaya dan pembuatan suatu manajemen informasi dan perijinan;
- c) Sebagai sumber data dalam rangka pemeliharaan;
- d) Dapat juga dipertimbangkan sebagai data untuk pembuatan polis asuransi untuk menanggulangi kerusakan dan kerugian; dan
- e) Sebagai sumber data untuk generasi masa depan.

Sistem pendokumentasian khususnya untuk Benda Cagar Budaya mengalami perkembangan yang cukup pesat untuk konservasi jangka panjang. Berapa perkembangan sistem pendokumentasian Benda Cagar Budaya antara lain :

- a) Sketsa merekam data/obyek dengan melihat langsung melalui berbagai keanekaragaman format, kemudian dituangkan dalam bentuk gambar dengan dimensi dan akurasi yang kurang teliti;



- b) *Hand Survey*, yakni Teknik Perekaman dengan mengukur obyek menggunakan tangan, berdasarkan penilaian dan peralatan sederhana;
- c) Fotografi Teknik Perekaman modern dengan menggunakan alat kamera disertai dengan metode-metode khusus untuk mendapatkan data langsung dari obyek.

### 3. Fotogrametri

Fotogrametri adalah seni, ilmu dan teknologi dalam memperoleh informasi yang terpercaya mengenai obyek-obyek dan lingkungan fisis, melalui proses perekaman, pengukuran dan penafsiran citra fotografik dan pola-pola energi elektromagnetik yang bercahaya dan gejala lainnya (Suharsana, 1997). Saat ini, pesawat tanpa awak yang digunakan untuk misi pemetaan, monitoring dan inspeksi terhadap suatu target yang ada di atas permukaan bumi adalah dengan menggunakan UAV *fully autopilot* (kontrol otomatis penuh), sehingga target objek, tinggi terbang, jalur terbangnya, serta pertampalan (*overlap* dan *sidelap*) antar foto sudah diprogram sedemikian rupa untuk akuisisi data di atas permukaan bumi, dengan parameter-parameter sesuai dengan yang diinginkan. Dalam hal ini untuk pemetaan fotogrametri yang menghasilkan *output* orthophoto juga diadopsi dari konsep fotogrametri kon-

vensional dengan ditambah dengan berbagai macam kelebihan. Kelebihan akuisisi data dengan teknologi UAV ini adalah sebagai berikut:

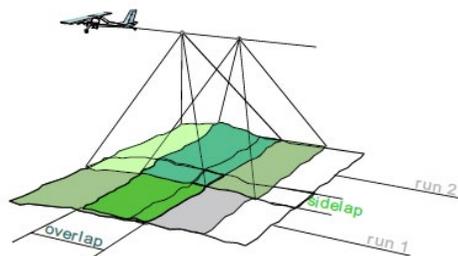
1. Efisiensi waktu pelaksanaan pekerjaan, karena dapat menjangkau wilayah yang luas dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan pemetaan *teristris*;
2. Efisiensi biaya, karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan dengan pemetaan *terestris*;
3. Efektifitas pekerjaan, karena cakupan wilayah yang dapat dijangkau per hari lebih luas dibandingkan dengan pemetaan *teristris*.

Para perencana akan dengan mudah dan leluasa melakukan perencanaan, interpretasi, dan pemahaman kondisi lapangan, bukan saja bentuk topografi tetapi juga objek-objek yang ada di atas permukaan bumi, baik objek alami (seperti tanaman, kondisi sungai) tetapi juga objek buatan manusia (seperti pemukiman dan jalan). Keberhasilan dari fotogrametri berasal dari perencanaan yang rapih dan dapat dijalankan dengan baik. Dalam melakukan perencanaan terdapat beberapa hal mendasar yang perlu diperhatikan. Pertama adalah jenis apa yang akan dihasilkan, kedua adalah tingkat akurasi dan skala yang diinginkan. Perencanaan kemudian berlanjut kepada hal-hal yang lebih teknis seperti perencanaan akuisisi



data foto udara; perencanaan pengukuran titik kontrol tanah; peralatan dan sumber daya manusia yang tepat untuk hasil yang telah direncanakan dan perkiraan dana serta jadwal pengerjaan proyek. Secara umum perencanaan terbang membutuhkan dua hal, yang pertama adalah spesifikasi terbang yang meliputi jenis kamera, panjang fokus kamera, format kamera, skala foto/resolusi tanah, tinggi terbang, *overlap*, *sidelap*, dan lain sebagainya. Kedua adalah daerah pemetaan yang dilengkapi dengan peta perencanaan daerah.

Pada bagian spesifikasi terbang yang perlu diperhatikan adalah seberapa besar resolusi di permukaan tanah (yang kemudian akan mempengaruhi ketelitian dan skala), hubungannya dengan tinggi terbang. Hal ini juga menjadi pertimbangan kamera apakah yang akan digunakan dalam pengambilan data foto udara. Selain itu perlu diperhatikan besaran daerah bertumpukan di suatu jalur (*overlap*) dan bertumpukan dengan jalur selanjutnya (*sidelap*).



Gambar 2. Contoh gambaran jarak titik kontrol tanah terhadap media yang akan dibentuk model 3D

Jarak titik kontrol tanah memberikan informasi seberapa jauh jarak antar titik kontrol tanah (spasi) yang digunakan. Satuan jarak yang digunakan adalah B yang disebut juga dengan jarak antar titik eksposur atau jarak antar pengambilan gambar pada jalur yang sama. Dari penentuan jarak titik kontrol tanah ini, maka dapat dibuat sebaran titik kontrol tanah di area pemotretan.

Secara umum, alur kerja fotogrametri digital terdiri dari: 1) mensurasi dan triangulasi; 2) fitur 3-D dan ekstraksi DTM; dan 3) pemerolehan ortofoto. Untuk dapat memperoleh keluaran yang baik dan bermakna, maka fotogrametri digital dalam kerjanya tidak dapat dipisahkan dari Sistem Informasi Geografis (SIG). Perpaduan fotogrametri digital dengan SIG memungkinkan diperolehnya peta foto yang secara visual menarik, secara metric diperoleh ukuran yang tepat, dan secara kartografis sesuai dengan proyeksi penggambaran permukaan bumi di atas bidang datar.

#### 4. Metode Pengambilan dan Pengolahan

##### a) Survey Lokasi dan Persiapan

Sebelum dilakukan *scanning* tahap awal yang dilakukan adalah persiapan dan survei lokasi. Survei lokasi bertujuan untuk mendapatkan gambaran lokasi obyek dan kondisi



lingkungan sekitar. Hal ini berkaitan dengan posisi titik berdiri *scan* dan alur yang akan dibuat.

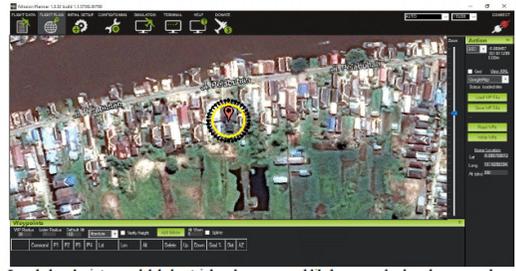
## b) Pembuatan Rencana Jalur Terbang

Rencana jalur terbang dibuat berdasarkan beberapa parameter yang sudah ditetapkan dalam KAK, seperti ketelitian yang ingin dihasilkan, peralatan yang digunakan, dan area yang dipetakan. Selain itu, distribusi titik kontrol mengikuti kaidah yang berlaku dalam fotogrametri konvensional. Tinggi terbang pesawat UAV akan dihitung dari atas permukaan tanah, untuk memperoleh GSD (*Ground Sampling Distance*) yang diinginkan. Dalam pemotretan menggunakan UAV, biasanya *endlap* antar foto dibuat minimal 80% dan *sidelap* antar foto dalam jalur penerbangan yang bersebelahan dibuat minimal 60%. Pembuatan jalur terbang dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Mission Planner. Tampilannya adalah sebagai berikut:



Gambar 3.

Pembuatan jalur terbang untuk perekaman data fotogrametri lingkungan bangunan, menggunakan jalur grid



Gambar 4.

Pembuatan jalur terbang untuk perekaman data fotogrametri fokus bangunan, menggunakan jalur circle (lingkaran)

## c) Kalibrasi

Pemotretan udara dengan teknologi UAV biasanya menggunakan kamera digital non-metrik, dengan *setting shutter speed priority*, yang didesain tidak untuk keperluan fotogrametri. Hal ini menyebabkan pengukuran melalui foto yang dihasilkan dari kamera tersebut dihindangi oleh kesalahan murni yang disebabkan oleh desain dan struktur kameranya. Untuk menyelesaikan masalah ini maka perlu dilakukan proses kalibrasi kamera. Kalibrasi Kamera merupakan proses untuk mengetahui parameter internal kamera, seperti jarak utama foto atau panjang fokus ( $f$ ), pergeseran titik utama foto ( $\Delta X$ ,  $\Delta Y$ ), distorsi radial ( $\delta r$ ) dan distorsi tangensial ( $P$ ) dari lensa. Untuk mengetahui parameter orientasi dalam dari kamera tersebut, maka dilakukan kalibrasi dengan menggunakan frame kalibrasi (laboratorium maupun lapangan) dan perangkat lunak khusus. Data hasil kalibrasi kamera (pa-



rameter orientasi dalam) ini nantinya digunakan dalam pengolahan foto udara selanjutnya.

#### d) Pengambilan Gambar

Setelah tahap persiapan survei, pembuatan jalur terbang dan kalibrasi dilakukan tahap selanjutnya adalah pengambilan gambar baik menggunakan kamera yang dipegang oleh fotografer atau kamera yang di letakkan pada wahana terbang UAV.

#### e) Pemilihan Foto

Foto yang dihasilkan dalam satu misi pemotretan biasanya berjumlah sangat banyak, oleh karena itu perlu dilakukan kompilasi foto supaya memenuhi syarat geometri *overlap* 80%. Selain itu pemilihan foto ini juga dilakukan untuk memilih foto yang tepat berada di jalur terbang saja. Pemilihan foto udara dilakukan pada sebuah perangkat lunak khusus. Secara garis besar tahap pemilihan foto ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu sinkronisasi waktu, pembuatan *footprint* foto dan pemilihan foto.

#### f) Pengolahan Foto dengan Agisoft PhotoScan

Agisoft PhotoScan Profesional adalah sebuah aplikasi perangkat lunak canggih yang tujuannya adalah untuk membantu pengguna membuat file 3D dari gambar. Agisoft PhotoScan dirancang dengan banyak parameter khusus yang memungkinkan Anda untuk mengunggah file

ke dalamnya menggunakan fungsi browse atau “*drag and drop*”. Agisoft PhotoScan bekerja dengan format file berikut: JPG, TIF, PNG, BMP, EXR, PPM, MPO, dan lain-lain. Agisoft PhotoScan profesional memberikan kemungkinan untuk *Alignment Photo*, mengatur parameter yang terkait dengan geometri dan tekstur, memperbesar atau memperkecil, memutar gambar ke setiap sudut yang berbeda, serta menghapus atau memotong area yang dipilih. Selama Proses *Alignment Photos*, *software* ini mencari *matching point* lalu menyelarasukannya, sementara dalam proses *Build Geometri*, proses dilakukan berdasarkan posisi kamera. Selain itu terdapat *Proses Build Mesh* yang menampilkan foto dengan tampilan 3D. Setelah melakukan Proses *Build Dense Cloud* dan *Build Mesh*, tahapan selanjutnya ialah menerapkan tekstur foto ke Model *Geometry* yang sebelumnya sudah diproses. Selain melakukan Proses yang sebelumnya telah dibahas, Agisoft PhotoScan juga dirancang untuk melakukan edit model geometri seperti menurunkan resolusi model geometris model, menghapus fragmen jala (*mesh*), dan menghapus bagian dari model geometri secara manual. Selain itu, Agisoft PhotoScan memungkinkan untuk menyimpan proses yang telah dilakukan, mengekspor gambar ke

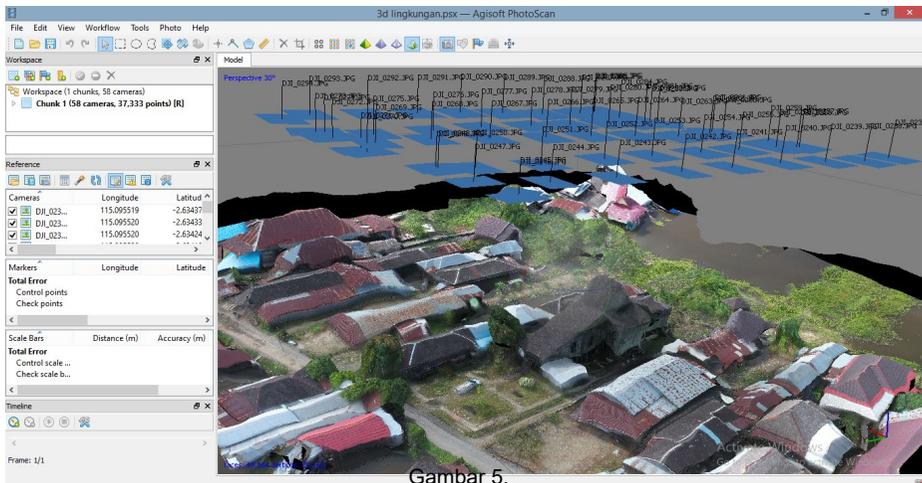


GMZ, GML, 3DS, PDF, OBJ, VRML, PLY, atau format file lainnya, melakukan operasi rekonstruksi 4D, membuat data elevasi, serta mengatur koordinat geografis. Kemampuan penting lain dari Agisoft PhotoScan ialah *input marker*, mengukur jarak antara titik kontrol, serta penggunaan perintah *Python* dan *script* melalui

“Konsol” panel.

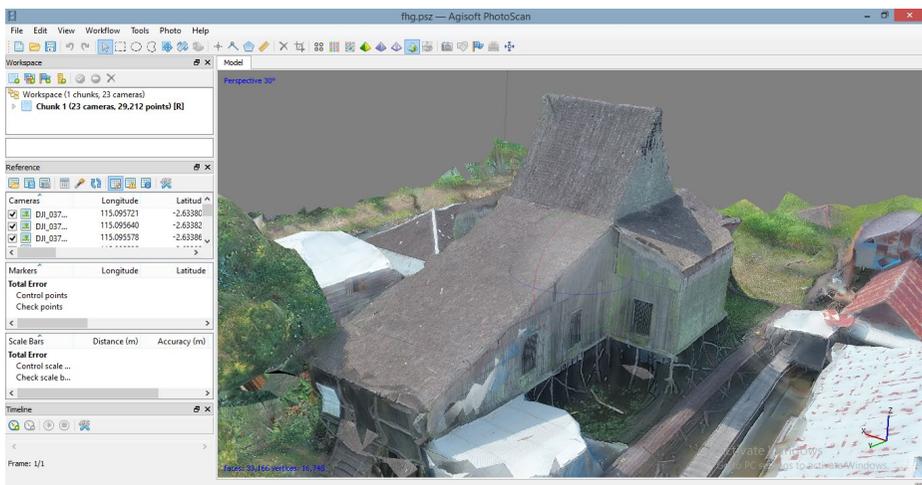
### 5. Pemanfaatan Model 3 Dimensi Dari Teknik Fotogrametri

Sebagai sebuah ilmu seni, dan teknik, hasil 3 dimensi dari fotogrametri memiliki manfaat dan peran yang sangat besar baik untuk keperluan pengembangan teori maupun untuk keperluan aplikasi. Sumbangan uta-



Gambar 5.

Tampak posisi foto (kotak warna biru) pengambilan gambar menggunakan wahana terbang UAV dalam pengolahan bentuk 3 dimensi lingkungan bangunan



Gambar 6.

Tampak bentuk 3 dimensi bangunan cagar budaya Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau



ma fotogrametri adalah untuk pembuatan peta dengan tingkat akurasi dan informasi yang relatif detail. Pengukuran beberapa objek ketinggian, seperti bukit atau gunung, gedung, pohon, dan lain-lain diperlukan untuk pemetaan potensi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Misalnya untuk keperluan pendakian suatu gunung yang belum diketahui ketinggiannya pada peta, untuk keperluan evaluasi potensi longsor lahan, maka kemiringan dan ketinggian suatu bukit atau gunung merupakan variable penting yang diperlukan untuk perhitungan. Perkembangan teknologi komputer telah membangkitkan pola baru dalam pemanfaatan fotogrametri.

Fotogrametri semula hanya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar karena peralatan mekanik dan optik untuk keperluan pengukuran harganya sangat mahal. Saat ini ketika perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang mampu membaca data fotogrametri digital berkembang pesat dengan harga terjangkau, maka penguku pengukuran dan analisis data tidak perlu lagi menggunakan peralatan yang mahal dan langka itu. Sebuah desktop PC dengan kelengkapannya mampu menggantikan peran peralatan yang mahal-mahal itu.

Untuk lebih detail bagaimana pemanfaatan fotogrametri pada Cagar

Budaya Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau sebagai berikut :

a) Mendeteksi kerusakan bangunan (Lingkungan & Material)

Kondisi bangunan Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau kurang terawat, hal ini dikarenakan kondisi bangunan yang mengalami kerusakan, seperti kerusakan arsitektural, kerusakan struktural, kerusakan material, dan kerusakan lingkungan. Dalam penjabaran kerusakan rumah ini, akan dibagi dalam tiga bagian rumah yakni bagian bawah, bagian tengah, dan bagian atap.

Kerusakan material adalah kerusakan yang menjelaskan tentang kondisi bahan bangunan yang ditinjau dari permasalahan kerusakan atau pelapukan bahan seperti bahan yang mengelupas, aus dan rapuh dengan memperhatikan faktor penyebab dan mekanisme proses pelapukan. Data tersebut diperlukan sebagai acuan untuk menetapkan langkah-langkah pembersihan dan pengawaten bahan bangunan.

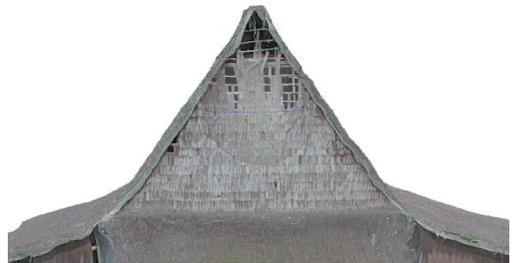
Kerusakan lingkungan adalah kerusakan yang menjelaskan tentang kondisi lahan sekitar bangunan ditinjau dari lokasi geotopografi flora, fauna, dan tata guna lahan, serta status kepemilikan dan perencanaan tata ruang daerah. Kondisi lahan atau bentang lahan disekitar Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau merupakan



daerah rawa. Kondisi yang demikian membuat rumah tersebut selalu tergenang air pada bagian bawah bangunan. Dan juga rumah tersebut dekat dengan Sungai Nagara sehingga dalam setahun terjadi pasang surut akibat tingginya curah hujan yang mengakibatkan air Sungai Nagara meluap hingga mengenai rumah tersebut.

Bagian belakang Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau merupakan daerah rawa yang selalu dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai tempat memancing, dan biasanya masyarakat melewati jalan *titin* yang berada dibagian samping kiri rumah tersebut, hal ini dikarenakan tidak adanya pagar pembatas sehingga membuat masyarakat bebas keluar masuk di sekitar atau di lingkungan rumah tersebut. Selain itu kondisi bangunan rumah yang berawa mengakibatkan banyaknya tumpukan sampah di bawah kolong rumah dan rumput yang tumbuh di bagian belakang rumah, yang membuat rumah tersebut terlihat tidak terawat. Selain itu adanya bangunan semi permanen (garasi mobil) yang tepat berada di samping kiri dan berbatasan langsung dengan rumah yang mengurangi nilai estetika bangunan, menurut informasi dari juru pelihara, bangunan tersebut milik salah satu keluarga dari ahli waris rumah.

Namun bangunan tersebut disewakan selama satu tahun. Ijin pendirian bangunan tersebut menurut ahli waris sudah disetujui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Namun ketika hal ini dikonfirmasi kepada pihak dinas tidak pernah memberi ijin dan tidak mengetahui tentang hal tersebut.



Gambar 7. Dalam permodelan 3 dimensi Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau, tampak atap yang rusak dan rapuh



Gambar 8. Dalam permodelan 3 dimensi Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau, tampak bagian papan dinding sebelah kiri pada ruang panampik kacil bagian atas hilang, yang perlu dilakukan penggantian papan.





Gambar 9. Dalam visualisasi 3 dimensi ini dapat dihasilkan kerusakan lingkungan pada bagian belakang rumah yang di tumbuh rumpuk liar dan tergenangnya bagian kolong rumah



Gambar 10. Dalam permodelan 3D Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau, pada dinding kiri bangunan juga banyak ditumbuhi lumut dan terjadi aus (bagian atas) pada bahan bangunan. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat kelembaban yang disebabkan padatnya rumah penduduk bahkan sangat dekat dengan bangunan tersebut.

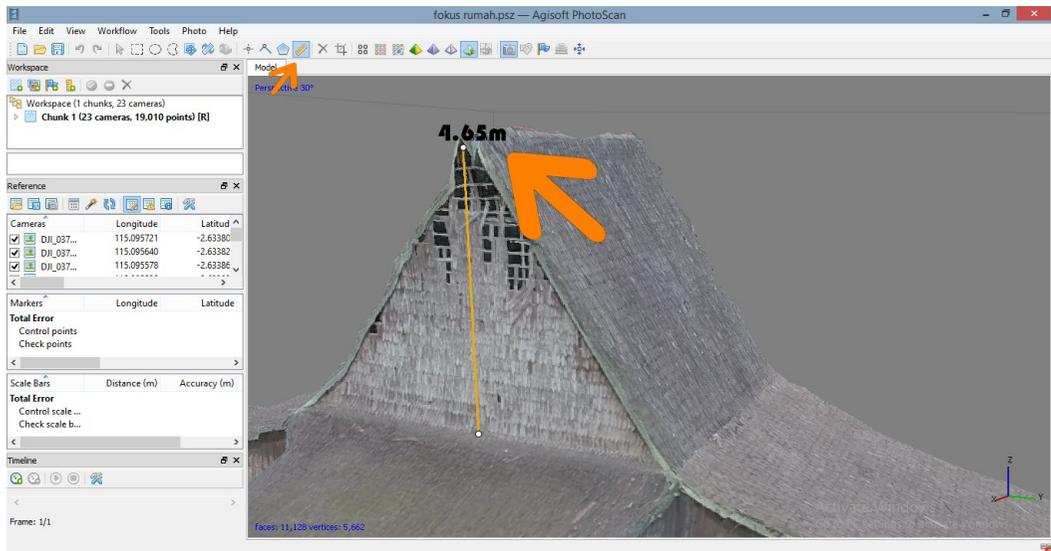
## b) Melakukan Pengukuran

Dalam melakukan pengukuran pada objek 3 dimensi yang telah selesai di proses, dalam fotogrametri dikenal skala foto, yaitu skala rata-rata dari foto udara. Disebut skala rata-rata, karena sifat proyeksi pada foto udara adalah perspektif (sentral), berpusat pada titik utama (*principal point*). Dengan demikian skala di masing-masing titik tidak akan sama, kecuali bila foto udara tersebut benar-benar tegak dan keadaan

permukaan tanah sangat datar. Besarnya skala rata-rata ditentukan oleh tinggi terbang dan tinggi permukaan bumi serta besar fokus kamera.

Skala foto udara berbeda dengan skala peta pada umumnya. Peta adalah gambaran/presentasi dari permukaan bumi dengan skala tertentu. Sifat proyeksi pada peta adalah orthogonal. Oleh karena foto udara mempunyai skala yang bervariasi, maka untuk membuat peta dengan skala dan geometri yang benar, foto udara tersebut harus diproses terlebih dahulu, disebut sebagai proses restitusi foto udara. Pengertian restitusi adalah mengembalikan posisi foto udara pada keadaan seperti pada saat pemotretan dengan proses orientasi (orientasi dalam, relatif, absolut). Pada keadaan tersebut sinar-sinar yang membentuk objek secara geometris telah benar dan dapat dipakai untuk membuat peta dengan cara restitusi tunggal (rektifikasi) ataupun dengan cara restitusi stereo (orthofoto). Untuk keperluan restitusi foto tersebut (tunggal maupun stereo) diperlukan titik-titik kontrol yang diketahui koordinatnya pada sistem foto dan sistem referensi. Titik-titik kontrol tersebut diperoleh sebagai hasil pengukuran di lapangan dan proses triangulasi udara.





Gambar 11.

Dalam permodelan 3 dimensi Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau, dapat memproses pengukuran pada bagian bangunan yang susah untuk dijangkau menggunakan tool (Ruller) pada software Agisoft PhotoScan Professional

Pada bagian yang sulit untuk dijangkau karena kerusakan atap yang mulai rapuh, kita dapat memanfaatkan hasil 3 dimensi, untuk mengukur sisi bangunan yang susah untuk dijangkau, yang sebelumnya sudah di konversikan terhadap ukuran sebenarnya terhadap skala foto.

### c) Triangulasi Udara / Pemetaan Fotogrametri

Triangulasi udara adalah merupakan bagian kegiatan dalam pemetaan fotogrametri dengan cara mengukur titik-titik minor foto, kemudian ditransformasi ke titik referensi (titik kontrol tanah).

Kegiatan triangulasi udara ini dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat dan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan metode

konvensional yang dilakukan secara terestris di lapangan.

Berdasarkan cara pengukuran yang dilakukan dan instrumen yang digunakan yaitu menggunakan metode Model Bebas (*independent model*) yang berdasarkan pada unit dasar model, dimana dilakukan pengukuran koordinat titik-titik model hasil orientasi relatif dan pengukuran koordinat pusat proyeksi foto udara.

Pada pemanfaatan hasil pengolahan 3 dimensi kemudian dilakukan Triangulasi Udara atau Pemetaan Fotogrametri yang dapat divisualisasikan bentuk lingkungan Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau, yang dikelilingi oleh rawa-rawa pada bagian belakang, kiri dan kanan bangunan serta lingkungan yang sudah dipadati oleh rumah warga.



#### d) Alat bantu studi geomorfologi dan geologi

Alat bantu studi geomorfologi dan geologi merupakan disiplin ilmu yang sangat banyak terbantu oleh fotogrametri. Kenampakan 3-D pada foto udara yang disertai dengan adanya *vertical exaggeration* semakin memudahkan para ahli geomorfologi untuk mempelajari kondisi lahan suatu tempat. Perkembangan perangkat lunak dalam fotogrametri digital semakin memperdalam analisis geomorfologi dan geologi. Pemodelan lahan yang dikenal dengan DEM dan TIN mempermudah ahli dan pembelajar geomorfologi dan geologi untuk membuat dan merepresentasikan, bahkan merekonstruksi gejala fisiografis melalui teknik-teknik dalam fotogrametri digital.

#### e) Melakukan Perencanaan Pemugaran

Pada tahap ini Visualisasi 3 dimensi serta data arkeologi lain yang mendukung dapat memberikan penawaran perencanaan penanganan yang meliputi bidang atau komponen yang perlu dibongkar/diganti/diperbaiki/dikonservasi berikut anggaran biaya yang dibutuhkan, tata cara dan model penanganannya, serta rekomendasi penanganan lingkungan sekitar Bangunan Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau.

#### f) Konfigurasi Perangkat Keras

Konfigurasi sistem perangkat keras untuk pengolahan citra digital secara umum terdiri atas enam sub-sistem, yakni subsistem computer, subsistem *input video*, subsistem *output video*, subsistem control proses interaktif, subsistem penyimpanan citra, dan subsistem perangkat khusus pengolahan citra (Murni dalam Sri Hardiyati, 2001).

##### 1) Subsistem komputer

Subsistem komputer merupakan perangkat dasar yang dilengkapi peralatan untuk memasukkan data dan penampil hasil pengolahan data. Peralatan yang termasuk dalam lingkup subsistem ini adalah alat pembaca dan penyimpan pita magnetic (CCT), alat penyimpan dan pembaca disk, printer, dan berbagai jenis terminal yang kompatibel untuk alat komunikasi data (port serial, USB port, infrared, Bluetooth, dan lainnya).

##### 2) Subsistem *input video*

Citra digital merupakan besaran numerik yang merupakan representasi dari tingkat keabuan atau warna suatu objek. Citra digital ini dapat berasal dari perekaman langsung secara digital atau hasil konversi dari data analog. Data tersebut oleh subsistem ini dimasukkan ke sistem sehingga dapat diolah.

##### 3) Subsistem *output video*

Hasil proses pengolahan citra digital



yang berupa cetak film, cetak gambar plotter, bentuk peragaan monitor dapat ditayangkan oleh subsistem ini. Perkembangan dalam teknologi video (VGA Card) berdefinisi tinggi karena kemampuan GPU (*graphics chip*) yang ada pada VGA Card lebih *powerfull* daripada prosesor komputer (CPU) dalam penghitungan matematis. Dengan demikian hasil pengolahan data dapat ditampilkan dalam tempo yang cepat, gerakan yang sesuai, resolusi tinggi, dan warna yang sangat baik.

#### 4) Subsistem kontrol interaktif

Subsistem ini meliputi peralatan yang digunakan untuk komunikasi data antara pengolah data dengan mesin. Alat umum yang paling sederhana adalah terminal, *keyboard*, dan *mouse*. Saat ini telah banyak dikembangkan berbagai alat komunikasi data yang semakin memudahkan kerja pengolahan data. Media transfer data yang sangat mudah antara lain CD/DVD ROM/RW.

#### 5) Subsistem penyimpanan file citra

Saat ini telah bermunculan perangkat penyimpanan dalam ukuran yang sangat besar. Hardisk telah hadir dalam ukuran terabyte (ribuan giga). Subsistem ini berfungsi sebagai penyimpan memori tetap (*virtual memory*), dan untuk mempercepat proses pemindahan file dari disk ke memory digunakan penyimpan sementara,

seperti flashdisk, blueray, DVD, dan lain-lain.

#### 6) Subsistem perangkat keras khusus pengolah citra

Perangkat keras pengolah citra terdiri dari: (1) video digital sebagai prosesor pengolah citra yang akan mengolah citra secara paralel terhadap pixel citra; (2) bagian memori citra yang terdiri dari beberapa susunan pixel, (3) bagian perangkat keras untuk pembesaran, penggulangan, dan sebagainya; dan 4) bagian control keluaran video, yang berfungsi untuk mengatur warna.

### 7. Penutup

Pengolahan data 3 dimensi ini dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data teknis tentang kondisi fisik bangunan Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau, yang meliputi kondisi keterawatan dan tingkat kerusakan yang terjadi. Tujuan dari penyusunan rencana ini adalah untuk mewujudkan konsep penanganan pelestarian bangunan yang sistematis, sesuai dengan permasalahan kerusakan dan pelapukan yang dihadapi, dan senantiasa mengacu pada prinsip teknis arkeologis pemugaran Cagar Budaya. Dengan demikian perencanaan tersebut dapat menjadi acuan dalam pemugaran Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau.



## Daftar Pustaka

- Balai Konservasi Borobudur. 2013. Laporan Kegiatan Perekaman Data dan Pendokumentasian Situs-situs di Jawa Barat Dengan Aplikasi 3D Laser Scanner Photogrammetry. Magelang.
- Bambang, Syaeful Hadi. 2007. Dasar-dasar Fotogrametri. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- BPCB Kalimantan Timur. 2017. Laporan Studi Teknis Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau. Samarinda: BPCB Kaltim.
- Brahmantara. 2015. 3D Laser Scanning Teknologi. Magelang: Balai Konservasi Borobudur.
- Deni S. 2016. Modul Praktikum Pemetaan UAV Fotogrametri. Bandung: LPPM ITB.
- Firdiansyah, Eka Rachmawan. 2016. Visualisasi 3D Bangunan Cagar Budaya (Cultural Heritage) Menggunakan Terrestrial Laser Scanner (Studi Kasus: Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur). Surabaya: Teknik Geomatika FTSP-ITS.
- Moch., Sani Salam. Pemanfaatan Fotogrametri Rentang Dekat Untuk Pemodelan 3D Cagar Budaya Menggunakan Kamera Non-metrik Dslm dan Dslr (Studi Kasus: Candi Brahu, Mojokerto). Surabaya: Teknik Geomatika FTSP-ITS.
- Yasraf, Amir Piliang. 2003. Budaya Teknologi di Indonesia Kendala dan Peluang Masa Depan. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Andhika, Geomatics and Surveying. 2010. <http://geomaticsandsurveying.blogspot.co.id/2010/03/fotogrametri.html>



## STRATEGI PELESTARIAN WARISAN BUDAYA PURA GOA GAJAH

Oleh: Kadek Dedy Prawirajaya R.

### Abstrak

Turistifikasi warisan budaya Pura Goa Gajah sebagai salah satu destinasi wisata menimbulkan pergeseran nilai budaya lokal yang berkaitan dengan keaslian (autentisitas) tinggalan arkeologi, kesucian, dan kesucian pura. Artikel ini bertujuan untuk membahas strategi yang dilakukan dalam melestarikan warisan budaya Pura Goa Gajah. Ada tiga strategi formal yang diterapkan untuk melindungi warisan budaya Pura Goa Gajah. Ketiga hal itu yaitu strategi zonasi, pengembangan nilai-nilai potensial melalui promosi dan penelitian ilmiah, dan pemanfaatan Pura Goa Gajah demi kesejahteraan masyarakat. Selain tiga strategi formal tersebut, strategi tradisional konvensional juga dilakukan.

Kata Kunci: *turistifikasi, nilai, strategi, pelestarian*

### 1. Pendahuluan

Warisan budaya adalah produk atau hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jati diri suatu kelompok atau bangsa (Davidson, 1991:2). Dari gagasan ini, warisan budaya merupakan hasil budaya fisik (*tangible*) dan nilai budaya (*intangible*) dari masa lalu. Warisan budaya fisik (*tangible heritage*) sering diklasifikasikan menjadi warisan budaya tidak bergerak (*immovable heritage*) dan warisan budaya bergerak (*movable heritage*). Warisan budaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah benda

cahar budaya Pura Goa Gajah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Benda cagar budaya dapat dibedakan menjadi dua yaitu benda cagar budaya yang bersifat *living monument* (masih difungsikan), dan benda cagar budaya yang bersifat *dead monument* (tidak difungsikan).



Warisan budaya Pura Goa Gajah bersifat *living monument* karena sampai saat ini masih difungsikan sebagai tempat pemujaan bagi masyarakat Desa Bedulu khususnya, dan masyarakat sekitar pada umumnya. Selain sebagai tempat pemujaan, warisan budaya Pura Goa Gajah difungsikan sebagai daya tarik wisata karena didalamnya memiliki banyak tinggalan arkeologi dengan nilai seni dan estetika yang bisa dinikmati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara.

Secara kepurbakalaan, Pura Goa Gajah adalah situs warisan budaya yang terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dan merupakan sebuah gua yang dipahat pada dinding batu padas keras yang curam dan menjorok keluar. Gua tersebut menyerupai huruf T di bagian dalam, dimana pada bagian barat gua terdapat arca Ganesa dan bagian timur terdapat Trilingga. Pada sisi selatan gua, terdapat kompleks petirtaan yang terdiri dari tiga bagian dengan enam arca pancoran. Keenam arca tersebut terdiri dari dua arca laki-laki dan empat arca wanita.

Air di dalam kompleks petirtaan disalurkan dari arah timur gua melalui bawah tanah. Dari bentuk arca yang menggunakan *Prabhamandala* sebagai tanda kedewaan, kolam-kolam itu tentu bukan kolam biasa, melain-

kan kolam suci yang biasa disebut petirtaan (Ardika, dkk. 2013: 246). Pada sisi tenggara dan selatan kompleks petirtaan terdapat Lembah Tukad Pangkung. Tinggalan di kompleks ini berupa fragmen relief payung bersusun tiga belas, relief stupa bercabang tiga, fragmen arca budha dan relief hias. Di sebelah tenggara relief stupa terdapat sebuah fragmen arca budha yang diletakkan di dalam pura pada salah satu pelinggih. Arca tersebut tidak berkepala, digambarkan duduk di atas lapik dengan sikap *padmasana*, sikap tangannya *dhyana mudra* (sikap semadi). Di sebelah fragmen arca tersebut terdapat sebuah arca budha yang masih utuh, tetapi arca tersebut hilang pada tanggal 19 Januari 1990 dan sampai saat ini belum ditemukan (Suantra dan Muliarsa, 2006: 33-59 dalam Laksmi, dkk, 2011: 59).

Mengenai keberadaan Situs Goa Gajah, R. Goris pernah mengajukan hipotesis bahwa kata *antakunjarapada* yang disebut dalam Prasasti Dawan tahun 975 Saka/ 1053 Masehi dan Prasasti Pandak Bandung tahun 993 Saka/ 1071 Masehi adalah nama lain dari Goa Gajah. Pada dinding pintu masuk Goa Gajah terdapat tulisan Kadiri Kwadrat yang berbunyi *kumon* dan *sahy(w)angsa* (Stutterheim, 1929: 75-76; Goris 1954: 24). Huruf Kadiri Kwadrat sangat populer pada abad ke-11 Masehi. Huruf Kadiri



Kwadrat yang tergores pada dinding masuk Goa Gajah digunakan sebagai patokan untuk menentukan kronologi gua yang kemungkinan berasal dari abad ke-11 Masehi. Jika dugaan ini benar, maka Goa Gajah erat kaitannya dengan masa pemerintahan putra-putra Udayana (Suantra dan Muliarsa, 2006: 58).

Warisan budaya Pura Goa Gajah sebagai komoditas yang sarat dengan nuansa arkeologis, sejarah, dan nilai religius mengalami internasionalisasi yang juga dinikmati oleh wisatawan, sehingga budaya Bali yang menyertai cagar budaya Pura Goa Gajah mengalami perkembangan mengikuti arus budaya global. Oleh karena itu, selain mempromosikan Pura Goa Gajah sebagai destinasi wisata, masyarakat Desa Bedulu juga memiliki kewajiban untuk memelihara dan melestarikan cagar budaya Pura Goa Gajah (Laksmi, 2011:122).

Perkembangan pariwisata yang begitu pesat membuat banyak kalangan khawatir terhadap nilai-nilai kebudayaan Bali yang semakin dangkal, karena adanya komoditisasi kebudayaan, internasionalisasi destinasi wisata, penurunan kualitas hasil kebudayaan, profanisasi kesenian dan kebudayaan sakral, serta profanisasi kegiatan ritual atau tempat suci. Pada kenyataannya, turistikasi cagar budaya, khususnya Pura Goa Gajah

memberikan dampak positif terhadap masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan kebudayaan Bali itu sendiri. Masyarakat Desa Bedulu yang terikat dalam organisasi sosial tradisional (banjar, adat, dan desa pakraman) semakin kuat dan dinamis, meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga identitas (Pitana, 2005:165, 175).

Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, menyebutkan bahwa cagar budaya sangat penting untuk dilestarikan. Menurut Geertz (1999:19), pelestarian kebudayaan tidak berarti membekukan kebudayaan karena kebudayaan selalu berubah, direkonstruksi, dan direkreasi sebagai respon terhadap situasi yang berubah, namun tetap mempertahankan keaslian budaya dalam pelestarian yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi (Pitana, 2005:165). Jadi Pura Goa Gajah perlu dilestarikan sesuai dengan strategi yang ada yaitu melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang disesuaikan dengan perkembangan jaman dalam rangka memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat lokal dan manfaat psikologi dan pengetahuan kepada masyarakat internasional.



## 2. Pembahasan

Indonesia yang terdiri dari berbagai etnik memiliki kebudayaan yang beragam sebagai warisan budaya bernilai luhur dan perlu dilestarikan. Pemerintah memberikan perhatian dalam rangka menjaga dan melestarikan dengan cara menuangkan kebudayaan dalam UUD 1945 pasal 32 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa sangat perlu dilestarikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai cerminan identitas bangsa. Salah satu kebudayaan yang mencerminkan nilai-nilai luhur dan identitas bangsa dan masyarakat adalah cagar budaya. Pura Goa Gajah adalah salah satu cagar budaya yang telah dan sedang mengalami turistifikasi ditandai dengan intensitas kunjungan wisatawan dan interaksi masyarakat dengan wisatawan yang semakin meningkat, sehingga cagar budaya Pura Goa Gajah yang memiliki nilai sejarah, nilai sosial, nilai budaya dan nilai religius sangat perlu dilestarikan.

Pelestarian cagar budaya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu (1)

Pelestarian formal: pelestarian yang memakai kaidah-kaidah ilmiah (formal) dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan pelestarian yang tertera pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011; (2) Pelestarian konvensional: pelestarian yang dilakukan secara tradisional oleh masyarakat (bukan ahli konservasi) atau segala aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam menjaga dan merawat benda-benda cagar budaya (Laksmi, 2011: 121).

### Pelestarian Formal

Mengingat banyaknya cagar budaya yang perlu dilestarikan (berjumlah 502 situs), pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang bertujuan untuk (a) melestarikan budaya bangsa dan warisan umat manusia, (b) meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya, (c) memperkuat kepribadian bangsa, (d) meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan (e) mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional (Laksmi, 2011: 122, 125).

Selain kebijakan pelestarian cagar budaya melalui UU tersebut, pemerintah sebenarnya sudah membentuk struktur organisasi yang menangani teknis pelestarian sejak zaman kolonial Belanda pada



14 Juni 1913 yaitu Dinas Purbakala yang sekarang disebut dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB). Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, strategi pelestarian cagar budaya mencakup 3 aspek, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Pelindungan adalah usaha pencegahan dan penanggulangan cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya. Pura Goa Gajah dilindungi dengan cara memelihara semua tinggalan arkeologis yang menyertai Goa Gajah. BPCB memberikan perlindungan pada zona inti yaitu bagian terpenting cagar budaya area gua beserta arca yang ada di dalamnya, arca Budha, dan kolam petirtaan. Uki- ran yang terdapat di mulut Goa dan di atas pintu Goa dibersihkan setiap hari oleh petugas dari BPCB menggunakan kuas dan alat *spray* yang berisi obat-obat anti lumut.

Pemerintah Kabupaten/Kota aktif menjaga keberadaan Pura Goa Gajah dengan melakukan pengembangan penunjang Pura seperti menyediakan akses/jalan berupa tangga menuju areal gua, tangga dan jembatan menyebrang Sungai Pakerisan menuju pertapaan Budha, serta membangun *wantilan* yang dapat di-

gunakan untuk rekreasi, konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, dan kegiatan keagamaan. Di samping itu pemerintah Kabupaten Kota menyediakan sarana penunjang kegiatan komersial dan pariwisata seperti tempat parkir, toilet, dan tempat berjualan cenderamata. Kerjasama yang dilakukan dalam rangka memperindah tempat rekreasi juga dilakukan dengan dengan pihak hotel NICO yaitu dalam bentuk pertamanan.

Pengembangan adalah upaya pelestarian dengan cara meningkatkan potensi nilai dan informasi, mempromosikan serta memanfaatkan cagar budaya tersebut melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi secara berkelanjutan namun tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian. Nilai sejarah, nilai tinggalan arkeologi, nilai sosial budaya, dan nilai religius yang dimiliki Pura Goa Gajah, serta tinggalan arkeologi dalam bentuk arca Hindu dan Budha, gua dan ceruk pertapaan, dan kolam petirtaan, dikembangkan dalam wujud aktivitas keagamaan kemudian diinformasikan dan didistribusikan kepada pasar yang meliputi wisatawan lokal, nusantara, dan mancanegara, melalui brosur, *booklet*, dan web oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar.

Pelestarian dengan cara pemanfaatan dilakukan dengan cara



memberdayakan cagar budaya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah yang mempromosikan cagar budaya Pura Goa Gajah sebagai destinasi wisata melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 berarti telah membangun suatu sistem yang melibatkan masyarakat, pihak swasta, pemilik hotel dan biro perjalanan serta pemerintah itu sendiri untuk merancang, menggerakkan dan memberdayakan pura Goa Gajah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Dari promosi dan pen-dayagunaan cagar budaya Pura Goa Gajah sebagai destinasi wisata, akan terjadi pelestarian dan pewarisan nilai-nilai budaya (Laksmi : 2011: 123).

Dalam industri pariwisata, Pura Goa Gajah dimanfaatkan sebagai destinasi wisata arkeologis yang religius, sebagai produk budaya dan komoditas budaya yang ditawarkan kepada wisatawan, dan wisatawan akan memperoleh pengalaman dan pengetahuan psikologi setelah berkunjung ke Pura Goa Gajah, yaitu berupa nilai-nilai sejarah, nilai sosial budaya cerminan toleransi beragama, nilai-nilai estetika arsitektur arkeologis dan keindahan alam di sekitar goa. Nilai-nilai tersebut mampu menempatkan Pura Goa Gajah ke dalam 10 besar sebagai destinasi wisata yang

mendapat kunjungan wisatawan.

### **Pelestarian Konvensional**

Pelestarian konvensional adalah pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya menjaga dan merawat cagar budaya yang ada di wilayahnya. Menurut penelitian, sebagian besar cagar budaya di Bali ditemukan di dalam pura (Laksmi, 2011: 129).

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, produk budaya yang ditawarkan adalah tinggalan arkeologi yang bersifat *intangible* dimana konsumen akan memperoleh pengalaman psikologi berupa nilai-nilai dan norma budaya berupa toleransi beragama. Pelestarian tidak hanya dilakukan terhadap destinasi Pura Goa Gajah seperti gua, arca Hindu dan Budha, kolam petirtaan dan lingkungan sekitar situs, tetapi juga benda *intangible* seperti nilai-nilai dan norma budaya di Pura Goa Gajah, ekspresi seni, dan aktivitas ritual. Masyarakat Desa Bedulu yang terhimpun dalam organisasi sosial masyarakat khususnya, dan Dinas Pariwisata Kota Gianyar umumnya melakukan pelestarian terhadap Pura Goa Gajah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Pura Goa Gajah.



(a) Pelestarian Pura Goa Gajah Melalui Pelindungan

Pelestarian dengan cara memberikan pelindungan meliputi penyelamatan, pemugaran, pengamanan, pemeliharaan, dan *zoning*. Penyelamatan dan pemugaran Pura Goa Gajah dilakukan pada tahun 2013 dengan: (1) merenovasi pura di sebelah gua dengan arsitektur ukiran baru yang dulunya tidak menggunakan cat prada sekarang menggunakan prada, badan pura sekarang menggunakan batu hitam, (2) mengembangkan struktur pura dengan membuat candi bentar antara jaba tengah menuju jaba sisi, membangun bale bengong di jaba sisi, pelinggih alit di sebelah pohon kayu besar, dan (3) membangun puangan 'dapur' untuk keperluan upacara.

Pengamanan Pura Goa Gajah dilakukan selama 24 jam, dalam artian bahwa pura tersebut dibuka selama 24 jam. Pada pukul 17.00 WITA sampai keesokan harinya, pemandu wisata lokal Pura Goa Gajah yang merupakan staf Jero Mangku Gde (pendeta yang bertugas di Pura Goa Gajah), melakukan penjagaan dan pengamanan secara langsung sebagai pemandu bagi wisatawan yang berkunjung di waktu tersebut. Di samping itu, pengamanan dilakukan dengan cara menambah penerangan dengan lampu listrik di areal gua, di

dalam gua, dan pada tangga menuju areal gua dan pertapaan Budha.

Pemeliharaan terhadap Pura Goa Gajah adalah perawatan secara konvensional dengan alat tradisional seperti sapu dan cangkul untuk membersihkan areal Pura Goa Gajah. Petugas yang melakukan pembersihan ini adalah staf Jero Mangku yang bertugas di areal pura.

*Zoning* dalam hubungannya dengan pelindungan Pura Goa Gajah oleh masyarakat hanya mencakup keagamaan, yaitu dengan melakukan ritual sehari-hari dengan menghaturkan *canang sari* di dalam dan sekitar gua, dan melakukan upacara piodalan setahun sekali setiap Purnama Kapat. Kegiatan ini secara tidak langsung telah mewariskan aktivitas tersebut kepada generasi berikutnya dan dapat dimaknai sebagai pelindungan terhadap upacara keagamaan.

Pura Goa Gajah sebagai *living monument* ditandai dengan Masyarakat Desa Bedulu yang melakukan aktivitas ritual keagamaan. Hal ini memberikan manfaat terhadap cagar budaya tersebut, karena dengan melakukan ritual keagamaan sehari-hari dan setiap hari *piodalan*, berarti Pura Goa Gajah mendapat perlindungan dan perawatan.



### (b) Pelestarian Pura Goa Gajah Melalui Pengembangan

Pengembangan cagar budaya Pura Goa Gajah meliputi penelitian, revitalisasi dan adaptasi. Penelitian terkait dengan sejarah situs Goa Gajah dan tinggalan arkeologi dalam bentuk arca dan bangunan gua telah dilakukan oleh ahli arkeologi dari dalam dan luar negeri serta masyarakat akademisi sejak tahun 1923.

Pelindungan yang mencakup revitalisasi Pura Goa Gajah dilakukan melalui pemanfaatan Pura Goa Gajah oleh masyarakat lokal, turis domestik dan mancanegara untuk melakukan semedi di malam hari. Adaptasi telah terjadi sejak dibangunnya gua, yaitu sebagai tempat pemujaan agama Hindu dan Budha sampai sekarang.

### (c) Pelestarian Pura Goa Gajah Melalui Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya Pura Goa Gajah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Pelestarian melalui pemanfaatan mencakup agama, sosial, budaya, pendidikan, IPTEK, dan pariwisata.

Di bidang agama, Pura Goa Gajah disucikan dan disakralkan karena digunakan sebagai tempat pemujaan agama Hindu dan Budha oleh

masyarakat Bali maupun di luar Bali, serta masyarakat dengan kepercayaan berbeda. Di bidang sosial budaya, Pura Goa Gajah digunakan sebagai tempat sosialisasi antar masyarakat pendukung dalam setiap aktivitas upacara keagamaan.

Hal terpenting dari pelestarian ini adalah pemanfaatannya sebagai tempat pelestarian nilai-nilai budaya yang mencerminkan toleransi antar umat beragama dan pelestarian bentuk-bentuk ekspresi seni yang berkembang tidak hanya seni yang berasal dari Desa Bedulu, tetapi juga seni yang berasal dari luar Desa Bedulu, dari luar Bali dan dari mancanegara. Hal ini dibuktikan oleh komunitas seni Desa Bedulu yang menggagas acara seni regular di Pura Goa Gajah dengan judul Festival Srawung Cipta Seni Sembah di Pura Goa Gajah sejak hari *Tumpek Kerulut* Sabtu tanggal 15 Juli 2014, dan rencananya Pura Goa Gajah ini akan menjadi lokasi perhelatan seni tersebut setiap tahun pada hari *Tumpek Kerulut*. Festival ini menyajikan berbagai kreasi karya seni tradisional dan kontemporer untuk menghibur para pengunjung yang datang ke tempat wisata tersebut. Adapun *flyer* kegiatan tersebut seperti pada Gambar 2.1 yang diunduh dari <http://worldinterfaithharmonyweek.com/>.





Held every six months on Tumpek Krulut / Compassion Day,  
this 2nd Sharing Creating Offering Art at Goa Gajah on 31 January 2015  
was also a  
United Nations World Interfaith Harmony Week Event  
and  
a Pre-Parliament of the World's Religions Event

Gambar 2.1 Flyer Srawung Cipta Seni Sembah

Acara ini digelar di objek wisata Pura Goa Gajah, Desa Bedulu, Gianyar untuk kedua kalinya, yaitu tepat pada hari Tumpek Krulut, Sabtu (31/1/2015). Acara ini dibuka dengan tarian sakral yang nyaris punah, namun berhasil dihidupkan kembali yaitu Rejang Renteng. Ini merupakan tarian yang sangat langka, yaitu tarian Dewa Yadnya. Acara ini bertujuan untuk menstimulasikan kreativitas seni sembah tradisional maupun kontemporer dan meningkatkan kepekaan dan apresiasi akan keindahan seni, nilai-nilai budaya, serta kesempatan untuk mengekspresikannya. Salah satu penggagas acara, Diane Butler menyampaikan bahwa ide ini muncul karena ia ingin melihat pertunjukan seni tidak semata hanya menjadi hiburan. Dengan dipentaskannya tari tradisional-kontemporer lakon

Persembahan di Pura Goa Gajah, ia berharap akan menambah ruang bagi para seniman untuk berkreasi.

### 3. Kesimpulan

Pura Goa Gajah termasuk ke-10 besar destinasi wisata di Bali yang dikunjungi oleh wisatawan lokal dari Bali, wisatawan lokal dari luar Bali (domestik), dan wisatawan dari mancanegara.

Walaupun terjadi turistifikasi, pelestarian cagar budaya Pura Goa Gajah dilakukan dengan strategi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan baik secara formal dan informal. Secara formal dilakukan oleh BPCB yang menangani situs cagar budaya Pura Goa Gajah yang meliputi gua, arca, fragmen arca, dan kolam petirtaan. Sedangkan oleh Dinas Pariwisata Kota Gianyar dilakukan dengan cara mempromosikan ke dunia internasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010. Pelestarian konvensional dilakukan oleh masyarakat lokal selain dengan cara memelihara, membersihkan, menjaga keamanan lingkungan di sekitar Pura Goa Gajah tetapi juga dengan cara melakukan aktivitas ritual sehari-hari dan pada hari-hari besar umat Hindu lainnya.



## Daftar Pustaka

- Ardika, I Wayan, dkk,. 2013. Sejarah Bali: Dari Prasejarah Hingga Modern. Denpasar: Udayana University Press.
- Davidson, G. dan C Mc Conville. 1991. A Heritage Handbook. St. Leonard. NSW: Allen & Unwin.
- Laksmi, A.A. Rai Sita; Mardika, I Made; Sudrama, Ketut. 2011. Cagar Budaya Bali: Menggali Kearifan Lokal dan Model Pelestariannya. Denpasar: Udayana University Press.
- Pitana, I Gde dan Gayatri Putu G. 2005. Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: Andi.
- Stutterheim, W.F. 1929. Oudheden van Bali. Terjemahan. I Gusti Ngurah Gede. Tjatra. Denpasar: Hotel Dirgapura.
- Suantra I Made, Muliarsa I Wayan. 2006. Pura Pegulingan Tirtha Empul Dan Goa Gajah; Peninggalan Purbakala di Daerah Aliran Sungai Pakerisan dan Petanu. Denpasar: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Bali, NTB, dan NTT.



## GUA DEBU: SITUS HUNIAN PRASEJARAH DI KABUPATEN BALANGAN

Oleh: Bambang Sugiyanto

### Abstrak

Kabupaten Balangan merupakan wilayah kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tahun 1999. Pada usia yang masih sangat muda ini, Kabupaten Balangan sedang giat-giatnya membangun di segala bidang. Salah satu bidang pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan di bidang kebudayaan, yang dimulai dari pendataan sumber daya budaya yang ada di wilayah tersebut. Salah satu bagian dari kegiatan di atas, adalah pendataan tentang situs-situs arkeologi prasejarah. Hasil pendataan tersebut, menemukan satu situs gua yang potensial sebagai situs hunian prasejarah, yang diberi nama Gua Debu. Bagaimana potensi arkeologi di Gua Debu merupakan permasalahan utama dari penulisan artikel ini. Metode penelitian yang digunakan untuk mengungkap dan menjawab permasalahan di atas, adalah metode penelitian deskriptif dengan model penalaran induktif. Hasil penelitian dan penulisan artikel ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi tentang kebudayaan prasejarah di Kabupaten Balangan khususnya, dan wilayah Kalimantan Selatan pada umumnya.

Kata kunci: *arkeologi, situs prasejarah, Balangan*

### I. Latar Belakang Penelitian

Sejak tahun 2013, Balai Arkeologi Banjarmasin (sekarang berganti menjadi Balai Arkeologi Kalimantan Selatan) menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Balangan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian tentang potensi sumber daya budaya yang ada di wilayah Kabupaten Balangan. Sebagai sebuah kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan belum mempunyai

catatan tentang potensi situs budaya di wilayahnya. Oleh karena itu, kegiatan penelitian yang pertama dilakukan adalah “Penelitian situs-situs budaya di Kabupaten Balangan” yang dilaksanakan tahun 2013 (Tim peneliti, 2013).

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Balangan mempunyai potensi situs-situs budaya yang cukup bagus. Keberadaan situs-situs budaya tersebut tidak lepas dari dukungan sumber daya alam



sangat besar dan menjanjikan bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Balangan. Kandungan minyak bumi dan batu bara di wilayah Balangan pada beberapa tahun lalu sempat dilirik oleh pemerintah kolonial Belanda, sebelum mereka memutuskan untuk mengembangkan eksplorasi minyak di Murungpudak (Tabalong). Beberapa sumur minyak percobaan peninggalan Belanda masih bisa kita lihat terutama di wilayah Paringin Kota. Pada masa pendudukan Belanda pun meninggalkan kisah dan materi budaya yang masih bisa kita saksikan, seperti misalnya jembatan besi yang ada di Desa Lampihong, dan beberapa rumah batu lama yang menurut kisahnya pernah digunakan oleh tentara Belanda sebagai *basecamp*. Keberadaan Belanda di wilayah Balangan sangat terkait dengan sumber daya tambang dan perkebunan karet. Paringin dikenal sebagai lumbung karet pada masa itu, dan rumah-rumah batu yang bagus dan besar yang ada di Desa Lampihong saat ini adalah milik para bos atau juragan karet yang berkuasa pada masa itu. Situs budaya yang erat kaitannya dengan perlawanan terhadap Belanda di Balangan adalah situs Makam Tumenggung Jalil dan situs Benteng Tundakan di Desa Tundakan (Tim Peneliti, 2013; Tim peneliti, 2014).

Selain potensi situs budaya dari masa sejarah yaitu perjuangan melawan kolonialisme Belanda, tampaknya Kabupaten Balangan juga mempunyai potensi situs dari budaya prasejarah. Kecurigaan ini berdasarkan pada kondisi topografi Kabupaten Balangan, yang mempunyai daerah berbukit terutama pada dua kecamatan yaitu Halong dan Tebing Tinggi. Kedua kecamatan ini berada di jajaran Pegunungan Meratus yang merupakan pegunungan besar yang membelah wilayah Kalimantan Selatan. Seperti diketahui pada deretan Pegunungan Meratus ini banyak ditemukan kawasan karst yang menyimpan sumber daya gua-gua atau ceruk payung (*rock-shelter*) (Tim Peneliti, 2013; Tim Peneliti, 2015). Gua dan ceruk payung pada masa prasejarah dikenal sebagai salah satu tempat tinggal yang sangat digemari manusia prasejarah. Mereka memanfaatkan gua-gua dan ceruk payung sebagai tempat beristirahat sementara di saat melakukan kegiatan perburuan binatang. Kebiasaan ini berlanjut dengan memanfaatkan gua-gua atau ceruk payung sebagai tempat tinggal (hunian) tetap. Gua-gua yang dipilih sebagai hunian biasanya ditentukan oleh beberapa syarat tertentu, seperti dekat dengan sumber air, dekat dengan sumber bahan makanan (subsistensi) alternatif, dekat dengan hutan



tempat mereka berburu, dan mempunyai ruangan yang cukup luas dengan kondisi yang kering, tidak pengap, dan terang.

Potensi gua-gua pada kawasan karst di Kecamatan Halong dan Tebing Tinggi ini belum diketahui dengan pasti. Oleh karena itu, untuk mengetahui potensi sejarah budaya yang ada pada kedua kawasan karst tersebut harus dilakukan kegiatan inventarisasi gua-gua dan penelitian tentang kandungan sejarah budaya yang ada di dalamnya. Kawasan karst Halong dan Tebing Tinggi ini masih termasuk dalam kawasan karst di sebelah barat Pegunungan Meratus, mulai dari Tabalong sampai Banjar. Berdasarkan studi pustaka, diketahui bahwa kawasan karst Pegunungan Meratus, khususnya di bagian utara (Kabupaten Tabalong) mempunyai jejak hunian manusia prasejarah. Hasil penelitian Balai Arkeologi Banjarmasin dari tahun 1995 sampai tahun 2000 menunjukkan bahwa manusia prasejarah (*Australomelanesoid*) pernah tinggal di Gua Babi sekitar 5.000 tahun lalu (Widianto dan Retno Handini, 2003). Mereka mengembangkan budaya prasejarah dengan teknologi pembuatan alat batu, alat tulang, perhiasan kerang, dan teknologi pembuatan tembikar (wadah makanan dari tanah liat bakar) yang cukup maju. Gua Babi khusus digunakan

untuk kegiatan kehidupan, sementara untuk kegiatan kematian (penguburan) mereka memilih gua lain yang ukurannya lebih kecil. Lokasi gua penguburan pun dipilih yang cukup jauh dan tidak berada sejajar dengan gua hunian, tetapi dipilih yang berada di balik bukit atau gunung yang sama. Gua Tengkorak yang berada di lereng Gunung Batubuli menjadi pilihan manusia pendukung budaya prasejarah Gua Babi untuk menguburkan anggota keluarga mereka yang meninggal.

Bagaimana dengan kawasan karst di Balangan (Halong dan Tebing Tinggi), apakah kawasan tersebut termasuk dalam daerah eksploitasi manusia prasejarah masa lalu, yang bergerak dari selatan (Awangbangkal) ke utara (Tabalong)? Menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai potensi gua-gua di Kabupaten Balangan ini, apakah mempunyai situs gua hunian ataukah hanya gua-gua alam yang bisa dikembangkan menjadi objek wisata alam minat khusus.

## II. Permasalahan

Apakah tidak ada kemungkinan mereka punya daya jelajah sampai ke wilayah Balangan? Berdasarkan hasil penelitian survei Balai Arkeologi Banjarmasin di kawasan karst di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan, terlihat



bahwa jejak-jejak prasejarah itu juga dijumpai pada beberapa gua di lokasi tersebut. Gua Janggarawi dan Gua Pendalaman (Hulu Sungai Selatan), merupakan dua situs yang di dalamnya terdapat artefaktual prasejarah. Artinya, ada kemungkinan kawasan karst di wilayah Kabupaten Balangan, yang terletak di antara Kabupaten Tabalong dan Hulu Sungai Selatan, juga mempunyai situs-situs hunian prasejarah dalam tahapan yang sama atau berbeda. Apakah ada gua-gua di wilayah Balangan yang pernah dimanfaatkan manusia prasejarah?

### III. Metode Penelitian

Dalam upaya menjawab permasalahan yang diajukan di atas, digunakan metode penelitian deskriptif dengan penalaran induktif. Metode penelitian ini berdasarkan pada pengamatan seksama terhadap semua unsur yang ada di lapangan, kemudian digeneralisasikan dengan hasil studi pustaka, sehingga dapat dijadikan satu kesimpulan yang diyakini sebagai jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan.

### IV. Pembahasan

Kabupaten Balangan secara geografis berada di daerah Pegunungan Meratus bagian barat, berbatasan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Tabalong, Kabupaten

Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tapin. Seperti sudah dijelaskan pada bagian latar belakang, Pegunungan Meratus merupakan kawasan pegunungan besar yang membelah Kalimantan Selatan menjadi dua bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Bagian barat Pegunungan Meratus terdiri dari Kabupaten Tabalong (paling utara), kemudian berturut-turut Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut. Sementara bagian timur Pegunungan Meratus hanya terdiri dari Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (BPS Kalimantan Selatan, 2016).

Wilayah bagian barat Pegunungan Meratus ini diketahui mempunyai potensi kawasan karst yang cukup bagus. Hasil penelitian Balai Arkeologi Kalimantan Selatan tahun 1996-2000, memperlihatkan adanya kebudayaan prasejarah yang berkembang pesat pada kawasan karst di sekitar Desa Randu, Kecamatan Muara Uya, yaitu pada situs Gua Babi dan Gua Tengkorak. Kebudayaan prasejarah di kawasan ini menampilkan teknologi penyerpihan batu yang cukup maju (mesolitik), dengan kemampuan membuat perhiasan dari bahan kerang, tulang, dan tanah liat bakar. Manusia prasejarah yang mengem-



bangkan kebudayaan prasejarah ini dipastikan adalah *Austromelanesoid*, yang rangkanya ditemukan pada sisa penguburan di situs Gua Tengkorak (Widianto dan Handini, 2003).

Hasil survei prasejarah yang dilakukan berikutnya pada kawasan karst yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin memperlihatkan adanya indikasi kuat tentang adanya situs gua hunian lain di wilayah tersebut (Wasita dkk, 2004). Sayangnya belum ada penelitian lanjutan untuk lebih menegaskan keberadaan situs-situs hunian prasejarah pada ketiga kawasan karst tersebut. Sementara itu, Kabupaten Balangan juga mempunyai potensi kawasan karst di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong. Keletakannya yang berbatasan langsung dengan beberapa kawasan karst lainnya mempunyai indikasi arkeologi prasejarah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan kegiatan penelitian survei.

Kedua wilayah Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong termasuk dalam jajaran kawasan karst Pegunungan Meratus bagian barat (BPS Balangan, 2014), yang kemungkinan besar mempunyai hubungan yang erat dengan budaya prasejarah Gua Babi/ Gua Tengkorak di Tabalong serta Gua Janggarawi di Hulu Sungai Selatan. Dari hasil pengamatan langsung di

lapangan, kondisi kawasan karst di Halong dan Tebing Tinggi sungguh memprihatinkan. Hampir semua gunung atau bukit yang ada, dijadikan lahan tambang galian C (batu kapur) oleh penduduk setempat. Berdasarkan pengamatan, sebenarnya banyak gua-gua atau ceruk payung yang cukup potensial sebagai tempat tinggal, namun kondisinya sekarang rusak dan tidak menyisakan deposit budaya apapun untuk penelitian arkeologi. Kebutuhan pupuk tanaman dan pembangunan jalan atau pemukiman penduduk, membuat sebagian penduduk menggali tanah (guano) dari dalam gua-gua untuk pertanian atau perkebunan, dan menambang batu kapur yang ada di gunung atau bukit kapur tersebut.



Gambar 1. Situs Gua Debu dan kegiatan ekskavasi yang dilaksanakan di dalamnya  
(Dok. Balai Arkeologi Kalimantan Selatan)

Khusus di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi, dari tujuh gunung karst yang disurvei, potensi prasejarah hanya terlihat di Gunung Batu Sumsung. Gunung ini juga sudah ditambang oleh penduduk dan bekas-bekas kegiatan tersebut masih bisa kita lihat di sekitar atau sekelilingnya. Saat ini Gunung Batu Sumsung sedang diupayakan menjadi tempat yang dilindungi dan disiapkan sebagai tempat wisata alam yang menantang. Ada jalur penelusuran yang cukup menanjak yang akan membawa kita sampai di puncak gunungnya. Dari puncak gunung ini kita bisa melihat pemandangan sekeliling Desa Batu Sumsung yang sangat menarik. Pada pertengahan jalan setapak pendakian gunung inilah, kita menemukan sebuah gua kecil yang penuh dengan coretan tangan dari para pengunjung yang kurang bertanggung jawab. Gua kecil dengan lorong sedalam 6 meter ini mempunyai morfologi yang sangat memenuhi syarat layak huni. Kondisi lantai tanah yang kering dengan sinar matahari yang bisa menerangi sampai ke dalam gua, merupakan suatu kondisi yang sangat ideal sebagai tempat hunian. Gua kecil tersebut oleh penduduk setempat dinamakan Gua Debu, karena tanahnya yang

yang kering dan berdebu (Tim Penelitian, 2015).

Gua Debu inilah yang kemudian menjadi fokus kegiatan penelitian arkeologi dengan penggalian yang dilakukan pada dua buah lubang uji. Hasilnya sangat menggembirakan dengan temuan artefaktual yang cukup banyak yang dapat menunjukkan eksistensi Gua Debu sebagai situs hunian prasejarah. Terdapat beberapa temuan berupa serpih batu dengan berbagai ukuran, fragmen tembikar, dan fragmen tulang binatang yang menjadi bukti kuat adanya kegiatan kehidupan manusia di dalamnya. Dari sekian banyak temuan artefaktual tersebut, ada dua artefak yang sangat menarik perhatian karena mewakili dua masa yang berbeda dan cukup jauh periodisasinya. Hasil temuan secara umum memang memperlihatkan bahwa Gua Debu adalah situs hunian masa prasejarah, yang kemungkinan besar terus berlanjut sampai ke masa sejarah. Hipotesis ini berdasarkan pada temuan “alat batu masa mesolitik” yang diwakili oleh serpih bilah dan mata panah prasejarah, dengan temuan fragmen tembikar “berelief” yang berasal dari masa sejarah.





Gambar 2. Beberapa alat serpih yang ditemukan di dalam Gua Debu  
(Dok. Balai Arkeologi Kalimantan Selatan)

Mata panah ini merupakan artefak yang jarang ditemukan di wilayah Kalimantan Selatan. Mata panah dari Gua Debu mempunyai bentuk yang cukup besar dengan bekas-bekas pengerjaan yang sangat teliti. Proses pembuatan mata panah ini sangat rumit dan memerlukan ketelitian, ketekunan, dan kesabaran dari si pembuatnya. Temuan mata panah ini menjadi bukti bahwa pola perburuan binatang menjadi kegiatan utama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal yang sesuai dengan gambar yang ditemukan pada dinding gua-gua di Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan, yaitu gambar binatang dengan anak panah di bagian perut atau badannya.

Sementara itu, serpih bilah digunakan untuk memotong daging, menyerut kayu atau bambu, membuat lubang pada kain dari kulit pohon atau sebagai alat dalam pembuatan per-

hiasan dari cangkang kerang. Semua jenis kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan serpih bilah di atas, dan sesuai fungsinya ada yang digunakan sebagai serut, pisau, atau bor (lancipan). Jumlah serpih bilah yang ditemukan di Gua Debu cukup banyak, dan ini menjadi bukti intensifnya proses penyerpihan yang pernah dilakukan ribuan tahun lalu. Kegiatan ini sangat didukung oleh melimpahnya sumber batuan calon alat yang banyak terdapat di sungai-sungai kecil yang ada di sekitar Gunung Batu Sungsum.



Gambar 3. Beberapa cangkang kerang air tawar dan fragmen gerabah yang ditemukan di Gua Debu  
(Dok. Balai Arkeologi Kalimantan Selatan)





Gambar 4. Tiga artefak penting yang ditemukan di Gua Debu: (1) mata panah, (2) cawrie, perhiasan kerang yang berfungsi ganda sebagai alat tukar, dan (3) fragmen cap gerabah.  
(Dok. Balai Arkeologi Kalimantan Selatan)

Alat-alat batu yang ditemukan pada situs Gua Debu ini satu konteks dengan temuan fragmen gerabah berhias dan polos serta sisa-sisa makanan yang berupa fragmen tulang binatang dan cangkang kerang. Kuantitas temuan fragmen gerabah tidak banyak jumlahnya, tetapi temuan tersebut menunjukkan bahwa penghuni Gua Debu sudah menguasai teknik pembuatan wadah makanan dari bahan tanah liat yang dibakar dengan baik, atau mereka punya hubungan yang baik dengan kelompok manusia prasejarah lainnya yang bisa membuat wadah makanan (gerabah) tersebut. Hubungan dan komunikasi dengan kelompok lain merupakan tingkat kepandaian sosial yang penting bagi kelangsungan hidup dan berkembangnya kebudayaan pada kawasan karst Balangan pada masa lalu. Dengan wadah gerabah terse-

but, manusia penghuni Gua Debu bisa mengolah makanan dengan lebih baik dan lebih sehat.

Sementara sisa-sisa makanan yang berupa fragmen tulang dan cangkang kerang air tawar, jelas memperlihatkan bagaimana intensifnya penghuni Gua Debu dalam melakukan kegiatan perburuan binatang dan peramuhan bahan makanan alternatif yang bisa didapatkan dari lingkungan sungai dan rawa-rawa di sekitar Gua Debu. Pada masa ini, ada kemungkinan cangkang kerang air tawar, terutama dari species *thiaridae* dan *lymnaidae* menjadi pilihan atau favorit sebagai bahan makanan yang disukai ketika hasil perburuan tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, sisa-sisa cangkang kerang terlihat cukup banyak pada lapisan tanah di dalam Gua Debu (Tim Peneliti, 2016).

Unsur menarik yang ditemukan pada Gua Debu adalah fragmen gerabah yang unik, yaitu temuan dua buah fragmen gerabah yang berasal dari masa yang lebih muda dari masa prasejarah. Ada dua fragmen gerabah dari masa sejarah yang ditemukan di Gua Debu yang sangat menarik. Dua fragmen gerabah itu adalah bagian dari tablet gerabah yang biasa digunakan oleh umat Budha dalam kegiatan ritual mereka. Kepastian ini didapatkan dari pengamatan terhadap bentuk gambar atau relief yang ada



pada dua fragmen gerabah tersebut. Fragmen gerabah pertama mempunyai gambar kepala manusia yang sangat mirip dengan gambaran arca-arca budha lengkap dengan sinar kedewaan (*prabha*), dan yang kedua mempunyai relief dua buah kaki manusia dalam kondisi berdiri tegak. Fragmen gerabah berrelief Budha ini disebut dengan “amulet” yang digunakan oleh umat Budha dalam berziarah atau mengunjungi tempat-tempat yang dianggap angker atau keramat. Amulet seperti ini banyak digunakan oleh umat Budha di Thailand dan diproduksi secara massal sebagai suvenir bagi para pelancong atau wisatawan yang datang berkunjung.

Tradisi pembuatan “cap” atau meterai dari gerabah dengan relief Budha baik dalam posisi duduk atau berdiri, merupakan ajaran agama Budha dan biasanya digunakan pada saat kegiatan ziarah ke tempat-tempat suci agama Budha (Djafar, 2010: 89-91). Ferdinandus mengatakan bahwa meterai tersebut merupakan penggambaran dari Sravasti, yang berkembang pada masa agama Budha Hinayana (Ferdinandus, 1998: 187). Sementara Hariani Santiko berpendapat berbeda, penggambaran itu lebih mirip kepada tokoh Tara, seperti yang ditemukan di Candi Borobudur. Selanjutnya dikatakan bahwa tradisi

itu adalah ajaran Budha Mahayana (Santiko, 2003: 41-48). Sementara fragmen meterai yang ditemukan pada Gua Debu belum bisa dijelaskan termasuk dalam kelompok tradisi yang mana, apakah Budha Hinayana atau Budha Mahayana.

Temuan fragmen meterai gerabah ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, berkaitan dengan masa penggunaan Gua Debu pada masa lalu. Apakah temuan tersebut mencerminkan pemanfaatan situs Gua Debu yang sebenarnya, yaitu dari masa pre-neolitik sampai pada masa pengaruh agama Budha di Kalimantan Selatan? Ataukah temuan fragmen meterai gerabah ini merupakan akibat transformasi yang pernah dilakukan oleh manusia pada masa lalu? Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab karena minimnya data yang ditemukan pada kegiatan penelitian ini.





Gambar 5. Amulet yang diproduksi oleh Thailand sekarang (atas), Fragmen amulet yang ditemukan di Gua Debu (bawah) (Dok. Balai Arkeologi Kalimantan Selatan)

## V. Penutup

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa Gua Debu merupakan situs gua hunian prasejarah yang berasal dari masa “mesolitik”, yang ditandai oleh temuan alat batu berupa serpih bilah dan mata panah. Budaya prasejarah yang berkembang di Gua Debu ini diperkirakan mempunyai hubungan yang erat dengan budaya yang sama yang berkembang di Gua Babi dan Gua Tengkorak di Kabupaten Tabalong. Secara geomorfologi, kawasan Karst Balangan berada

pada bagian yang sama dengan kawasan Karst Tabalong, yaitu bagian barat dari Pegunungan Meratus. Kawasan karst bagian barat Pegunungan Meratus ini membentang dari utara selatan, mulai wilayah Kalimantan Tengah, Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Banjar dan Tanah Laut. Artinya kawasan karst yang berada di bagian ini mempunyai potensi situs gua prasejarah yang bagus dan perlu diteliti lebih lanjut. Di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Banjar, terdapat potensi situs prasejarah seperti di Gua Janggawawi dan Gua Pendalaman, serta situs paleolitik Awangbangkal (Riam Kanan).

Situs prasejarah yang ada di kawasan karst Kabupaten Balangan diyakini tidak hanya Gua Debu saja, tetapi masih banyak gua-gua lain terutama yang berada di wilayah Kecamatan Halong yang belum diketahui. Pekerjaan ini merupakan bagian kecil dari pekerjaan besar yaitu mengungkapkan manusia dan budaya prasejarah yang pernah berkembang di Pegunungan Meratus Kalimantan Selatan pada masa lalu.



## Daftar Pustaka

- Anonim. 2014. Kabupaten Balangan Dalam Angka. Paringin: BPS Kabupaten Balangan.
- Anonim. 2016. Kalimantan Selatan Dalam Angka. Banjarmasin: BPS Provinsi Kalimantan Selatan.
- Djafar, Hasan. 2010. Kompleks Percandian Batujaya: Rekonstruksi Sejarah Kebudayaan daerah Pantai Utara Jawa Barat. Bandung: Penerbit Kiblat Buku Utama.
- Ferdinandus, P.E.J. 1998. "Meterai-meterai Tanah Liat dari Situs Blandongan" dalam Dinamika Budaya Asia Tenggara-Pasifik dalam Perjalanan Sejarah. Tony Djubiantono (eds.). Bandung: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia. Hlm 185-190.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1993. Sejarah Nasional Indonesia Jilid 1. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Santiko, Hariani. 2003. "Perkembangan Awal Agama-agama di Indonesia" dalam Katalog Pameran: Fajar Masa Sejarah Indonesia. Endang Srihadiati (Eds.). Jakarta: Proyek Pengembangan Museum Nasional. Hlm 41-48.
- Tim Peneliti Balai Arkeologi Banjarmasin. 2013. Inventarisasi Situs-situs Budaya di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Balangan: Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
- 
- . 2014. Verifikasi Situs-situs Sejarah Budaya di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Balangan: Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. 2014.
- 
- . 2015. Studi Potensi Arkeologi Prasejarah di Kabupaten Balangan, Kalimantan Tengah. Balangan: Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
- Widianto, Harry dan Retno Handini. 2003. "Karakter Budaya Prasejarah di Kawasan Gunung Batubuli, Kalimantan Selatan: Mekanisme Hunian Gua Pasca-Pleistosen" dalam Berita Penelitian Arkeologi No. 12. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Wasita, Hartatik, dan Gunadi. 2004. Penelitian Eksplorasi Kawasan Karst di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Laporan Penelitian Arkeologi. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin, belum diterbitkan.



## Tinjauan Kesejarahan Situs Candi Negeri Baru

Oleh : Imam Hindarto

### Abstrak

Kebudayaan Hindu-Buddha di Kalimantan berkembang di daerah pesisir bagian Barat Daya. Keberadaan dari budaya tersebut dibuktikan dengan penemuan Situs Candi Negeri Baru. Penelitian arkeologi di situs ini telah berhasil menampakkan tiga buah struktur candi dan beragam tinggalan artefaktual lainnya. Kendati demikian, kesejarahan dari situs ini belum mendapat perhatian dari para peneliti. Artikel ini berusaha meninjau kesejarahan Situs Candi Negeri Baru dengan pendekatan sejarah kawasan. Hasil analisis kesejarahan menunjukkan bahwa Situs Candi Negeri Baru mempunyai keterkaitan dengan keberadaan Tanjungpura.

Kata Kunci : *Situs Candi Negeri Baru, Kesejarahan, Tanjungpura*

### A. Pendahuluan

Tinggalan monumental dari masa perkembangan budaya Hindu-Buddha telah ditemukan di pesisir Kalimantan bagian barat daya. Artefak arkeologi ini berupa struktur bangunan dari bahan batu bata yang mempunyai bentuk arsitektur bangunan suci keagamaan. Dalam penyebutan selanjutnya, struktur bangunan tersebut disebut sebagai Candi Negeri Baru. Istilah *candi* biasanya dipakai pada bangunan suci sisa-sisa sarana ritual agama Hindu-Buddha. Istilah ini lazim dijumpai di Indonesia, sedangkan di India Selatan disebut *kōil*, di Kamboja disebut *prasat* perubahan dari *prāsāda* (Ramelan, 2013: 1). Dalam dinamika diskusi, para arkeolog masih sering memperdebatkan istilah candi. Kendati demikian, dalam artikel ini istilah candi digunakan untuk menyebut semua bangunan

peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha baik berupa pemandian kuno, gapura maupun bangunan suci keagamaan (Ayatrohaedi, 1981:19-20).

Candi Negeri Baru merupakan satu-satunya struktur bangunan dari masa perkembangan budaya Hindu-Buddha yang telah ditemukan di wilayah ini. Lokasi candi berada di Desa Negeri Baru, Kecamatan Banua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Tinggalan dengan karakter budaya yang sama lainnya hanya ditemukan dalam bentuk artefaktual. Salah satu bentuk tinggalan budaya tersebut adalah lingga dari batu yang ditemukan di Hulu Sungai Pawan. Pada sisi-sisi bagian *Brahma Bhaga* lingga terdapat relief yang kemungkinan inskripsi. Pada wilayah lain di Kalimantan bagian Barat Daya (khususnya di Pulau Maya) ditemukan pula relief stupa Buddha pada se-



bongkah batu dan fragmen arca. Kendati demikian, fragmen arca tersebut sudah hilang akibat penjarahan barang antik oleh penduduk sekitar.

Penelitian arkeologi di Situs Candi Negeri Baru telah dilakukan beberapa tahap. Penelitian pertama dilakukan tahun 1994 oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Hasil dari penelitian ini berupa keragaman data di daerah Benua Lama yang terdiri atas makam Islam dengan tahun *çaka*, sebaran fragmen keramik, dan bata. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Balai Arkeologi Banjarmasin pada tahun 2007. Pada penelitian kali ini dilakukan tes pit di sekitar konsentrasi batu bata di Desa Negeri Baru. Penelitian ini menunjukkan adanya kemungkinan berkembangnya karakter budaya Hinddu-Buddha di wilayah tersebut. Ekskavasi yang lebih intensif di sekitar konsentrasi bata dilakukan pada tahun 2010-2011. Berdasarkan hasil ekskavasi diketahui bahwa terdapat struktur bata yang diindikasikan sebagai bangunan keagamaan (Atmojo, 2014: 64).

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya masih bersifat eksplorasi dan deskriptif. Hasil dalam penelitian-penelitian tersebut belum menunjukkan adanya kerangka kesejarahan yang jelas. Hal ini pula yang menjadi tujuan daripada penulisan artikel ini untuk menjelaskan kesejarahan dari Situs Candi Negeri Baru. Sumber data dalam penulisan ini diperoleh dari pustaka-pustaka yang menjelaskan keberadaan Situs Candi Negeri Baru dan sejarah ka-

wasan Kaliaantan bagian Barat Daya.

Kerangka analisis menggunakan pendekatan sejarah yang melibatkan unsur-unsur sejarah baik intrinsik maupun ekstrinsik (Ratna, 2010: 362-363). Kendati demikian, penulisan ini hanya menekankan unsur intrinsik dengan memahami isi teks sumber sejarah. Pendekatan kesejarahan ini akan mengedepankan sejarah kawasan khususnya Kalimantan bagian Barat Daya. Selain itu, implikasi kesejarahan sejarah Tanjungpura akan menjadi acuan dalam analisis.

## **B. Kondisi Lingkungan dan Situs Candi Negeri Baru**

Secara geografis, situs Candi Negeri Baru berada di persimpangan Sungai Pawan. Mulai dari hulu, Sungai Pawan mengalir ke arah hilir dan tepat di Desa Negeri Baru aliran tersebut bercabang dua. Cabang pertama mengarah ke arah utara kemudian berkelok-kelok dan bermuara di Selat Karimata. Sedangkan, cabang kedua mengarah ke barat menghubungkan lokasi Situs Candi Negeri Baru dengan Makam Keramat Sembilan dan Keraton Matan Tanjungpura. Cabang kedua ini juga berkelok-kelok yang berakhir di Selat Karimata.

Situs Candi Negeri Baru menempati tepi sisi barat dari Sungai Pawan. Jarak antara dinding struktur bata candi terluar (sisi timur laut) de-



ngan tepi Sungai Pawan kurang lebih 80 meter. Kedekatan jarak tersebut mengakibatkan bagian pondasi dari struktur candi selalu basah akibat rembesan air. Bahkan, pada musim penghujan bagian dasar tersebut sering terendam oleh air.

Kondisi geologis dari situs candi ini berupa kawasan hasil pengendapan yang berlapis-lapis. Hasil analisis stratigrafi dari beberapa kotak ekskavasi menunjukkan bahwa di area situs terdapat empat lapisan stratigrafi. Keempat lapisan tersebut telah mengalami transformasi pengendapan dalam tiga *facies*. Berdasarkan hal tersebut terdapat kemungkinan lokasi situs semula berada di sekitar pantai (*upper shoreface*). Akibat penurunan permukaan air laut, kondisi sekarang lokasi situs berada di daerah estuari dan berjarak kurang lebih 20 kilometer dari tepi pantai (Cahyaningtyas, 2013: 42).

Selama beberapa tahun, situs Candi Negeri Baru telah mengalami beberapa kali transformasi budaya. Pertama, berupa penjarahan bata candi yang digunakan kembali oleh masyarakat setempat untuk bahan bangunan. Kedua, pencarian barang antik berupa keramik yang diperjualbelikan dalam ukuran berat. Ketiga, areal situs dijadikan tempat penimbunan kayu. Selanjutnya, pernah terdapat jalur transportasi pengang-

kutan kayu yang melintasi area situs. Keempat kondisi tersebut di atas telah menjadikan Situs Candi Negeri Baru mengalami kerusakan parah.

Berdasarkan hasil ekskavasi tahun 2010-2011 telah diketahui bahwa terdapat tiga struktur bata. Pada awalnya hanya ditemukan sebuah struktur yang kemudian diberi nama struktur candi 1. Struktur candi 2 dan 3 ditemukan berurutan di sebelah tenggara struktur 1. Dalam penampang peta situasi tampak bahwa ketiga struktur candi tersebut berjajar dengan arah timur laut-tenggara. Masing masing struktur candi mempunyai bagian penampil sebagai pintu masuk di arah barat daya.

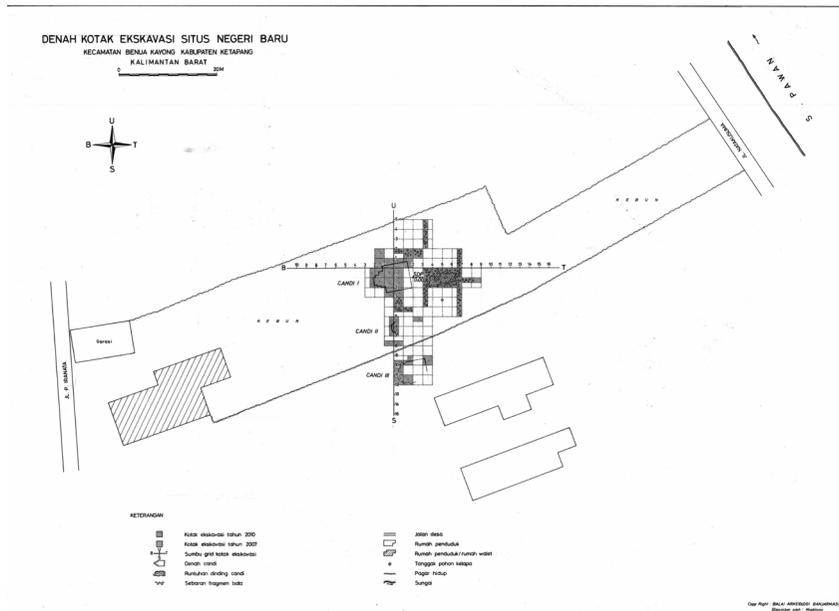
Struktur candi 1 merupakan struktur candi yang paling besar di antara kedua struktur candi lainnya. Ukuran bagian utama (*garbha grha*) dari struktur candi ini 5,3 x 5,4 meter. Pada bagian tengahnya terdapat sumuran candi dengan ukuran kurang lebih 0,5 x 0,5 meter. Bagian penampil mempunyai 4 sudut dengan semakin ke depan bagian penampil semakin mengecil (Atmodjo, 2014: 63). Berdasarkan konstruksi pemasangan bata bagian penampil menunjukkan bagian ini terpisah dengan struktur bagian utama. Hal ini diketahui dari tidak adanya saling keterkaitan dalam konstruksi pemasangan bata bagian penampil dengan struktur utama.



Secara keseluruhan, struktur candi 1 hanya terdiri atas bagian kaki dari arsitektur candi. Kendati demikian, belum dapat diketahui dengan pasti penggunaan pondasi secara khusus atau kaki tersebut berfungsi pula sebagai pondasi.

candi 3 berukuran 4,7 x 4,6 meter (Atmodjo, 2014: 63).

Temuan artefaktual lainnya yang didapatkan selama penelitian terdiri atas fragmen tembikar, keramik, dan pipisan. Fragmen tembikar mempunyai morfo-teknologi yang beragam.



Gambar 1.  
Denah Kotak Ekskavasi Situs Negeri Baru

Struktur candi 2 dan 3 secara berurutan berada di sebelah timur laut dari struktur candi satu. Jarak antara masing-masing struktur candi kurang lebih 5 meter. Kedua struktur ini hanya tersisa kurang lebih 1 sampai 7 lapis bata. Namun, secara keseluruhan bentuk dari keduanya masih dapat diinterpretasikan melalui gambar denah candi. Ukuran bagian utama dari struktur candi 2 mencapai 4,8 x 4,7 meter. Sedangkan, struktur

Berdasarkan ketebalannya, terdapat fragmen tembikar dengan ketebalan sampai 1 mm sampai 1,2 cm. Bentuk tembikar cukup bervariasi mulai dari piring, mangkuk, kendi, sampai tempayan. Fragmen keramik yang ditemukan selama penelitian mempunyai kronologi mulai dari abad XIII - XVI Masehi. Fragmen keramik di mempunyai bentuk mulai dari buli-buli, mangkuk, piring, dan tempayan (Atmodjo, 2014: 58-61). Fragmen pi-



pipisan yang ditemukan selama penelitian merupakan hasil temuan permukaan. Fragmen pipisan berbahan batu andesit. Selain fragmen pipisan, juga ditemukan batu gandik berbentuk silindris sebagai pasangan dari pipisan.

dengan Sorodokan dikeluarkan pada tahun 1474 M. Catatan Tomè Pires dalam Suma Oriental ditulis lebih belakangan pada tahun 1512-1515 M (Cortesao, 2015: xix). Sedangkan, Pararaton yang menceritakan silsilah raja-raja mulai dari Singosari hingga



Gambar 2.  
Struktur Candi 1

### C. Tinjauan Umum Kesejarahan Tanjungpura

Tanjungpura disebut dalam beberapa karya tekstual antara lain Negarakrtagama, prasasti Waringin Pitu, catatan Tomè Pires dalam Suma Oriental. Karya tekstual tersebut mempunyai kronologi yang beragam. Negarakrtagama ditulis oleh Mpu Prapanca pada tahun 1365 M. Prasasti Waringin Pitu atau sering disebut pula

Majapahit telah disalin beberapa kali. Salah satu korpus naskah Pararaton yang menjadi koleksi Perpustakaan Nasional RI menyebutkan tahun penyalinan 1600 M dan 1613 M (Kriswanto, 2009: 3-5).

Dalam tradisi tekstual Majapahit, Negarakrtagama atau kekawin Desa Warnana menjadi rujukan para sejarawan untuk memahami peristiwa sejarah pada abad ke-14 M. Naskah



ini menceritakan tentang kondisi Kerajaan Majapahit pada era pemerintahan Hayam Wuruk. Selain bercerita tentang perjalanan Hayam Wuruk ke beberapa daerah di kawasan timur Pulau Jawa, Prapanca juga memberikan gambaran tentang daerah vasal dari Majapahit. Disebutkan dalam wihara 14 sebagai berikut:

*Kadhangdhangani landha len ri samedhang tirem tan kasah ri sedhu buruneng ri kalka saludhung ri solot pasir, baritwi sawaku muwah ri tabalung tanjung kute, lawan ri malano maka pramuka tang ri tanjung puri.*

Terjemahan:

Kadangdangan, Landa, Samedang, dan Tirem tak terlupakan Sedu Bruneng (Brunai) Kalka, Saludung, Solot, dan Pasir, Barito, Sawaku, serta Tabalung, dan Tanjung Kutai, serta Malano yang terkemuka di Tanjungpura (Riana, 2009: 98).

Beberapa pengkaji teks Negerakrtagama ini membaca Tanjung Puri sebagai Tanjungpura. Penyebutan Tanjungpuri dalam teks tersebut di atas tampaknya perlu kecermatan dalam analisis. Penamaan Tanjungpuri berbeda dengan Tanjungpura begitu pula dengan Tanjungnegara, meskipun maknanya hampir sama. Kendati demikian, tempat yang disebutkan dalam teks tersebut oleh beberapa ahli sejarah ditempatkan di

Pulau Kalimantan (Cf. Djafar, 2009: 161). Pada uraian berikutnya, cukup jelas gambaran keletakkan Tanjungpura yang disampaikan Tomè Pires. Dalam catatan kaki untuk analisis, Armando Cortesao yang mendasarkan pada peta tahun 1540, 1554, dan terakhir peta dari Berthelot tahun 1635, semua menempatkan Tanjungpura di pantai selatan Borneo (Cortesao, 2015: 308).

Penyebutan “Tanjungpura” dalam catatan Tome Pires seperti yang sudah disusun ulang oleh Armando Cortesao setidaknya sampai 11 kali penyebutan. Masing-masing penyebutan dikaitkan dengan hubungan kerajaan ini dengan kerajaan lainnya maupun kesejarahan dan sumber daya dari Kerajaan Tanjungpura. Salah satu sub bab telah dipaparkan oleh Armando Cortesao seorang ahli geografi tentang Tanjungpura.:

“Pulau” Tanjungpura merupakan sebuah “pulau” yang bisa dicapai melalui Malaka dalam waktu lima belas hari pada waktu musim hujan. Orang-orang menuju tempat ini melalui terusan Singapura, Menuju (terusan) Kampar; kemudian melalui jalur di dekat Lingga yang terletak di antara Kepulauan Lingga dan Monoby. Penduduk pulau ini beragama pagan, dan nyaris seluruhnya merupakan wilayah taklukkan Pate Unus, penguasa Jepara. Pulau ini memiliki seorang gubernur *pate* yang juga merupakan penguasa pulau tersebut. Pulau ini luasnya 15 *league*. Di



sini terdapat banyak emas, beras, dan bahan-bahan makanan lain, berlian, jung *pangajava*, dan banyak penduduk (Cortesa, 2015: 308-309).

Kondisi sosial-politik di Majapahit termasuk Tajung Pura telah disinggung dalam prasasti Waringin Pitu. Prasasti ini dikeluarkan oleh Wijayaparakramawardhana dengan menerangkan penetapan daerah Waringin Pitu sebagai perdikan dharma yang bernama Rajakusumapura. Selain itu, dalam prasasti ini juga dijelaskan kondisi politik dan susunan pemerintahan di Majapahit pada masa Raja Wijayaparakramawardhana. Disebutkan pula bahwa wilayah Tanjungpura dipimpin oleh seorang yang bernama Dyah Suragharini (Djafar, 2009: 9-11 dan 161).

Selaras dengan teks prasasti Waringin Pitu, Pararaton juga menerangkan tentang Tanjungpura. Dalam Pararaton termaktub Sumpah Palapa dari Gajah Mada:

*Tan ayun amuktiha phalapa sira Gajah Mada. Lamun uwus kalah nusantara ing sun amuktialapa. Lamun alah ring Gurun, ring Seran, Tanjungpura, ring Aru, ring Pahang, Dampo, ring Bali, Sundha, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa.*

Terjemahan:

Gajah Mada tidak hendak menikmati ke-

enangan. “Jika sudah kalah nusantara, aku akan menikmati kesenangan. Jika sudah kalah Gurun, Seran, Tanjungpura, Aru, Pahang, Dampo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, setelah itu aku akan menikmati kesenangan.” (Kriswanto, 2009: 106-107).

Teks Pararaton juga menerangkan silsilah dari penguasa Tanjungpura yang dimulai dari Tumapel. Berikut uraian dari teks Pararaton:

*Bhre Tumapel aputra jalu nejneng ing Wengker, angambil I Bhre Matahun. Aputra manih Bhre Paguhan. Putra lan rabi anom, Bhre Jagaraga kambil denira Bhra Prameswara, tan aputra. anih Bhre Tanjungpura kalap denira Bhre Paguhan, tan aputra. Manih Bhre Pajang kalap denira Bre Pajang kalap denira Bhre Paguhan kalap dho tan aputra.*

Terjemahan:

Bre Tumapel mempunyai putra laki-laki, bertakhta di Wengker, dan menikahi Bre Metahun; berputra lagi Bre Peguhan; berputra dengan istri muda, yaitu Bre Jagaraga, yang dinikahi oleh Prameswara, tidak mempunyai putra; Berputra lagi Bre Tanjungpura, yang dinikahi oleh Bre Paguhan, tidak mempunyai putra; berputra lagi Bre Pajang yang dinikahi oleh Bre Paguhan sebagai istri kedua, tidak mempunyai putra (Kriswanto, 2009: 112-113).

Keberadaan Kerajaan Tanjungpura kemungkinan sudah ada sebe-



lum Negarakrtagama ditulis oleh Prapanca pada tahun 1365 M. Apabila kerajaan ini belum ada maka kemungkinan Prapanca tidak akan menyebutkannya sebagai vasal dari Majapahit. Bahkan, Gajah Mada juga tidak akan menyebutkan dalam Sumpah Palapa. Sekarang ini, Tanjungpura masih digunakan untuk menyebut nama tempat di daerah hulu Sungai Pawan. Dalam sejarah lokal masyarakat setempat menyebutkan bahwa daerah tersebut merupakan bekas dari pusat pemerintahan. Artefak arkeologi juga ditemukan di daerah ini, terutama dalam bentuk nisan-nisan dalam kompleks makam raja. Berdasarkan hal tersebut dapat diperkirakan bahwa kesejarahan dari Tanjungpura tidak berhenti setelah Kerajaan Majapahit runtuh. Perubahan budaya yang cukup besar pada akhir abad XV M turut mempengaruhi sistem budaya masyarakat di Tanjungpura.

#### **D. Hubungan Kesejarahan Tanjungpura dengan Situs Candi Negeri Baru**

Pembahasan kesejarahan dari Situs Candi Negeri Baru tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kawasan Barat Daya Kalimantan. Kesejarahan kawasan ini oleh beberapa pakar sejarah dihubungkan dengan keberadaan Kerajaan Tanjungpura.

Bahkan, masyarakat di sekitar Situs Candi Negeri Baru masih mempercayai adanya hubungan antara daerah ini dengan Majapahit. Dalam pandangan masyarakat tersebut berkembang mitologi tentang tokoh Prabu Jaya. Konon, tokoh ini berasal dari Kerajaan Majapahit yang mendirikan kerajaan di muara Sungai Pawan tepatnya di daerah Kandang Kerbau. Mitos keberadaan Prabu Jaya erat kaitannya dengan cikal bakal Kerajaan Tanjungpura (Lontaan, 1975: 78-83).

Data arkeologi yang mengkaitkan wilayah ini dengan Majapahit adalah adanya temuan batu nisan dengan inskripsi Jawa Kuno dan bertahun *çaka*. Batu nisan tersebut bertipe Demak-Toloyo dan ditemukan di Kompleks Makam Keramat Tujuh dan Sembilan. Keletakkan dari kedua kompleks makan tersebut mengaitkan situs Candi Negeri Baru. Kompleks Makam Keramat Tujuh berada di hulu Sungai Pawan dan di bagian hilir terdapat Kompleks Makam Keramat Sembilan. Pembacaan inskripsi pada nisan tersebut berupa angka tahun 1441 M dan 1428 M. Baik kronologi maupun gaya dari batu nisan yang ditemukan di kedua kompleks makam tersebut juga memperkuat dugaan keterkaitan antara daerah Negeri Baru dan sekitarnya dengan



keberadaan Kerajaan Tanjungpura yang merupakan vasal dari Majapahit (Cf Atmojo, 2013: 111-113).

Tanjungpura sebagai vasal dari Majapahit sedikit banyak akan mempunyai kesamaan dalam tradisi budaya yang berkembang di Majapahit. Hal ini diperkuat lagi dalam hubungannya dengan garis keturunan antara raja Tanjungpura dengan raja-raja Singosari maupun Majapahit. Salah satu bentuk tradisi budaya yang berpengaruh besar adalah dalam aspek sosial-politik maupun keagamaan. Kedua aspek tersebut sangat dipengaruhi oleh tradisi keagamaan Hindu-Buddha.

Secara umum, data sejarah yang menerangkan hubungan kedua kerajaan tersebut sangat kurang. Terutama dalam penggambaran kondisi sosial-politik dan keagamaan. Kendati demikian, penemuan struktur candi di Desa Negeri Baru dapat mengarahkan pemahaman pada hal tersebut. Pada masa Singosari dan Majapahit, bangunan candi erat kaitannya dengan tempat *pedharmaan* atau 'pemuliaan' tokoh yang telah meninggal. Disebutkan dalam Pararaton beberapa raja yang telah meninggal diharmakan di sebuah tempat. Di tempat itu pula akan didirikan bangunan candi sebagai tempat *pedharmaan* atau pemuliaan bagi raja yang

meninggal, seperti Candi Tegawangi sebagai tempat pedharmaan *Bhre* Matahun (Kriswanto, 2009 : 114-122 ; Munandar, 2011 :138-139).

Apabila merujuk pada tradisi budaya yang berkembang pada masa Majapahit maka terdapat kemungkinan Candi Negeri Baru berfungsi sebagai tempat *pedharmaan* seorang tokoh. Namun, sampai hari ini belum didapatkan keterangan tekstual yang dapat menceritakan hal tersebut. Terkait dengan tokoh yang diharmakan terdapat kemungkinan raja yang pernah memerintah di Tanjungpura. Berdasarkan uraian Pararaton bahwa yang memerintah di Tanjungpura adalah *Bhre* Tanjungpura atau Dyah Suragharini. Disebutkan pula bahwa raja ini tidak mempunyai anak. Sehingga, memunculkan permasalahan siapa yang melakukan upacara *srad-dha* dan mendirikan candi tersebut. Dapat pula diasumsikan bahwa candi tersebut dibangun oleh *Bhre* Tanjungpura untuk memuliakan ayahnya yang bernama *Bhre* Tumapel atau Wijayaparakramawarddhana. Permasalahan-permasalahan tersebut masih berpeluang untuk dilakukan analisis dan interpretasi. Data baru dan kecermatan analisis sangat diperlukan untuk mendukung interpretasi tentang kesejarahan dari Situs Candi Negeri Baru.



## E. Penutup

Kajian kesejarahan dari situs Candi Negeri Baru masih jarang dilakukan oleh para peneliti. Hal ini dikarenakan beberapa kendala terutama kurangnya data yang mendukung interpretasi terutama keberadaan data tekstual. Kendati demikian, kesejarahan tersebut dapat dilihat secara luas dalam cakupan sejarah kawasan khususnya Kalimantan bagian Barat Daya. Melalui pemahaman akan sumber-sumber tesktual sedikit banyak akan didapatkan pemahaman akan kesejarahan lokal yang terkait dengan keberadaan Situs Candi Negeri Baru.

Berdasarkan analisis tersebut maka terdapat kemungkinan bahwa situs ini mempunyai keterkaitan dengan keberadaan Kerajaan Tanjungpura. Kerajaan ini disebut dalam sumber literatur Majapahit terutama *Negarakrtagama*, *Prasasti Waringin Pitu*, dan *Pararaton*. Dalam sumber literatur tersebut disebutkan bahwa terdapat hubungan kekerabatan antara penguasa di Tanjungpura dengan Majapahit. Sumber lainnya berasal dari catatan perjalanan Tome Pires yang menerangkan dengan cukup detail keletakkan dan kebiasaan penduduk di Tanjungpura.

Kronologi perkembangan budaya situs ini berkisar pada abad XIII hingga akhir abad XV M. Pada

perkembangan berikutnya, kawasan ini disebut dalam beberapa sumber sejarah dengan Matan. Merujuk pada perkembangan budaya di Majapahit terdapat kemungkinan candi ini berfungsi sebagai *pedharmaan* seorang tokoh. Kurangnya data tekstual menjadi kendala untuk menjawab tokoh yang didharmakan di candi tersebut.



## Daftar Pustaka

- Atmojo, Bambang Sakti Wiku. 2013. "Makam-Makam dan Candi di Negeri Baru dalam Perkembangan Sejarah Budaya di Kabupaten Ketapang" dalam *Naditira Widya Vol 7 No.2*. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin. Hlm 107-115.
- \_\_\_\_\_. 2014. "Penelitian Situs Bangunan Bata Negeri Baru, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat" dalam *Berita Penelitian Arkeologi Vol 8 Tahun 2014*. Banjarbaru: Balai Arkeologi Kalimantan Selatan. Hlm 1-72.
- Cortesao, Armando. 2015. *Suma Oriental Karya Tome Pires: Perjalanan dari Laut Merah ke Cina dan Buku Francisco Rodrigues*. Yogyakarta: Ombak.
- Djafar, Hasan. 2009. *Masa Akhir Majapahit Girindrawarddhana dan Masalahnya*. Depok: Komunitas Bambu.
- Kriswanto, Agung. 2009. *Pararaton Alih Aksara dan Terjemahan*. Jakarta: We-datama Widya Sastra.
- Lontaan, J.U. 1975. *Sejarah-Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan-Barat*. Pontianak: Pemda Tk I Kalimantan Barat.
- Munandar, Agus Aris. 2011. *Catuspatha Arkeologi Majapahit*. Jakarta: We-datama Widya Sastra.
- Ramelan, Wiwin Djuwita Sudjana (editor). 2013. *Candi Indonesia Seri Jawa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Ratna, I Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riana, I Ketut. 2009. *Kakawin Desa Warnnana Utawi Nagara Krtagama Masa Keemasan Majapahit*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.



## TEMUAN SITUS-SITUS PENGUBURAN DI DESA MERASA, KECAMATAN KELAY, KABUPATEN BERAU KALIMANTAN TIMUR

Oleh : Andika Arief Drajat Priyatno

### Abstrak

Temuan situs-situs penguburan di Desa Merasa, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, menarik untuk ditangani lebih lanjut. Apalagi situs-situs tersebut letaknya tidak terlalu jauh dari pemukiman dan perkebunan penduduk. Tingkat keterancaman pun mulai rawan dengan adanya kasus penjarahan yang terjadi pada salah satu situs penguburan yang masih terjaga kelestariannya. Mencari harta karun peninggalan jaman dulu dijadikan sebagai alasan, untuk membongkar makam-makam kuno suku Dayak, atau biasa disebut dengan lungun, yang kaya akan tinggalan bekal kuburnya. Upaya pelestarian pun mulai dilakukan oleh masyarakat desa yang peduli dengan tinggalan nenek moyangnya tersebut.

Kata Kunci: *situs penguburan, lungun, pelestarian*

### PENDAHULUAN

Kegiatan pelestarian Cagar Budaya merupakan kegiatan berkelanjutan dan untuk kesejahteraan rakyat sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Kegiatan pelestarian yang dimaksud tidak hanya mengacu pada Cagar Budaya saja tetapi juga bagaimana implementasinya kepada masyarakat.

Salah satu fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar

Budaya adalah penanganan kasus mengenai Cagar Budaya. Penanganan kasus Cagar Budaya merupakan sebuah tindakan penyelamatan awal terhadap Benda Cagar Budaya atau yang diduga Benda Cagar Budaya, dari keterancaman maupun kerusakan yang berasal dari faktor alam maupun faktor manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, juga menyebutkan tentang penyelamatan dan pengamanan Cagar Budaya. Dalam Pasal 57 menyebutkan bahwa:

*“Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan*



*darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan”*

Selain itu dalam Pasal 61 disebutkan juga:

*“Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah”*

Berdasarkan surat informasi yang dikirimkan oleh ECOTrip pada November 2016 mengenai temuan dugaan benda Cagar Budaya yang berlokasi di Desa Merasa, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, menyebutkan tentang penemuan sejumlah peti kubur kayu (*lungun*) yang tersebar di beberapa gua di sepanjang aliran Sungai Kelay. Berita tentang penemuan ini kemudian dimuat dalam surat kabar Kaltim Post edisi hari Senin, 9 Januari 2017. Selain temuan *lungun*, disebutkan pula temuan beberapa artefak lain berupa manik-manik, gerabah, wadah keramik, serta ornamen suku Dayak. Namun kini, beberapa diantaranya mulai dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Peninjauan situs-situs pengu-buran ini perlu dilakukan untuk menindaklanjuti berita yang dimuat oleh surat kabar bahwa beberapa barang yang terdapat dalam peti kubur tersebut ada yang hilang karena diambil/dijarah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, ke-

giatan ini juga diharapkan dapat menjadi sebuah langkah awal untuk menindaklanjuti temuan benda yang diduga sebagai Cagar Budaya serta penanganan kasus yang ada pada situs tersebut.

## GAMBARAN UMUM

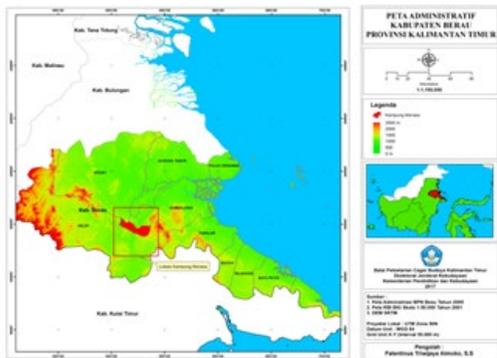
### A. KABUPATEN BERAU

Kabupaten Berau dengan ibu-kota Tanjung Redeb merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kotamadya di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Berau terletak di sebelah utara Kota Samarinda dengan posisi astronomis antara 116° BT- 119° BT dan 1° LU - 2°30” LU atau UTM 50 N X 112814 - 287725 N dan Y 408682 - 720998 E. Secara administratif, Kabupaten Berau terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan dan 110 Kelurahan/Desa, dengan luas wilayah keseluruhan sebesar 34.127 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari daratan seluas 21.951,71 Km<sup>2</sup> dan lautan 11.962,42 Km<sup>2</sup> (BPS Berau, 2014). Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah seluruh penduduk Kabupaten Berau adalah 253.904 jiwa, terdiri dari 137.938 laki-laki dan 115.966 perempuan dengan pertumbuhan penduduk sebesar 29% (tahun 2010).

Topografi daratan wilayah Kabupaten Berau secara umum didominasi oleh bentukan gugusan bukit serta hutan sehingga sebagian besar



wilayah tidak dihuni oleh penduduk. Oleh sebab itu, rata-rata tiap daerah kecamatan memiliki wilayah administrasi yang cukup luas. Topografi tersebut menyimpan potensi yang kemudian dapat dikembangkan menjadi peluang usaha. Komoditas unggulan Kabupaten Berau adalah di sektor Pariwisata, Perikanan, Perkebunan, Pertambangan, dan Jasa.

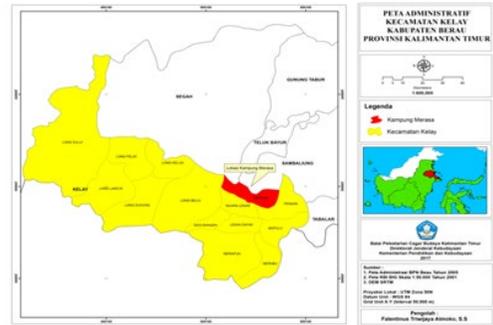


Peta 1. Wilayah Administratif Kabupaten Berau

## B. KECAMATAN KELAY

Kecamatan Kelay merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Berau dengan ibukota kecamatan di Sido Bangen. Secara astronomis Kecamatan Kelay terletak diantara 1.48° LU - 1.98° LU dan 116.53° BT - 117°30. Wilayah Kecamatan Kelay terdiri dari sebagian besar daratan dan sebagian kecil perairan dengan total luas wilayah 6.134,60 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Kelay terdiri dari 14 desa/kampung yaitu; Merapun, Merabu, Mapulu, Pana'an, Merasa, Muara

Lesan, Lesan Dayak, Sido Bangen, Long Beliu, Long Duhung, Long Keluh, Long Pelay, Long Lamcin, dan Long Sului.



Peta 2. Wilayah administratif Kecamatan Kelay

## C. DESA MERASA

Desa Merasa dengan luas wilayah ± 345,99 Km<sup>2</sup> terletak di bagian utara Kecamatan Kelay. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau tahun 2014, Penduduk Desa Merasa dengan jumlah penduduk 943 jiwa atau 240 kepala keluarga (KK) dengan perbandingan 495 jiwa laki-laki dan 448 jiwa perempuan serta kepadatan penduduk sebesar 2,74 jiwa/km. Desa Merasa dipimpin oleh seorang Kepala Desa serta dibantu oleh Sekretaris Desa. Dari data wawancara dengan Kepala Adat, Desa Merasa dihuni oleh Suku Dayak Kenyah, dengan mayoritas beragama Kristen Protestan. Desa Merasa terdiri dari 5 (lima) RT, namun RT 4 terletak terpisah di seberang Desa Merasa dan dihubungkan de-



ngan jembatan gantung sepanjang  $\pm$  150 meter.

Secara sosial ekonomi, kehidupan masyarakat Desa Merasa berdasarkan data di lapangan sangat tergantung dari hasil hutan dan kebun serta memanfaatkan ladang yang ditanami palawija. Hasil hutan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat Desa Merasa adalah kayu, rotan, sayuran, ikan, kayu bakar, buah-buahan, madu, walet serta mamalia berupa kijang, babi dan rusa (*payau*). Selain hasil hutan, masyarakat merasa memanfaatkan kawasan APL (Alokasi Penggunaan Lain) untuk ditanami kelapa, durian, cabai, sayuran lain, kakao, jagung, pisang, timun, labu dan padi. Masyarakat Desa merasa juga berternak berbagai jenis hewan seperti sapi, kerbau, kambing, babi, dan ayam.

## PEMBAHASAN

### A. HASIL PENINJAUAN LAPANGAN

Berdasarkan hasil peninjauan yang dilaksanakan oleh tim Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur, bersama dengan tim dari ECOTrip yang merupakan sebuah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bergerak di bidang pariwisata Desa Merasa, selama empat hari kegiatan berhasil mendata 9 (sembilan) temuan situs-situs penguburan di wilayah ini.

Semua lokasi temuan situs-situs penguburan tersebut terletak di gua dan ceruk batuan karst yang berada di sepanjang aliran Sungai Kelay. Lokasinya dapat ditempuh dengan menggunakan perahu/ketinting dari Desa Merasa, menuju ke arah hulu Sungai Kelay.

### 1. Situs Lungun 1

Temuan Lungun 1 terletak di kawasan Batu Lukok, dengan jarak tempuh selama kurang lebih 10 menit perjalanan dari desa menggunakan *ketinting*. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki menyusuri tebing karst selama  $\pm$  10 menit. Dalam istilah penduduk lokal, *lukok* berarti rokok, karena dahulu banyak ditemukan rokok yang kemungkinan sisa-sisa bekal kubur. Lokasi Lungun 1 ini berada pada koordinat UTM 50N X 524998 dan Y 199462 dengan ketinggian 65 mdpl. Kondisi kelerengannya cukup landai hanya sekali melewati sebuah patahan karst dengan tinggi sekitar 3 meter.

Terdapat temuan dua kubur kayu atau lungun dengan sebuah peti kayu besar yang memuat kedua lungun tersebut. Posisinya terletak pada sebuah ceruk kecil pada sisi tebing Batu Lukok. Pada saat ditemukan, kondisinya masih terdapat bekas-bekas penguburan manusia, namun hanya tersisa sedikit sekali tulang



manusia dan bekal kuburnya. Peti lungun sudah dalam kondisi terbuka dan tidak dijumpai lagi tutupnya. Di dalam kedua peti kubur kayu tersebut ditemukan sisa-sisa peralatan besi seperti parang/mandau, ujung tombak, dan panci masak yang sudah mengalami korosi serta sisa dayung yang telah hancur pada bagian ujungnya. Sebaran manik-manik ditemukan pada bagian dalam lungun dan pada bagian tanah di bawah wadah lungun. Kemungkinan pada masa lalu telah terjadi penjarahan terhadap kubur ini, namun tidak diketahui kapan dan oleh siapa, mengingat lokasinya yang tidak terlalu jauh dari desa serta akses yang mudah dijangkau.



Foto 1-2. Temuan Situs Lungun 1

Wadah lungun yang memuat dua peti kubur lungun berbentuk persegi panjang, memiliki orientasi Timur-Barat dengan posisi miring 450 pada salah satu sisinya hingga mencapai tanah. Dimensi dari wadah lungun ini yaitu panjang 210 cm dan lebar 110 cm. Sedangkan dua lungun yang ditemukan memiliki ukuran yang berbeda, yakni 55 cm x 180 cm dan 40 cm x 170 cm. Pada bagian bawah lungun yang berukuran besar, ditemukan jejak pemotongan kayu menggunakan gergaji besi. Kemungkinan pemotongan ini merupakan sisa penjarahan yang mengambil pahatan sosok antropomorfik pada lungun.



Foto 3 – 4. Dimensi ukuran temuan lungun



Gambar 1. Denah keletakan temuan lungun



## 2. Situs Lungun 2

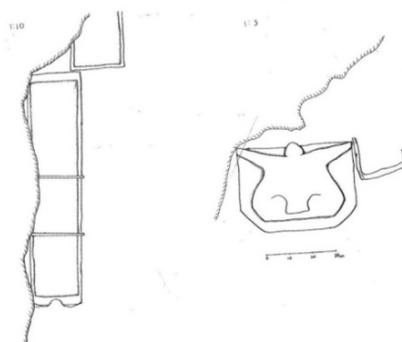
Situs penguburan Lungun 2 berada dekat dengan Lungun 1, dengan koordinat UTM 50 N X 524851 dan Y 199500 dengan ketinggian 37 mdpl. Situs ini masih terletak di Batu Luluk, dapat ditempuh dengan menaiki *ketinting* selama 10 menit dari desa, kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki selama 5 menit melalui sisi tebing karst.

Pada situs ini, ditemukan sisa tiga peti kubur lungun yang terpisah, namun yang masih dapat terlihat bentuknya hanya satu, dua lainnya hanya tinggal bagian dasarnya yang sudah mengalami pelapukan. Hampir sama dengan kondisi Lungun 1, pada situs ini sama sekali tidak dijumpai tutup peti kuburnya, hanya bagian wadah. Temuan lain yang berasosiasi dengan lungun ini yaitu sisa peralatan besi seperti parang/mandau, mata tombak dan dayung. Hal yang menarik pada peti kubur lungun yang masih utuh dijumpai sebuah pahatan sosok antropomorphik yang masih utuh dan belum mengalami penjarahan seperti pada situs-situs penguburan lain di wilayah ini, mengingat letaknya yang sangat mudah untuk dijangkau.



Foto 5 - 6. Kondisi temuan Situs Lungun 2

Temuan peti kubur lungun di Situs Lungun 2 nampaknya sudah tidak pada posisi asalnya. Hal ini dapat terlihat dari posisinya yang cenderung tidak beraturan dan berada di dasar tanah, sehingga kemungkinan banyak terjadi transformasi data yang ada.



Gambar 2: Denah temuan lungun dan pahatan sosok antropomorphik

## 3. Situs Lungun 3

Lokasinya berada di kawasan Batu Lungun, dapat diakses dari Desa Merasa selama kurang lebih 15 menit naik *ketinting*, kemudian dilanjutkan dengan menyusuri jalan setapak ke atas bukit karst selama 15 menit me-



masuk ke hutan. Terletak pada koordinat UTM 50 N X 524546 dan Y 198659 dengan ketinggian 108 mdpl. Situs ini berada pada sebuah gua yang cukup luas di dalamnya. Kondisi keruangan gua sendiri cukup gelap serta kering, dengan pintu masuk yang relatif kecil. Di dalamnya terdapat temuan sisa-sisa situs penguburan peti kubur lungun yang diperkirakan jumlahnya cukup banyak.

Pada situs Lungun 3, ditemukan beberapa sisa peti kubur kayu yang telah hancur maupun rusak yang disebabkan oleh faktor manusia. Hal ini dapat diketahui karena posisi tumpukan peti kayu yang telah hancur, serta bekal kubur yang telah berserakan di atas tanah. Ditemukan pula beberapa sisa tulang, fragmen keramik dan gerabah, sisa dayung kayu, sisa peralatan masak seperti wajan dan panci, manik-manik, serta peralatan besi seperti mata tombak, parang/*mandau* dan pisau kecil.



Foto 7: Kondisi mulut gua Situs Lungun 3



Foto 8: Kondisi Situs Lungun 3



Foto 9-10: Temuan di Situs Lungun 3

#### 4. Situs Lungun 4

Situs Lungun 4 terletak kurang lebih 50 meter dari Situs Lungun 3, dan sama-sama masih terletak di kawasan Batu Lungun. Terletak pada koordinat UTM 50 N X 524563 dan Y 198613 dengan ketinggian 112 mdpl. Situs Lungun 4 merupakan sisa penguburan menggunakan peti kubur lungun yang diletakkan pada celah sebuah tebing karst setinggi 15 meter dari permukaan tanah.

Temuan pada situs ini berupa sebuah peti kubur kayu lungun yang kondisinya sudah rusak, namun masih dapat ditemukan sisa penguburan manusia. Selain itu juga ditemukan beberapa manik-manik berukuran kecil di sekitar peti kubur. Kemungkinan besar situs ini juga telah mengalami penjarahan terhadap sisa-sisa penguburan maupun bekal kuburnya.





Foto 11-12: Kondisi tebing Situs Lungun 4 dan Temuan sisa penguburan manusia



Foto 15 - 16: Temuan dua buah lungun, penguburan manusia dan bekal kuburnya

## 5. Situs Lungun 5

Situs Lungun 5 adalah lokasi paling terakhir yang ditemukan oleh masyarakat sekitar bulan November 2016. Situs ini pula yang mengalami pencurian karena kondisinya yang tidak diketahui serta tinggalan kuburnya yang masih cukup terjaga. Lokasinya dapat ditempuh menggunakan *ketinting* dengan lama perjalanan sekitar 20 menit dari Desa Merasa. Terletak pada koordinat UTM 50 N X 524383 dan Y 198508 dengan ketinggian 68 mdpl. Situs ini berada pada sebuah gua yang sangat kecil, akses masuk yang susah sehingga harus merayap untuk memasukinya, namun terdapat peti kubur lungun yang cukup terjaga di dalamnya.



Foto 13-14: Kondisi tebing Situs Lungun 5 dan Lorong masuk gua yang sempit

Temuan pada situs Lungun 5 yakni dua buah peti kubur lungun yang masih relatif utuh dan terjaga kondisinya, namun satu peti ditemukan dalam kondisi terbuka. Selain itu, ditemukan pula sisa-sisa penguburan berupa tulang dan tengkorak manusia yang disusun, terdapat pula piring logam, wadah gerabah, wadah piring logam, wadah gerabah, wadah piring keramik, fragmen keramik, wadah perunggu, manik-manik, sisa peralatan besi, dan dayung perahu. Tinggalan tersebut diperkirakan merupakan bekal kubur yang disertakan dalam penguburan lungun.

## 6. Situs Lungun 6

Situs Lungun 6 terletak tidak jauh dari Situs Lungun 5, sekitar 50 meter. Lokasinya berada pada koordinat UTM 50 N X 524351 dan Y 198515 dengan ketinggian 68 mdpl. Situs ini terletak pada sebuah ceruk kecil pada tebing karst di sisi Sungai Kelay, dengan ketinggian sekitar 10 meter dari bibir sungai.





Foto 17 – 18: Temuan lungun dan sisa tulang manusia

Temuan pada situs ini berupa sebuah peti kubur lungun dalam keadaan yang telah rusak. Hanya berupa wadah serta beberapa sisa tulang berukuran kecil yang ditemukan di dalam peti tersebut. Selain itu, ditemukan pula manik-manik berukuran kecil yang tercampur bersama tulang-tulang tersebut. Menurut keterangan warga, dulu terdapat dua buah peti kubur lungun yang ada pada situs ini, namun hilang karena dicuri orang. Pada salah satu sisi lungun juga ditemukan bekas pemotongan menggunakan gergaji, diperkirakan merupakan bagian yang memiliki pahatan sosok antropomorfik.

## 7. Situs Lungun 7

Situs ini masih terletak pada kawasan Batu Lungun, namun berada pada sisi sungai yang lain atau pada sisi barat sungai. Lokasinya berada pada koordinat UTM 50 N X 524059 dan Y 198501 dengan ketinggian 42 mdpl. Lokasinya dapat ditempuh selama kurang lebih 15 menit dari Desa Merasa. Situs Lungun 7 terletak pada sebuah gua yang berada tepat di belakang kebun kakao milik warga desa.

Temuan di situs ini berupa peti

kubur lungun pada bagian mulut, tengah, dan bagian belakang gua. Temuan lungun tersebar dari bagian terang, remang-remang hingga bagian gelap tidak ada cahaya sama sekali. Terdapat banyak sekali lungun yang menutup hampir seluruh bagian lantai mulut gua, namun semuanya dalam kondisi yang telah rusak dan posisinya tidak beraturan. Kemungkinan telah terjadi transformasi temuan dari bagian gua yang lainnya. Tidak ditemukan satupun sisa kerangka atau tengkorak manusia sisa tradisi penguburan, namun banyak dijumpai sisa bekal kubur seperti pecahan gerabah, keramik, benda logam, piring kayu, dan peralatan besi.



Foto 19 – 20: Kondisi temuan lungun yang telah hancur dan berserakan

Temuan di situs ini berupa peti kubur lungun pada bagian mulut, tengah, dan bagian belakang gua. Temuan lungun tersebar dari bagian terang, remang-remang hingga bagian gelap tidak ada cahaya sama sekali. Terdapat banyak sekali lungun yang menutup hampir seluruh bagian lantai mulut gua, namun semuanya dalam kondisi yang telah rusak dan posisinya tidak beraturan. Kemungkinan telah terjadi transformasi temuan



dari bagian gua yang lainnya. Tidak ditemukan satupun sisa kerangka atau tengkorak manusia sisa tradisi penguburan, namun banyak dijumpai sisa bekal kubur seperti pecahan gerabah, keramik, benda logam, piring kayu, dan peralatan besi.



Foto 21 - 22: Temuan fragmen keramik di Situs Lungun 7

Kondisi temuan peti kubur lungun yang tersebar di lokasi yang cukup terbuka telah mengalami kerusakan yang kemungkinan disebabkan oleh faktor manusia. Kondisi ini menyebabkan tinggalan yang ada pada Situs Lungun 7 seperti berserakan dan dalam kondisi yang telah rusak untuk diambil beberapa bagiannya.

## 8. Situs Lungun 8

Situs ini terletak hampir sejajar dengan Situs Lungun 7, berada kurang lebih 100 meter ke arah selatan. Lokasinya berada pada koordinat UTM 50 N X 524081 dan Y 198426 dengan ketinggian 50 mdpl, serta berada di dekat perkebunan sawit milik warga. Situs ini merupakan sebuah ceruk karst yang berukuran cukup besar.

Temuan pada situs ini berupa sisa peti kubur lungun yang sudah tidak terlalu nampak bentuknya.

Kondisinya sudah rusak dan berserakan di lantai dasar ceruk. Saat dilakukan survei permukaan untuk mencari sisa-sisa temuan lepas atau bekal kubur, tidak ditemukan sama sekali. Hanya sebuah benda logam yang berbentuk seperti pisau kecil.



Foto 23: Temuan salah satu lungun



Foto 24: Temuan benda berbentuk seperti pisau

## 9. Situs Lungun 9

Situs Lungun 9 baru ditemukan pada saat dilakukan pencarian oleh tim, yang menyisir sepanjang bukit karst dan tidak jauh dari Situs Lungun 8. Pada sebuah gua horizontal yang tidak terlalu luas, ditemukan sisa tradisi penguburan. Lokasinya berada pada koordinat UTM 50 N X 524076 dan Y 198374 dengan ketinggian 60 mdpl.

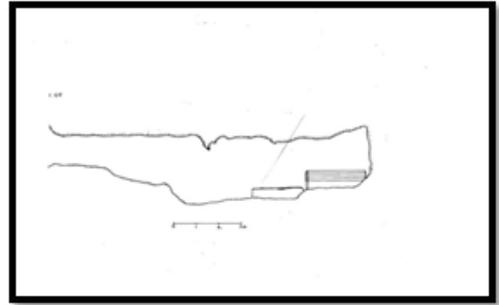
Temuan pada situs ini berupa



sebuah peti kubur dan juga wadahnya, yang dibuat sedemikian rupa dan menyesuaikan dengan kondisi morfologi gua. Namun kondisi lungun yang ditemukan sudah tidak bertutup dan terletak di lantai dasar gua. Namanya telah mengalami perpindahan dari posisi sebelumnya.

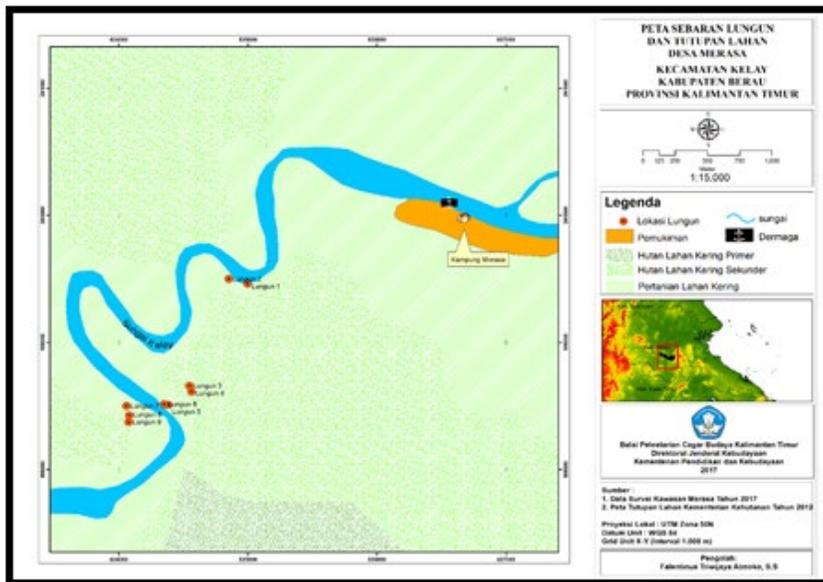


Foto 26: Temuan manik-manik



Gambar 3: Penampang lungun dengan posisi gua

Meskipun kondisi penguburan sudah tidak utuh lagi, namun ditemukan beberapa temuan lepas yang kemungkinan merupakan bekal kubur. Temuan-temuan tersebut berupa fragmen gerabah, fragmen keramik, peralatan besi, manik-manik, serta sisa tulang manusia.



Peta 3: Posisi keletakan temuan situs-situs penguburan di Desa Merasa



## B. IDENTIFIKASI TEMUAN

### 1) Kajian Arkeologis

Dari hasil peninjauan situs-situs penguburan yang ada di Desa Merasa, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, diperoleh 9 (sembilan) lokasi situs yang diduga sebagai Cagar Budaya. Seluruh situs tersebut merupakan hasil budaya masyarakat Dayak yang mengandung nilai-nilai religi, serta perkembangan kebudayaan manusia pada masa itu. Temuan peti kubur lungun yang ada di gua-gua karst di sepanjang aliran Sungai Kelay ini menunjukkan salah satu bentuk tradisi dan kepercayaan masyarakat Suku Dayak atau yang biasa disebut dengan kaharingan. Kaharingan adalah sistem kepercayaan masyarakat Dayak kuno sebelum masuknya agama-agama di Pulau Kalimantan.

Secara arkeologis, temuan seperti lungun dapat disebut sebagai struktur. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Temuan peti kubur lungun dengan bentuk, motif hias, penempatan, dan temuan artefak-artefak lainnya yang berasosiasi dengan lungun tersebut, menunjukkan bahwa telah

adanya sebuah kepercayaan terhadap kehidupan setelah kematian.

Makam dayak merupakan gambaran gaya penguburan masyarakat Dayak kuno. Teknik pengerjaan peti mati versi Dayak kuno ini telah mengenal peralatan yang tajam sehingga mampu untuk melubangi tengah gelondongan kayu. Pemilihan kayu utuh yang kuat dan keras bermaksud untuk membuat jenazah lebih awet untuk melindungi dari gangguan binatang yang dapat merusaknya. Lungun merupakan bukti arkeologis bahwa masyarakat Dayak memiliki budaya penguburan tersendiri. Pada hakekatnya, pemakaman seperti ini merupakan sebuah penghormatan kepada leluhur dengan kepercayaan bahwa roh para leluhur akan menjaga mereka.

### 2) Kajian UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Kajian aspek UU Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dilakukan terhadap beberapa objek temuan lungun yang ada di Desa Merasa, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau. Dalam undang-undang tersebut, memuat pemahaman upaya pelestarian Cagar Budaya yang meliputi aspek perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Cagar Budaya merupakan kekayaan bangsa budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan



manusia yang penting artinya bagi perkembangan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam Undang-undang tersebut, dijelaskan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 disebutkan:

Pasal 1

*“Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”*

Dalam penetapan sebuah Cagar Budaya harus memenuhi beberapa kriteria Cagar Budaya yang termuat dalam Pasal 5 yang berbunyi:

Pasal 5

*Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:*

- a. *Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;*
- b. *Memiliki masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;*
- c. *Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan*
- d. *Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.*

Penetapan Cagar Budaya harus dilalui dengan kegiatan pendaftaran objek yang diduga sebagai Cagar Budaya. Pendaftaran dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan setiap pihak terhadap objek yang diduga cagar budaya yang akan ditetapkan. Hasil pendaftaran harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya. Hasil dari pendaftaran kemudian diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) tingkat kabupaten/kota untuk dilakukan verifikasi data terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis yang diusulkan. Sesudah dilakukan kajian dan verifikasi, maka TACB membuat kesimpulan layak atau tidaknya sebuah objek untuk diusulkan penetapannya sebagai sebuah Cagar Budaya. Hasil akhir dari TACB adalah membuat rekomendasi penetapan Cagar Budaya yang disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota.

Kriteria Cagar Budaya merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam penentuan Cagar Budaya. Hasil kajian terhadap temuan beberapa situs penguburan yang ada di Desa Merasa menunjukkan beberapa situs dapat diusulkan menjadi cagar budaya, yakni Situs Lungun 3, Lungun 5, dan Lungun 9. Namun



dalam pengusulannya, seluruh situs penguburan tersebut juga dapat dijadikan sebuah Kawasan Situs Cagar Budaya.

Adapun kriteria kawasan Cagar Budaya yang dapat ditetapkan yaitu:

- a) Mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b) Berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c) Memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d) Memperlihatkan pengaruh manusia manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e) Memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f) Memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Dengan pemahaman di atas, maka setiap situs-situs penguburan yang ada di Desa Merasa setidaknya dapat diusulkan sebagai Kawasan Cagar Budaya tingkat Kabupaten. Namun penetapan ini pun harus melalui kajian akademis terlebih dahulu dengan mendasarkan pada keempat kriteria atau persyaratan diatas serta dengan telaah lebih lanjut yang dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Berau.

### C. UPAYA PELESTARIAN

Bagi masyarakat masa lampau yang hanya menggunakan lahan hutan sebagai tempat sumber makanan dengan berburu dan meramu, berkembang ke tahap lanjut yakni pemanfaatan lahan secara menetap maupun berpindah. Hal ini pastinya mengubah pola pikir manusia untuk mengeksplorasi lahan secara maksimal, namun jarang memperhatikan dampak yang akan terjadi pada kemudian hari. Dampak yang dilihat dari sisi cagar budaya tentunya pada permasalahan yang menyangkut benda cagar budaya itu sendiri, baik yang disebabkan oleh faktor biotik maupun abiotik. Faktor biotik yang disebabkan oleh makhluk hidup pada dasarnya masih dapat ditangani, karena pelaku maupun perilakunya masih dapat dilihat. Sedangkan untuk faktor abiotik yang disebabkan oleh kondisi alam, kita harus dapat menentukan secara bijak tindakan yang perlu untuk dilakukan dengan semaksimal mungkin.

Dalam kasus ini, yang menjadi pusat perlindungan adalah benda cagar budayanya, yaitu temuan situs-situs penguburan kuno berupa lungun. Namun bukan hanya itu, perlindungan preventif menekankan pada perlindungan nilai penting yang terkandung dalam benda tersebut. Preventif adalah perlindungan yang



bersifat pencegahan. Melakukan tindakan pencegahan adalah hal yang lebih utama dibandingkan pengobatan (tindakan kuratif) pada cagar budaya. Sehingga dalam melaksanakan sebuah upaya konservasi preventif, observasi terhadap kondisi lingkungan mikro dan makro sangat diperlukan untuk mengambil tindakan yang tepat pada pelestarian benda cagar budaya (Cahyandaru, 2010).

Pelestarian pada situs-situs penguburan yang ada di Desa Merasa, dapat dilakukan dengan tindakan pencegahan berupa pengamanan dan pengelolaan yang baik. Dari kasus pencurian yang pernah terjadi, diharapkan peran serta masyarakat desa yang aktif dalam pengawasan cagar budaya. Hal ini dapat dilakukan sebagai sebuah langkah awal, karena saat ini kesadaran masyarakat Desa Merasa akan pelestarian situs-situs penguburan tersebut cukup baik. ECOTrip sebagai Lembaga Swadaya Desa yang bergerak di sektor pariwisata Desa Merasa dapat mengelola situs-situs penguburan ini sebagai salah satu destinasi wisata yang berbentuk kawasan. Situs-situs ini dapat dikelola dengan memadukan unsur budaya dan alam yang masih cukup asri. Diharapkan dengan adanya pengelolaan yang baik dari masyarakat di sekitarnya, situs-situs penguburan tersebut dapat tetap lestari sekaligus

menjadi salah satu aset yang dapat memberikan peningkatan kesejahteraan rakyat.

## KESIMPULAN

Kegiatan peninjauan situs penguburan di Desa Merasa, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau merupakan salah satu kegiatan penanganan kasus Cagar Budaya yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, maka dapat dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pada wilayah Desa Merasa, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, ditemukan 9 (sembilan) lokasi temuan peti kubur kayu lungun yang tersebar pada 2 (dua) kawasan batu, yakni pada Batu Lukok dan Batu Lungun. Kondisi temuan lungun sebagian besar sudah dalam keadaan hancur atau rusak dikarenakan faktor alam maupun manusia, meskipun masih dapat ditemukan beberapa tinggalannya.
- 2) Pernah terjadi kasus pencurian pada bulan Desember 2016 lalu terhadap bekal kubur yang ada pada lungun yang berada di dalam gua tebing Sungai Lesan. Namun, pelaku dapat diketahui dan barang yang dicuri dikembalikan lagi ke tempatnya semula.
- 3) Menurut keterangan Kepala



Adat Desa Merasa, Bpk. Anderias Lani, temuan kubur lungun tersebut merupakan tinggalan dari suku Dayak Ga'ai yang dulu memang mendiami wilayah sepanjang aliran Sungai Lesan, dan sekarang banyak bermukim di wilayah Long Gik.

4) Hasil kajian awal menunjukkan bahwa beberapa temuan situs penguburan tersebut dapat diusulkan untuk menjadi sebuah Kawasan Cagar Budaya.

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan, maka kami dapat menyarankan bahwa untuk selanjutnya:

1) Perlu dilakukan tindakan pencegahan awal berupa pengawasan dan pengamanan awal terhadap situs-situs penguburan yang ditemukan oleh masyarakat Desa Merasa.

2) Dapat dilakukan kegiatan survei lanjutan untuk mencari potensi temuan situs-situs penguburan lainnya, mengingat cakupan wilayah yang cukup luas sehingga besar kemungkinan untuk menemukan lokasi serupa.

3) Perlu melakukan peninjauan ke Desa Long Lanuk, Kecamatan Sambaliung, berdasarkan keterangan Bpk. Saprudin, M.Si., untuk melihat kesinambungan temuan situs penguburan, karena lokasinya secara geografis berdekatan dengan Ds. Merasa, Kec. Kelay dan masih berada di sepanjang aliran Sungai Lesan.

4) Mengusulkan bahwa beberapa temuan situs penguburan di Desa Merasa menjadi sebuah Kawasan Cagar Budaya, dimana pengelolannya dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa atau lembaga ECOTrip demi menekankan aspek perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan situs-situs tersebut sesuai dengan amanat UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pada akhirnya, kembali lagi bahwa dalam amanat undang-undang, bahwa Cagar Budaya memang sejatinya adalah milik rakyat, oleh rakyat, dan bagi rakyat. Oleh sebab itu, dengan pengelolaan dan pemanfaatan secara maksimal dan berkesinambungan diharapkan dapat menjadi salah satu aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga apabila masyarakat telah merasakan manfaatnya secara langsung, pelestarian situs-situs penguburan di Desa Merasa dapat berjalan dengan baik.



## Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2015. Kecamatan Kelay Dalam Angka. Berau: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.
- \_\_\_\_\_. 2016. Kabupaten Berau Dalam Angka. Berau: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.
- BPCB Kalimantan Timur. 2014. Kajian Potensi Cagar Budaya Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Samarinda: BPCB Kalimantan Timur.
- \_\_\_\_\_. 2016. Laporan Pendokumentasian Cagar Budaya Kabupaten Kotawaringin Timur. Samarinda: BPCB Kalimantan Timur.
- Cahyandaru, Nahar. 2010. Dasar-Dasar Konservasi. Magelang: Balai Konservasi Borobudur.
- Sulang dkk, Kusni. 2011. Budaya Dayak Permasalahan dan Alternatifnya. Malang: Bayumedia.
- Tanudirdjo, Daud Aris. 1988-1989. Laporan Penelitian Ragam Metode Penelitian Arkeologi dalam Skripsi Karya Mahasiswa Arkeologi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM.



## Potensi Cagar Budaya Sebagai Aset Daerah Bagi Peningkatan Pariwisata Tanah Laut, Kalimantan Selatan

Oleh : Andi Sultra Handayani

### Abstrak

Dalam penyelesaian permasalahan pelestarian yang ada di Kabupaten Tanah Laut, maka kelembagaan pemerintah dan hukum harus terlibat didalamnya. Objek tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pariwisata lokal dan mancanegara untuk berkunjung ke tempat tersebut, malainkan juga diperuntukkan bagi ilmu pengetahuan dan pendidikan. Maka dari itu, sangat diperlukan sebuah konsep yang dapat memadu antara pariwisata dan pelestarian ataupun sebaliknya. Keberadaan Cagar Budaya yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai objek wisata di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, adalah bekas Benteng Tabanio tinggalan peperangan Belanda dan Kerajaan Banjar, industri tinggalan Jepang seperti bunker, bekas pabrik baja, bekas pabrik kertas dan kolam penampungan air. Keberadaan Cagar Budaya kurang dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut sehingga perlunya model pengelolaan yang baik secara pariwisata tanpa mengesampingkan pelestarian Cagar Budaya. Dengan adanya pemanfaatan Cagar Budaya sebagai objek wisata tanpa mengesampingkan pelestarian, justru dapat memberikan apresiasi lebih tinggi terhadap upaya pemeliharaan peninggalan budaya bangsa. Sesungguhnya Cagar Budaya adalah nyawa atau roh dari kegiatan kepariwisataan. Tanpa adanya peranan pelestarian untuk Cagar Budaya maka pariwisata akan lumpuh dan tidak memiliki daya tarik untuk dikunjungi.

Kata Kunci: *Pariwisata, Cagar Budaya, Pelestarian*

### Pendahuluan

Melihat tinggalan budaya yang ada di Kabupaten Tanah Laut tidak memiliki daya tarik, karena tidak dimanfaatkan secara maksimal bagi kepentingan ilmu pendidikan dan kepariwisataan. Seolah-olah tidak memiliki nilai bagi masyarakat padahal antara masa lalu, masa kini dan masa depan memiliki keterkaitan, karena berbagai hal yang terjadi di masa lalu yang kemudian memberi-

kan warna bagi budaya masa kini. Begitu juga dengan masa depan akan dipengaruhi berbagai hal yang terjadi di masa kini. Tinggalan budaya selain sebagai penguat jadi diri bangsa juga dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan nasional, seperti pariwisata (Armanda, 2010).

Pariwisata berarti melakukan perjalanan dari tempat kediaman menuju tempat wisata dengan maksud bersantai. Pariwisata dapat



juga dipandang sebagai kegiatan dan interaksi berbagai pihak seperti wisatawan, bisnis pemerintah, serta masyarakat dalam proses menarik dan melayani wisatawan. Pariwisata merupakan proses dalam berupaya “menjual” segala potensi yang dimiliki oleh suatu daerah untuk menarik wisatawan. Para wisatawan memiliki kecenderungan menyukai objek-objek yang unik dan langka, sehingga keberadaan sumber daya arkeologi di suatu daerah dapat dijadikan sebagai modal kepariwisataan yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata. Soekadijo (2000) menjelaskan bahwa modal kepariwisataan dapat dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat menjadi atraksi penahan maupun atraksi penangkap wisatawan. Atraksi penahan wisatawan adalah modal kepariwisataan yang dikembangkan sehingga dapat menahan wisatawan selama sehari-hari dan dapat berkali-kali dinikmati, bahkan pada kesempatan lain wisatawan akan datang berkunjung ke tempat yang sama. Atraksi penangkap wisatawan adalah modal yang hanya menarik kedatangan wisatawan, cenderung hanya sekali dinikmati, kemudian ditinggalkan oleh wisatawan. Oleh karena itu, dalam memberdayakan modal kepariwisataan di suatu daerah, hal yang dibutuhkan adalah kejelian dalam melihat

peluang dan memanfaatkan potensi daerah (Soekadijo, 2000: 20-50).

Tanah Laut adalah salah satu Kabupaten di Kalimantan Selatan yang menjadi gudang sumber daya budaya yang memiliki nilai penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan ekonomi. Tanah Laut terkenal dengan keindahan wisata alam seperti Pantai Takisung, Pantai Asmara, Bukit Rimbi. Beberapa wisata buatan yang cukup terkenal adalah Labirin Pelaihari, Wisata Kayangan, Taman Mina Tirta, dan wisata lainnya. Model kepariwisataan yang hanya mengandalkan dari segi alam yang dipadukan dengan modernisme akan dapat tergeser dan bahkan akan ditinggalkan, tolok ukur tersebut dilihat dari tingkat konsumsi bagi para wisatawan. Sementara untuk menarik perhatian wisatawan, baik dalam negeri maupun mancanegara harus lebih kreatif dan mampu menyajikan sesuatu yang tidak hanya terfokus pada bersantai dan menikmati *sun, sea and sand*. Saat ini, pola konsumsi wisatawan mulai berubah kearah yang lebih tinggi seperti menikmati produk atau kreasi budaya, peninggalan budaya, perpaduan alam dan wisata sejarah.

Perubahan pola tersebut perlu untuk segera disikapi dengan berbagai strategi pengembangan produk pariwisata maupun promosi baik dari



sisi pemerintah maupun masyarakat. Dari sisi pemerintah perlu dilakukan perubahan skala prioritas sehingga kebijakan peran sebagai fasilitator dapat dioptimalkan untuk mengantisipasi hal tersebut. Dari segi masyarakat adanya *sine of business*, yaitu dengan menjaga peninggalan-peninggalan sejarah yang masih ada sehingga imbasnya kembali ke sektor-sektor ekonomi masyarakat setempat. Ketika hal tersebut terjadi secara berkesinambungan dan harmonis, maka wisatawan yang hadir dari dalam negeri maupun mancanegara tidak hanya datang untuk menikmati wisata alam dari Tanah Laut, namun juga memiliki tujuan untuk berwisata sejarah, wisata ziarah, bahkan dapat melakukan penelitian terhadap Cagar Budaya yang ada di Tanah Laut.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan pariwisata di daerahnya. Distribusi kewenangan pemerintah memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional. Implikasi otonomi daerah harus menitik kepada otonomi masyarakat di daerah. Prioritas utama adalah pemberdayaan ekonomi rakyat yang menciptakan berbagai fasilitas kemudahan untuk meningkatkan produksi sesuai potensi sekitarnya. Selain hal tersebut, investasi harus dipacu untuk memancing minat investor mena-

nam modal. Perundang-undangan juga memberikan peluang bagi masyarakat dalam mengidentifikasi, menggali, memanfaatkan serta mengelola segala Cagar Budaya yang ada di daerahnya. Beberapa faktor penting dalam pemanfaatan kawasan bersejarah sebagai ruang publik secara maksimal umumnya berkaitan dengan karakteristik ekonomi atau budaya masyarakat setempat, jenis fasilitas yang disediakan dan kesesuaian dengan masyarakat serta aksesibilitas yang dimiliki fasilitas lain serta tingkat kemudahan memasuki wilayah secara ekonomi, ekologis dan simbolis.

Kasnowihardjo (2001) menjelaskan bahwa Cagar Budaya memiliki potensi *recreation and tourism*, yang dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata dan tempat rekreasi yang sehat dan positif. Tempat wisata perlu untuk dipasarkan dengan retribusi tinggi, kerana merupakan tempat yang langka, bahkan hanya satu tempat di dunia. *Monetary and economic gain*, setelah dimanfaatkan sebagai objek wisata dengan retribusi maka akan mendatangkan keuntungan terutama bagi masyarakat sekitarnya. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan menjual souvenir, makanan dan minuman, serta menjual jasa fotografi bagi pengunjung. Sedangkan retribusi yang ditarik oleh pemerintah akan



meningkatkan pendapatan daerah.

Berikut adalah objek Cagar Budaya yang ada di Tanah Laut, Kalimantan Selatan:

### 1. Benteng Tabanio

Jejak peradaban Belanda di Indonesia terlihat pada benteng di wilayah Kalimantan Selatan tepatnya di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Tujuan pendirian benteng adalah terkait masalah ekonomi dan politik, dimana penguasaan terhadap rempah-rempah dan tambang batu bara, ada di Banyu Irang (Tanah Laut). Benteng Tabanio memiliki kaitan dengan Benteng Tatas di Banjarmasin (sekarang Mesjid Raya Sabilal Muhtadin) yang menjadi sentral perekonomian di Kalimantan Selatan. Kekayaan tanah Kalimantan menjadi daya tarik negara lain untuk mengeksplorasi wilayah tersebut.

Benteng Tabanio menurut informasi dibangun pada tahun 1789, yang artinya 33 tahun lebih muda dibanding Benteng Tatas yang didirikan pada tahun 1756. Banyaknya benteng yang didirikan oleh Belanda, melatarbelakangi munculnya ketidaksenangan penduduk terhadap Belanda yang akhirnya menyebabkan Perang Banjar terjadi. Penyerangan Benteng Pengaron pada tanggal 28 April 1859 berada di bawah pimpinan Pangeran Antasari dan berakhir pada

Januari 1905 dengan gugurnya Pangeran Mohammad Seman (Gusti Mat Seman) bin Pangeran Antasari untuk mengusir kekuasaan dan kompeni Belanda dari Tanah Banjar yang bersemboyan "*Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing*".

Fungsi lain dari pembangunan benteng tersebut adalah untuk melindungi pegawai-pegawai mereka. Dengan kegigihan para pejuang pada saat Perang Banjar di bulan Agustus 1859, Haji Buyasin yang mengikuti Demang Leman dan Kiai Langlang beserta beberapa pasukan menyerang Benteng Tabanio dan berhasil merebutnya, bahkan pemimpin Belanda yang bernama Mauritz tewas bersama beberapa tentara Belanda. Kemudian kompeni Belanda mengerahkan kekuatan militernya dengan menggunakan Kapal Perang Bone untuk merebut kembali Benteng Tabanio. Tetapi sekali lagi dapat dipukul mundur oleh Haji Buyasin yang sebenarnya mendapat tugas dari Pangeran Antasari untuk memimpin perang gerilya (*gurila*: bhs. Banjar) di bagian Tanah Laut (Pleihari, Bati – Bati, Satui, Tabanio, dan seluruh pesisir serta Pantai Tanah Laut).

Akan tetapi pada serangan Kompeni Belanda yang kedua, dengan kekuatan yang besar terhadap Benteng Tabanio yang diduduki oleh Haji Buyasin, dapat direbut kembali



oleh Belanda. Haji Buyasin sendiri menyingkir dan mendirikan Benteng di Takisung di sebelah tenggara Tabanio. Tetapi Belanda kembali menyusun kekuatan serta perencanaan strategis yang lebih matang di Benteng Tabanio. Pada bulan Desember 1859, Benteng Haji Buyasin di Takisung diserang secara besar-besaran dan dapat dihancurkan. Haji Buyasin menyingkir ke daerah Pleihari yang akhirnya sampai ke daerah Bati-Bati, kemudian dikepung oleh Belanda dari tiga arah yaitu arah Pleihari, arah Martapura, dan arah Banyu Irang dengan serdadu militer berkekuatan 115 orang.

Sekitar abad XVII, daerah Tabanio merupakan daerah yang strategis dan penting bagi perekonomian Kerajaan Banjar. Daerah ini merupakan daerah lintas perdagangan seperti penghubung ke daerah Jawa, Pesisir Kalimantan, Sulawesi, bahkan Sumatera dan Malaya serta luar Nusantara. Sekitar 1,5 kilometer dari Benteng Tabanio ke utara, ada sebuah Kampung Melayu yang merupakan kampung tertua. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kubur-kubur tua di kampung tersebut. Rupanya kampung itu merupakan kampung transmigrasi lokal penanam lada yang berkembang pada masa Kerajaan Banjar di bawah pemerintahan Sultan Musta'imbillah yang dikenal dengan

Maruhum Panembahan (1650-1678). Kemungkinan Tabanio itu sendiri merupakan perkembangan dari penduduk Kampung Melayu.

### **Deskripsi Arkeologi**

Sejak abad XVII, Tabanio menjadi penting dari segi perdagangan, angkutan lada, intan, emas, dan hasil hutan yang menghubungkan (transito) Banjarmasin dengan tempat-tempat pelabuhan di Jawa. Namun, saat ini hanya dapat ditemukan tanah kosong dengan sisa-sisa bata yang terdapat di permukaan tanah. Kemungkinan masyarakat menggunakan bata tersebut untuk bahan pembangunan rumah.

Pecahan bata yang menjadi bukti reruntuhan telah diambil oleh masyarakat guna kepentingan membangun rumah dan masjid. Menurut catatan dan pengamatan, diperkirakan luas Benteng mencapai 20.000 meter<sup>2</sup>, dengan panjang 200 meter dan lebar 100 meter (200 x 100 meter) yang dikelilingi oleh parit (sungai kecil buatan) di tepi Sungai Tabanio. Berdasarkan lukisan tiruan yang disimpan di museum, arah hadap Benteng Tabanio mengarah ke pesisir pantai, yaitu Laut Jawa dan kemungkinan meriam Benteng Tabanio yang saat ini disimpan pada museum juga menghadap ke arah yang sama.

Lingkungan sekitar benteng sudah mulai dipadati dengan rumah



penduduk, bahkan sisa bastion Barat berada di bawah pondasi rumah warga. Sangat disayangkan lokasi bersejarah yang menorehkan Perang Kerajaan Banjar dan sebagai pembuktian kekuatan Kerajaan Banjar mengalahkan Belanda tidak mendapat perhatian yang maksimal. Melihat lingkungan benteng yang asri dengan rumput gajah di setiap jengkalnya, Benteng Tabanio menjadi objek wisata bagi masyarakat luar daerah dan para siswa/siswi yang hendak berfoto di lokasi tersebut. Selain itu, lingkungan sekitar benteng difungsikan sebagai tempat menyimpan ternak.

Empat titik gundukan tanah, merupakan bekas bastion dari Benteng Tabanio. Menurut Bapak Masran yang pernah menjadi Juru Pelihara BPCB, tinggi bastion pada awalnya mencapai kurang lebih tiga meter dengan susunan bata yang saling mengikat dan masih ditemukan sisa-sisa peluru terutama pada Bastion yang berhadapan dengan Laut Jawa (Bastion Barat). Tidak banyak yang dapat dideskripsikan untuk benteng tersebut, karena kondisinya hampir rata dengan tanah. Penelusuran sejarah memberi pencerahan mengenai bentuk dari Benteng Tabanio, dengan lukisan tiruan yang disimpan di museum. Pada lukisan tersebut memperlihatkan desain bagian depan dari Benteng Tabanio.



Foto1. Gundukan tanah yang diduga Bastion dari Benteng Tabanio  
(Dok. Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur)

## 2. Kompleks Industri Jepang

Keberadaan industri tersebut kurang dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Lokasi dari industri tersebut berada di Kecamatan Bajuin dengan tinggalan berupa bunker, bekas pabrik baja dan bak penampungan air.

### a. Bunker Jepang

Bunker Jepang masuk dalam wilayah administrasi Desa Sungai Bakar, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Akses menuju bunker tergolong sulit. Akses yang paling mudah adalah dari pabrik biji besi dengan berjalan kaki menyusuri sungai dan kebun pisang warga. Kondisi jalan curam dengan kemiringan sekitar 60°.

Menurut Bapak Nurdin, penemuan bunker telah disampaikan pada



tahun 2006 kepada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut, namun tidak mendapat tanggapan. Bunker tersebut awalnya digunakan oleh Tentara Jepang untuk mengintai musuh, sekaligus mengamankan kegiatan pabrik besi yang ada di bukit tersebut.



Foto 2. Lingkungan Bunker Jepang  
(Dok. Balai Pelestarian Cagar Budaya  
Kalimantan Timur)

Kondisi bunker tidak terawat, dinding telah mengalami kerusakan akibat retak, pecah dan ditumbuhi lumut. Bunker juga ditumbuhi pohon di bagian atas, sehingga akar dan daun dari pohon tersebut menutupi lubang bunker dan menjadi sarang ular. Sangat disayangkan, pada bagian lantai bunker telah rusak akibat aktivitas penggali liar oleh masyarakat yang ingin mencari harta karun. Dinding bunker juga diisi dengan vandalisme berupa coret-coretan berwarna hitam.

Di lokasi tersebut terdapat dua bunker dengan ukuran yang berbeda. Bunker pertama dengan panjang 282 cm, lebar 240 cm dan tebal dinding

40 cm. Lantai bunker terbuat dari semen dengan konstruksi dari baja dan bangunan cor. Jarak antara bunker pertama dan kedua adalah 1,5 m. Bunker kedua yang dibuat dari cor semen dengan rangka baja, berbentuk bulan sabit pada bagian dak. Ukuran bunker kedua adalah panjang 359 cm, lebar 364 cm, tebal dinding 28,5 cm, tebal lantai 18 cm, dan tebal dak mencapai 70 cm.

#### **b. Bak Penampungan Air (Jepang)**

Bak Penampungan Air milik Jepang pada bagian barat berbatasan dengan kantor dan kolam PDAM Kecamatan Bajuin. Akses menuju Bak Penampungan Air tergolong mudah karena dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat dengan melewati jalan pengerasan, lalu jalan setapak. Sedangkan untuk sampai pada situs tersebut, ditempuh dengan berjalan kaki melewati kebun warga dan melewati parit dengan kondisi jalan yang landai.

Kondisi pada bak penampungan air terlihat sangat tidak terawat, sekeliling tembok bak tersebut dipenuhi semak belukar yang tingginya hampir mencapai 80 cm. Bak penampungan air juga pernah dimanfaatkan oleh PDAM yang berada tepat di sisi kanan dari bak tersebut, namun saat ini sudah tidak difungsikan lagi. Sejarah keberadaan bak tersebut masih



kurang jelas sehingga masih dibutuhkan penelurusan lebih lanjut terkait bak penampungan air milik Jepang.



Foto 3-4. Kondisi Bak Penampungan Air  
(Dok. Balai Pelestarian Cagar Budaya  
Kalimantan Timur)

### c. Sisa Bangunan Eks Pabrik Baja

Menurut informasi Bapak Nur-din, sisa struktur ini adalah bangunan eks Pabrik Baja milik Jepang. Akses menuju lokasi sisa bangunan pabrik baja tergolong mudah karena dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat dengan melewati jalan pengerasan lalu jalan setapak. Sedangkan untuk bisa sampai pada bangunan tersebut, ditempuh dengan berjalan kaki melewati kebun warga dengan kondisi jalan yang landai sekitar 50 meter dari jalan setapak.

Sisa reruntuhan bangunan terse-

but hanya tinggal susunan bata yang tingginya kurang lebih satu meter. Bagian bata terdiri dari enam sisi, dengan bagian yang lebar atau bidang datar disusun memanjang atau strek dan disusun secara melebar atau kop, dengan menggunakan perekat atau spesi yang terbuat dari pasir dan semen. Dari bekas reruntuhan tersebut terdapat bata yang bertuliskan "SHI-NAGAWA". Selain itu, di dekat bangunan ditemukan dinding sumur yang terbuat dari beton, namun ditumbuhi pohon besar. Belum ada data yang menjelaskan kapan dibangun dan mengapa pabrik baja tersebut runtuh, sehingga masih diperlukan penelurusan lebih lanjut terkait sejarah dari bangunan tersebut.

### d. Sisa Struktur Bangunan Eks Pabrik Kertas

Selain sisa struktur bangunan eks pabrik baja, di lokasi ini juga ditemukan sisa struktur bangunan eks pabrik kertas. Ketinggian runtuhan sekitar 55 meter dari permukaan laut. Batas geografis struktur tersebut adalah kebun kopi dan pisang di sebelah utara, jalan pengerasan di se-





Foto 5-6. Sisa struktur bangunan eks pabrik baja  
(Dok. Balai Pelestarian Cagar Budaya  
Kalimantan Timur)

belah selatan, dan rumah warga di sebelah timur dan barat.

Akses menuju bangunan eks pabrik kertas tergolong mudah karena dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat dengan melewati jalan pengerasan lalu jalan setapak. Sedangkan untuk bisa sampai pada situs tersebut, ditempuh dengan berjalan kaki melewati rumah warga dengan kondisi jalan yang landai sekitar 50 meter dari jalan setapak.

Sama halnya dengan pabrik baja, pabrik kertas ini juga tersisa reruntuhan saja. Tinggi sisa reruntuhan bangunan kurang lebih satu meter, dengan bagian bata terdiri dari enam sisi dan bagian yang lebar atau bidang datar disusun memanjang atau strek dan disusun secara melebar atau kop, dengan menggunakan perikat atau spesi yang terbuat dari pasir dan semen. Dari informasi Bapak Nurdin, dulu pabrik tersebut sangat besar namun bata dari bangunan su-

dah dipindahkan oleh warga sekitar dan sebagian tanah di lokasi tersebut telah dibangun rumah. Sejarah keberadaan pabrik tersebut juga masih sangat kurang sehingga dibutuhkan penelusuran lebih lanjut terkait hal tersebut.



Foto 7. Sisa struktur bangunan eks pabrik kertas tampak belakang  
(Dok. Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur)

## Pengelolaan Cagar Budaya Bagi Pariwisata

Selain dapat dimanfaatkan sebagai objek penelitian dalam bidang pendidikan dan pengetahuan, situs juga dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata yang dapat menghasilkan ekonomi bagi masyarakat. Ranah masyarakat yang dapat menerima dampak ekonomi biasanya mampu melihat potensi pada objek tersebut. Beberapa masyarakat di sekitar situs dan kelompok masyarakat kreatif sangat berpeluang untuk memanfaatkan situasi tersebut sebagai aset wisata (*tourism assets*). Sumber daya arkeologi setiap daerah memiliki ciri



khas atau keunikan tersendiri, sehingga dapat menjadi daya tarik wisatawan yang dapat menghasilkan nilai ekonomis bagi pengembangan atau pemberdayaan pariwisata budaya.

Pemberdayaan pariwisata budaya berarti mengemas segala aktivitas kehidupan manusia termasuk benda-bendainggalan budaya menjadi daya tarik wisata. Pariwisata budaya memiliki peluang yang cukup besar untuk menarik minat wisatawan, tergantung pada daya cipta, inovasi dan pengemasan dari semua yang terlibat secara kondusif. Semakin banyak perbedaan budaya dan aspek kehidupan masyarakat lokal dengan kebudayaan dan kehidupan wisatawan, maka semakin besar keinginannya untuk datang berkunjung untuk mengetahui budaya tersebut.

Keberadaan tinggalan Belanda dan Jepang yang ada di Kabupaten Tanah Laut dapat dikemas dengan baik sehingga menjadi daya tarik bagi para wisatawan baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Objek seperti bekas Benteng Tabanio yang memiliki nilai sejarah bagi kerajaan Banjarmasin dan beberapa tinggalan Belanda yang cukup menarik, serta daya dukung alam seperti air terjun dan sumber mata air panas, dapat mendukung kemajuan lokasi tersebut sebagai objek wisata unggulan. Hal tersebut dapat dikelola oleh ma-

sarakat dengan penunjang fasilitas wisata seperti membangun penginapan, restoran atau bentuk travel tresaure yang dikemas sedemikian rupa. Tinggalan Industri Jepang yang ada di Tanah Laut juga menjadi aset berharga bagi pemerintah baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan dan ekonomi. Keberadaan objek tersebut sangat disayangkan jika hanya terbelengkalai tanpa adanya perhatian yang dapat menjadi modal dalam pengembangan wilayah tersebut. Begitu banyak ilmu pengetahuan yang dapat kita pecahkan ketika semua *puzzle* budaya dapat disusun dan dengan pengelolaan yang tepat untuk pariwisata, sehingga objek tersebut akan dapat menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Namun itu semua tidak cukup hanya dengan keuntungan secara ilmu pengetahuan dan keuntungan secara ekonomi, karena Cagar Budaya adalah nyawa atau roh dari kegiatan tersebut sehingga seharusnya konsep pelestarian harus menjadi patokan utama.

Pemikiran berkenaan dengan pengembangan situs-situs tersebut hendaklah tetap memperhatikan pelestarian sumber daya yang ada sehingga tidak berdampak negatif. Hal ini disebabkan pembangunan diperlukan untuk meningkatkan nilai dari berbagai sumber daya yang ada



bagi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, seharusnya pembangunan yang berkaitan dengan pariwisata tetap berwawasan lingkungan dan tidak mengesampingkan pelestarian yang bernilai penting. Lebih baik lagi jika pembangunan penunjang kepariwisataan tetap berbasis pada pelestarian dengan kaidah-kaidah dalam pelestarian harus menjadi acuan dalam pengembangan sebagai kepariwisataan, agar kelangsungan objek yang akan menjadi sumber pemasukan dapat terawat dengan baik. Untuk itu, sangat diperlukan manajemen yang tepat sehingga berbagai kepentingan dapat terangkul dan terkoordinir dengan baik.

Salah satu yang wajib menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya budaya melalui pariwisata adalah peraturan/perundangan yang berlaku sehingga pelestarian tetap terjaga. Pemahaman tentang undang-undang yang berlaku juga sangat penting bagi masyarakat, sehingga pelestarian Cagar Budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat. Kembali lagi peruntukan sumber daya budaya atau Cagar Budaya adalah milik masyarakat sehingga peranan pemerintah sebagai fasilitator menjadi sangat kompleks terhadap masyarakat dalam pelestarian Cagar Budaya. Pentingnya sosialisasi tentang Un-

dang-Undang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 yang telah menjelaskan tentang peranan masyarakat dan tentang kebijakan atau langkah-langkah yang harus diambil dalam pelestarian Cagar Budaya.

Penyusunan perencanaan *master plan* harus benar-benar komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur terkait yang berkaitan dengan aspek sosial, budaya, ekonomi, lingkungan dan sebagainya. Pelibatan tersebut untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar segala *stakeholder* dapat terhimpun di dalamnya. Rancangan yang baik dan berdasarkan pada prinsip-prinsip pelestarian akan berdampak positif, baik untuk Cagar Budaya maupun masyarakat sebagai pemilik utama dari Cagar Budaya (Susilowati, 2010).

Cagar Budaya sebagai modal kepariwisataan dapat dikembangkan sedemikian rupa agar menjadi daya tarik yang dapat mendatangkan wisatawan, namun semua itu tergantung pada model pengelolaannya. Pemberdayaan potensi yang ada pada suatu kawasan menjadi objek pariwisata tidak dapat terwujud dalam waktu yang singkat tanpa adanya perencanaan yang matang. Adanya beberapa dampak yang akan dihadapi, seperti perubahan perilaku masyarakat, kerusakan Cagar Budaya dan lingkungannya sehingga mem-



butuhkan pemikiran yang matang dan koordinasi yang tepat. Hal yang perlu diwaspadai dan membutuhkan perencanaan yang tepat adalah pembangunan fisik yang mendukung terselenggaranya kegiatan pariwisata seperti pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, hotel, toko, restoran maupun pemukiman bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan. Tidak menutup kemungkinan pembangunan yang dilaksanakan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan Cagar Budaya yang ada. Analisis mengenai lingkungan perlu dilakukan sebagai proses pengkajian terpadu, yang mempertimbangkan aspek ekologi, sosial-ekonomi dan sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha atau kegiatan. Kegiatan yang tidak kalah penting adalah peningkatan apresiasi dari masyarakat akan keberadaan Cagar Budaya sehingga dapat meminimalisir ancaman terhadap keberadaannya. Menjadikan Cagar Budaya sebagai pertunjukan wisata sekaligus ajang pengenalan untuk aset masyarakat yang dimilikinya.

Dengan adanya aturan yang jelas tentang pelestarian Cagar Budaya yang dapat mengakomodasi perkembangan yang terjadi pada Cagar Budaya itu sendiri maupun lingkungan dimana benda tersebut

berada, maka keberadaan Cagar Budaya dapat dipertahankan dan dinikmati oleh para wisatawan yang datang ke Kabupaten Tanah Laut. Potensi besar yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Laut untuk mengembangkan pendapatan dalam mensejahterakan masyarakat, sudah didepan mata. Agar kepariwisataan berjalan selaras dengan pelestarian Cagar Budaya, maka dalam penataannya perlu memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Isu lingkungan yang berkelanjutan;
2. Keamanan dan kenyamanan bagi semua pengguna;
3. Memfasilitasi kegiatan campuran dalam kawasan perencanaan yaitu pemukiman dan komersil; dan
4. Memfasilitasi segala sesuatu yang sifatnya untuk keberlangsungan dari Cagar Budaya (pelestarian).

Hal yang dapat dilakukan untuk penanganan objeknya sendiri adalah dengan penanganan langsung dari konservator. Melihat beberapa bangunan yang perlu untuk direkonstruksi dari segi fisik dan sejarah dari bangunan tersebut. Pelibatan masyarakat perlu untuk ditingkatkan karena dengan adanya campur tangan masyarakat yang sadar dengan keberadaan Cagar Budaya, maka keberlangsungan Cagar Budaya dapat terjaga dengan baik. Model konservasi dan peli-



batan masyarakat dalam merawat perlu diuraikan sebagai berikut:

1. Mengembalikan wajah objek konservasi;
2. Merawat dengan metode dari konservator berdasarkan kerusakan yang terjadi pada Cagar Budaya;
3. Menampilkan sejarah pertumbuhan objek;
4. Mengarahkan perkembangan masa kini yang diselaraskan dengan perencanaan masa lalu yang tercermin dalam objek pelestarian; dan
5. Melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengerjaan hingga tahap evaluasi.

Dasar dalam sebuah perawatan Cagar Budaya adalah dapat mempertahankan budaya dan sejarahnya, serta memotivasi masyarakat dalam segi ekonomi yang menganggap nilai bangunan ketika dilestarikan akan meningkat sehingga bernilai komersial untuk dijadikan suatu modal. Maka dari itu penting dalam melakukan pelibatan masyarakat secara langsung agar dapat berpartisipasi dalam pelestarian Cagar Budaya (Kasnowihardjo, 2001).

## Penutup

Berbagai potensi yang ada di Kabupaten Tanah Laut tidak akan memiliki manfaat untuk masyarakat jika tidak dilakukan penanganan maupun

pengelolaan secara tepat. Langkah-langkah yang perlu dilakukan, misalnya publikasi tentang arti penting Cagar Budaya dan manfaatnya untuk masyarakat atau pengembangan sektor kepariwisataan secara profesional. Pengembangan wisata budaya merupakan salah satu upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan Cagar Budaya. Hal tersebut tidak akan terrealisasi jika hanya satu pihak yang mewujudkannya. Dengan demikian, dibutuhkan kerja sama antar stakeholder mulai dari *planning*, *actuating* dan tahap evaluasi.

Dalam penyelesaian permasalahan pelestarian yang ada di Kabupaten Tanah Laut, kelembagaan pemerintah dan hukum harus terlibat di dalamnya. Objek tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pariwisata lokal dan mancanegara untuk berkunjung ke tempat tersebut, melainkan juga diperuntukkan bagi ilmu pengetahuan dan pendidikan. Maka dari itu sangat diperlukan sebuah konsep yang dapat memadu antara pariwisata dan pelestarian ataupun sebaliknya. Dengan adanya pemanfaatan Cagar Budaya sebagai objek wisata dapat memberikan apresiasi lebih tinggi terhadap upaya pemeliharaan peninggalan budaya bangsa. Sebenarnya Cagar Budaya dianggap sebagai nyawa atau roh dari kegiatan kepariwisataan. Tanpa adanya peran-



an pelestarian untuk Cagar Budaya maka pariwisata akan lumpuh dan tidak memiliki daya tarik untuk dikunjungi.

### Daftar Pustaka

- Armanda, Lucki. 2010. "Benda Cagar Budaya Sebagai Aset Daerah Kota Sabang" dalam Kudungga Buletin Pelestarian Cagar Budaya, Seri Informasi Kepurbakalaan Nomor 1 Edisi X Januari–Juni 2010. Samarinda: Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda.
- Kasnowihardjo, Gunadi. 2002. Manajemen Sumber Daya Arkeologi. Makassar: Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin (LEPHAS).
- Soekadijo, R.G. 2000. Anatomi Pariwisata (Memahami Pariwisata Sebagai "Systemic Linkage"). Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Susilowati, Nenggih. 2010. "Sumberdaya Arkeologi Di Simatulung dan Sekitarnya Peluang Pemanfaatannya Bagi Pengembangan Pariwisata Budaya" dalam Kudungga Buletin Pelestarian Cagar Budaya, Seri Informasi Kepurbakalaan Nomor 1 Edisi X Januari–Juni 2010. Samarinda: Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda.



## Kanal Kuno Candi Muara Jambi: Mitigasi Banjir Musiman Di Situs Candi Muara Jambi

Oleh :  
Asyhadi Mufsi Sadzali, M.A  
Musawira

### Abstrak

Kawasan percandian Muarajambi telah disebut dalam catatan perjalanan It-Sing menuju Nalanda pada abad ke-VII M. Kawasan yang diduga mahavihara ini terdiri dari ±80 *menapo* (gundukan tanah yang diduga struktur candi), serta beberapa candi yang telah dipugar yakni, Candi Gumpung, Candi Gumpung II, Candi Tinggi, Candi Tinggi I, Candi Kembar Batu, Candi Astano, Candi Gedong I dan II dan Candi Kedaton. Keletakannya secara administratif berada di Kabupaten Muara Jambi, Kecamatan Marosebo, Desa Muara Jambi, pada 103° 22' BT hingga 103°45 "BT dan 1° 24' LS hingga 1°33' LS. Pempatan candi-candi berlatar belakang agama Budha Wajrayana ini terhampar disepanjang DAS Batanghari, dan sangat sesuai dengan aturan pendirian candi yang termuat dalam kitab Manasara silpasastra. Pada perkembangannya, kerusakan lingkungan di Hulu serta kerusakan fungsi jaringan kanal dikawasan ini, kemudian mengancam beberapa candi di Muara Jambi pada setiap tahunnya atas serangan banjir musiman; banjir pada awal tahun dari bulan Januari sampai Maret dan di akhir tahun dari bulan November sampai Desember. Melalui metode observasi dan pendataan titik rawan banjir, maka dicoba menganalisis faktor penyebab banjir musiman yang kemudian dijadikan landasan dalam merancang mitigasi banjir musiman di kawasan Candi Muara Jambi.

Kata kunci: *kanal kuno, banjir, mitigasi, Candi Muara Jambi*

### A. PENDAHULUAN

Bulan September senantiasa identik sebagai pembuka bulan musim penghujan. Aliran sungai pun meluap dan mengalir lebih deras dari biasanya, bahkan tidak jarang meluap ke daratan. Rumah tergenang, jalanan terendam, lumpur menebal, yang pada akhirnya menghambat aktifitas bahkan membawa kerusakan,

sehingga masyarakat menyebutnya sebagai bencana. Pada pemahamannya bencana berarti peristiwa yang mengancam dan membawa kerusakan bagi kehidupan masyarakat. Kerusakan yang ditimbulkannya juga cukup beragam, mulai dari kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga dapat merusak benda cagar budaya seperti percandian yang





Sungai Batanghari memiliki anak-anak sungai seperti; Sungai Amburan Jalo, Sungai Seno, Sungai Berembang Hulu, dan Sungai Kemingking. Perbedaan antara kanal kuno Muara Jambi dengan anak-nak sungai Batang Hari jelas terlihat dari bentuknya yang teratur, cenderung lurus, bersilangan, dan mengalir relatif sejajar dengan sungai induk. Kanal tersebut oleh masyarakat lokal disebut juga dengan sungai; antara lain Sungai Terusan, Parit Sekapung, Parit Johor, Sungai Jambi, Sungai Melayu, dan Sungai Buluran. (Atmojo, 2001: 98). Kanal-kanal kuno Muara Jambi secara teratur mengelilingi kawasan candi Muara Jambi yang setidaknya terdapat 82 *menapo* (gundukan tanah yang diduga struktur candi) dan  $\pm 15$  candi yang telah di pugar.

Percandian Muara Jambi selaku *tentative list* warisan dunia, dan warisan cagar budaya tingkat nasional, pada musim hujan kerap mendapat ancaman oleh limpahan air dari sungai Batang Hari. Setidaknya terjadi dua kali banjir dalam satu tahun. Kondisi ini tentunya relah mendapatkan perhatian dari *stakeholder* terkait, namun pada beberapa titik dan kondisi masih terjadi penggenangan. Berangkat atas persoalan tersebut, maka muncul beberapa rumusan masalah, yakni:

1. Hal apa yang menyebabkan banjir di

Kawasan Percandian Muara Jambi?;  
2. Bagaimanakah penganggulangan dalam banjir musiman di Kawasan Candi Muara Jambi?

## B. METODE PENELITIAN

Kawasan Percandian Muara Jambi tersusun dari dua poin penting objek material, bangunan candi beserta tinggalan dan nilai-nilai pentingnya, dan jaringan kanal kuno yang mengelilingi kawasan Percandian. Kanal-kanal inilah yang dahulu dijadikan sebagai simbol kosmologis dalam konteks Budhisme, serta difungsikan sebagai media transportasi antar candi dan juga dianggap sabuk pengamanan kawasan yang disucikan (Rusmiyati, 2014: 88).

Pada konteks arkeologi, jaringan air di kawasan Muarajambi terdiri dari anak sungai Batanghari (buluran), kanal, rawa (payau), danau musiman, dan kolam buatan. Sungai Batanghari dinobatkan sebagai sungai terbesar di pulau Sumatera serta menjadi induk dari beberapa anak sungai yang melmbelah wilayah percandian Muara Jambi. Mengingat bentuknya dan sifat alirannya yang alami dan senantiasa mengikuti pola kontur tanah, maka tidak semua anak sungai dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sakral dan profan candi Muara Jambi. Atas alasan tersebut, maka dibentuk kanal-kanal buatan yang dihubung-



kan dengan sungai dan parit-parit buatan yang ada di Situs Muarajambi. Jaringan air bersifat alami maupun buatan (kanal) pada akhirnya menciptakan suatu jaringan yang saling terhubung antar sungai, kanal, parit, danau, batan dan rawa (Widiatmoko, 2015: 123).

Pembentukan tata air berakibat berubahnya keadaan permukaan air tanah di daerah ini. Air tanah di Muara Jambi merupakan jenis air tanah dangkal, dengan kedalaman muka air tanah pada musim penghujan berkisar antara 0,5 - 2 mdpl. Kondisi ini disebabkan material penyusun akuifer yang sebagian besar berstruktur halus hingga lempungan (Tim Gabungan Inventarisasi dan Pemetaan Terintegrasi Peninggalan Kepurbakalaan Kerajaan Sriwijaya di Muarajambi, 1984: II.6). Investigasi persoalan air tanah dan banjir musiman di kawasan Muara Jambi dilakukan dalam beberapa tahapan penelitian; dimana konteks penelitian sebagai kegiatan sistematis untuk menemukan, mengembangkan, dan mengaji ilmu pengetahuan dengan metode-metode ilmiah (Winardi, 1986: 50). Kegiatan sistematis yang digunakan meliputi; studi pustaka, perekaman data lapangan, pengolahan data, pembuktian hingga produksi pengetahuan teoritis (Neustupny, 1993: 5).

Pada tahapan pengumpulan data lapangan, dilakukan pengamatan langsung lokasi rawan banjir, selanjutnya mendokumentasikan, mengukur kedalaman kanal dan anak sungai, mengukur lebar juga elevasi sungai dan kanal, rawan banjir musiman dengan menggunakan GPS. Data lain yang dikumpulkan yakni kecepatan arus, dan volume air. Data lapangan tersebut juga didukung dengan deskripsi gambaran lingkungan lokasi rawan banjir. Akumulasi data selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dalam bentuk tabel, peta, dan secara deskriptif terkait lokasi rawan banjir, penyebab persoalan dan tawaran solusi penanggulangan.

### **C. KANAL MUARA JAMBI YANG RAWAN BANJIR MUSIMAN**

#### **1. Sungai/Kanal Selat**

Sungai Selat merupakan rangkaian aliran Sungai Jambi, Danau Kelari dan Parit Buluran Dalam. Ditinjau dari keletakannya Sungai Selat sendiri letaknya paling ujung timur dan merupakan aliran yang langsung bertemu dengan Sungai Batanghari, kondisi lingkungan di sekitar Sungai Selat banyak ditanami pohon karet dan tanaman kebun masyarakat setempat. Warna air pada sungai selat berwarna kuning kecoklatan dengan bercampur lumpur yang mengendap di dasar Sungai Selat. Sungai Selat



mempunyai peran yang sangat penting karena aliran kanal-kanal kuno di Kawasan Percandian Muara Jambi kemungkinan besar berawal dari Sungai Selat ini. Sungai Selat sampai sekarang masih berfungsi sebagai jalur transportasi dan kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat untuk pergi ke kebun dan mencari ikan.

Orientasi Sungai Selat timur ke barat dengan kedalaman 167 cm dan lebar 3 meter. Sungai Selat mempunyai cabang-cabang aliran sungai yang mengelilingi Candi Astano seperti Parit Buluran Dalam dan Parit Buluran Pakuh. Potensi ancaman situs pada sungai selat ini terdapat di Candi Astano. Pada saat volume air kiriman dari Sungai Batanghari ke sungai selat cukup besar maka Candi Astano mengalami banjir hingga sampai pagar luar. Kondisi ini cukup memperhatikan karena menurut informan kunci bahwa setiap tahunnya di situs ini mengalami ancaman banjir sehingga terancam kelestariannya. Jarak sungai selat ke Candi Astano pada terakhir banjir tahun 2017 berkisar 65 meter berdasarkan pengukuran dilapangan, sedangkan jarak dari Sungai Selat ke Candi Astano 70 meter dengan kedalaman banjir 2-3 meter. Dapat diperkirakan bahwa Candi Astano rawan banjir pada saat Sungai Batanghari meluap dan debit air pada Sungai Selat tidak mampu



Foto 1. Banjir di pagar luar Candi Astano  
(Sumber Abdul Haviz)



Foto 2. Candi Astano pada saat Banjir 2017  
(Sumber: Abdul Haviz)

Elevasi Didalam Sungai	Elevasi Diluar Sungai	Kedalaman	Lebar
9 m	12 m	170 cm	3 m
S 01° 28' 31,08 E 10340'45,4	S 01° 20' 231,5 E 10340'45,0		

Tabel .1 Elevasi Sungai Selat

menampung kiriman dari Sungai Batanghari.

## 2. Kanal/Parit Duku

Parit Duku merupakan anak sungai yang bercabang langsung ke Sungai Jambi. Parit Duku terletak di sebelah selatan Candi Gedong 1 dan Gedong II. Parit ini cukup panjang dan mengelilingi beberapa *menapo* di antaranya Menapo Rifai, Sang-



kar Ikan, Kandang Kerbau, Remah, Sungai Jambi. Keadaan Parit Duku sudah tidak berfungsi sebagai mana harusnya, di parit ini terjadi pendangkalan yang cukup parah karena pada musim kemarau parit ini tidak ada aliran air dan menjadi jalan setapak bagi masyarakat lokal yang berkebun di sekitar Parit Duku. Di sekitar Parit Duku banyak di tumbuh tumbuhan rumput liar dan terdapat kebun masyarakat lokal yang membuka lahan perkebunan seperti karet, coklat, duku dan sawit.



Foto 3. Kondisi Parit Duku

Parit Duku mempunyai lebar 162 cm dan kedalaman dari parit ini 110 cm, masalah yang ada pada musim penghujan adalah air yang tergenang tidak dapat keluar dari Parit Duku ini di karenakan tertutupnya jalan air yang mengalirkan air ke Sungai Jambi imbasnya air tergenang di sekitar menapo contohnya Menapo Rifai. Di dalam Parit Duku mempunyai elevasi sebagai berikut:

Elevasi Didalam Parit	Elevasi Diluar Parit	Kedalaman	Lebar
Titik 1: 13m S 01°28'41,08 E 10339,40,6	15 m S 01°28'41,5 E 10339,40,8	245cm (ada air)	500cm
Titik 2: 13m S 0128,39,1 E 10339,40,5	15m S 0128,39,0 E 10339,40,5	110cm (pedangkalan)	162 cm
Titik 3: 13m S 0128,38,5 E 10339,38,8	14m S 0128,38,5 E 10339,38,8	165 cm (pedangkalan)	160cm
Titik 4: 11m S 0128,38,6 E 10339,38,2	13m S 0128,38,6 E 10339,38,2	Tergenang air karna hujan 120cm	155cm
Titik 5: 11m S 0128,39,6 E 10339,38,0	12m S 0128,39,6 E 10339,38,0	50 cm (pedangkalan)	130cm
Titik 6: 10m S 0128,41,8 E 10339,38,1	11m S 0128,41,8 E 10339,38,1	245 cm (ada air)	500cm

Tabel 2. Elevasi Parit Duku

### 3. Kanal/Sungai Jambi

Sungai Jambi terletak di selatan Candi Gumpung, mulai dari Danau Kelari, Sungai Terusan dan alirannya berakhir di Sungai Selat kemudian bermuara di Sungai Batanghari. Aliran sungai ini dari Barat ke arah hilir (Timur). Pada masa lalu diduga aliran sungai ini digunakan sebagai penghubung antara bangunan candi satu dengan candi lainnya. Untuk sekarang sungai ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai sarana transportasi untuk pergi berkebun. Pada kanan dan kiri sungai banyak ditumbuhi tanaman. Tanaman yang paling banyak adalah karet/para (*Hevea brasiliensis*), Selain itu juga ditumbuhi tanaman Pisang (*Musa*

*Paradisiaca*). Sedangkan di sungai ini sendiri di tumbuhinya pula tanaman air enceng gondok (*E. Crassipes*) dan rumput.



Foto 4. Aliran sungai Jambi dan vegetasi

Aliran sungai ini memiliki cabang ke arah utara yang bernama Sungai Melayu. Untuk sekarang Sungai Jambi telah mengalami normalisasi dari tumbuhan air. Lebar Sungai Jambi lebih kurang 10 meter dan kedalaman air 2,45 meter. Namun untuk sungai yang berada di bagian Selatan Candi Gumpung sampai Candi Kembar Batu tidak mengalami normalisasi sehingga ukuran sungai mengecil dan bahkan mengalami sedimentasi bahkan terputus.

Pada musim penghujan Sungai



Foto 5 Percabangan sungai Jambi dan Melayu

Jambi sering mengalami peluapan ke daerah sekitar, yang mana mengancam candi dan ada beberapa *menapo* yang terkena dampak tersebut. Candi Kedaton dan Candi Kembar Batu yang berada di sekitar sungai Jambi sering mengalami ancaman banjir tahunan, oleh karenanya kami melakukan survei situs dan elevasi pada Sungai Jambi.

Elevasi Sungai Kedaton	Elevasi Titik Banjir Terakhir	Elevasi Di Luar Pagar Kedaton	Elevasi Di Dalam Pagar Kedaton
6 m	8 m	8 m	9 m
S 0128,42,6	S 0128,41,8	S 0128,41,4	S 0128,41,2
E 10338,40,9	E 10338,40,7	E 10338,40,8	E 10338,40,6

Tabel 3. Elevasi Sekitar Candi Kedaton

Selain elevasi kami juga mengukur jarak banjir terakhir dengan bangunan/pagar candi. Jarak banjir terakhir pada Candi Kembar Batu berjarak 25 m. Untuk Candi Kedaton air pada saat terjadi banjir berjarak 15 meter.

Elevasi Didalam Sungai Jambi Sekitar Candi Kembar Batu	Elevasi Diluar Sungai Jambi Sekitar Candi Kembar Batu	Elevasi Titik Banjir Terakhir Di Candi Kembar Batu
5 m	8 m	10 m
S 01' 28' 43,3	S 01' 28' 43,3	S 01' 28' 41,8
E 10340'16,9	E 10340'16,7	E 10340'16,8

Tabel 4. Elevasi sekitar Candi Kembar Batu

#### D. PENYEBAB BANJIR DI KAWASAN PERCANDIAN MUARA JAMBI

Banjir pada dasarnya merupakan produk dari suatu sistem daerah aliran sungai yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor fisik berupa daerah aliran sungai maupun dari hujan sebagai sumbernya. Perubahan



penggunaan tanah juga mengakibatkan berubahnya fungsi tata guna lahan, selain itu faktor curah hujan yang tinggi serta saluran sungai yang mengecil akibat adanya pendangkalan juga memicu terjadinya banjir. Kodoatie dan Syarief (2006) juga menjelaskan faktor penyebab banjir bias juga akibat pembuangan sampah, erosi dan sedimentasi, sistem pengendalian banjir yang tidak tepat, curah hujan tinggi, fisiografi sungai, kapasitas sungai yang tidak memadai, pengaruh air pasang, penurunan tanah, kerusakan bangunan pengendali banjir.

Di Kawasan Percandian Muara Jambi, faktor penyebab banjir dipengaruhi oleh faktor kondisi dan peristiwa alam, curah hujan yang tinggi, terjadi penyempitan sungai dan pendangkalan sungai, serta adanya aktivitas masyarakat melakukan perubahan penggunaan lahan disekitar situs Muara Jambi.

Bulan	Jumlah Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)
(1)	(2)	(3)
Januari	20	130,5
Pebruari	19	130,9
Maret	20	321,0
April	23	192,0
Mei	14	200,0
Juni	9	103,0
Juli	9	54,0
Agustus	10	26,0
September	2	15,0
Oktober	5	56,0
Nopember	23	239,0
Desember	17	257,0

Tabel 4. Rata-Rata Jumlah Hujan Dan Curah Hujan Setiap Bulan Di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015. Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Jambi

Tabel diatas memberikan gambaran tingkat curah hujan yang tinggi terjadi pada bulan Januari, Maret, April, dan November. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan debit air yang lebih dari pada kapasitas/daya tampung alur sungai/kanal sehingga menimbulkan limpasan dan banjir pada dataran banjir. Penyempitan dan pendangkalan kanal juga menjadi penyebab banjir musiman. Proses penyempitan dan penangkalan ini pertama dimulai ketika debit air saat banjir bertambah, lalu volume air yang bertambah banyak kemudian meluap kepermukaan, selanjutnya air permukaan mengalir membawa tanah yang tererosi, sehingga akhirnya ketika musim kemarau endapan tanah mengering dan sungai menjadi dangkal menyempit. Alhasil jaringan kanal pada musim hujan selanjutnya tidak lagi berfungsi dengan baik.

Penyebab bajir musiman lainnya yakni perubahan penggunaan lahan; ketika perubahan lahan berubah fungsi menjadi lahan bervegetasi jarang, lahan terbuka, di mana air hujan yang jatuh tidak dapat meresap air dan sebagian besar akan menjadi limpasan permukaan. Merujuk kepada Verrina (2013) bahwa lahan yang bervegetasi lebat akan menyebabkan



sebagian besar hujan akan meresap kedalam tanah dan menjadi simpanan air tanah, sehingga jumlah aliran permukaan menjadi sedikit.

## E. Mitigasi Banjir di Kawasan

### Percandian Muarajambi

Candi Kembarbatu merupakan salah satu candi yang rawan akan banjir musiman akibat luapan air dari kanal/sungai Jambi. Situs ini berbatasan dengan Candi Tinggi I dan Kolam Telago Rajo di sebelah barat, menapo Kemuning dan Parit Johor di sebelah utara, dan Sungai jambi di sebelah selatan. Kompleks Candi Kembarbatu berada lebih tinggi 2,5 s.d 3 m dari dataran sekitarnya. Permukaan kompleks candi diduga ditinggikan dengan menggunakan tanah dan galian parit keliling yang berada disisi barat, selatan dan sisi utara candi. Potensi ancaman pada candi Kembar Batu berupa banjir musiman yang sering terjadi di awal tahun dan di penghujung tahun.

Penimbunan sedimentasi lumpur di kanal/sungai Jambi membuat aliran kanal menjadi terputus dan terjadi penumpukan lumpur. Akibat saat musim hujan tiba luapan air dari kanal/sungai Jambi hampir memasuki komplek Candi Kembarbatu. Kondisi aliran kanal/sungai jambi saat ini telah mengalami pendangkalan yang tinggi, bahkan telah me-

munculkan daratan yang oleh masyarakat sekitar memanfaatkannya untuk menanam sayuran. Mitigasi yang ditawarkan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan di Candi Kembarbatu adalah memperbaiki saluran kanal.sungai jambi yang sudah mengalami pendangkalan untuk memperlancar aliran air sewaktu musim peng hujan. Media pendukungnya, dapat ditambahkan bank air yang akan membantu menampung luapan air, serta dapat berfungsi sebagai sumber air cadangan saat musim kemarau tiba. Lokasi penempatan bank air bisa ditempatkan sebelah selatan sungai jambi, dengan catatan pembuatan bank air terlebih dahulu melewati prosedur kajian arkeologis untuk menghindari perusakan kemungkinan adanya temuan di sekitar bank air.

Adapun Candi kedua yang rawan terkenal banjir musiman adalah candi Kedaton. Candi kedaton berada disebelah utara kanal/sungai Jambi dan Melayu. Jarak antara kanal/sungai jambi dan melayu dengan pagar terluar cadni kedaton sekitar 8 m, sehingga cukup mengkhawatirkan apabila musim hujan tiba. Adapun beberapa tawaran penanggulangan dan antisipasi meluapnya kanal/sungai jambi dan melayu ke areal candi Kedaton yakni sebagai berikut:

1. Perbaiki pintu air utara Candi Kedaton, sehingga dapat berfungsi de-



ngan baik untuk membatasi air yang masuk dari arah rawa ke kanal/sungai Jambi.

2. Meninggikan permukaan tanah yang dilengkapi tarup di sekitar jalan setapak yang berbatasan dengan kanal/Sungai Jambi.
3. Menanam pohon-pohon yang berfungsi sebagai penyerap air seperti kelapa.
4. Melakukan pendalaman/normalisasi kanal/sungai jambi dan melayu.



Foto 6. Pintu Air selatan Candi Kedaton

Candi Astano merupakan candi ketiga yang masuk dalam daftar rawan terkena banjir musiman. Sumber masalah di Candi Astano pada musim penghujan datang dari luapan air kanal/sungai Selat yang tidak lagi mampu menampung kiriman air dari Sungai Batanghari. Kondisi ini hampir terjadi setiap tahun, dan tentu sangat membahayakan Candi Astano. Adapun mitigasi yang ditawarkan adalah membuat bendungan air di muara Sungai Selat yakni sekitar ±500 meter dari DAS Batanghari. Kanal/sungai Selat sudah tidak mampu menampung luapan air dari DAS

Batanghari, sehingga menyebabkan banjir. Olehkarena itu perlu adanya bendungan di muara kanal/sungai selat untuk mengontrol air yang masuk dari DAS Batanghari maupun yang keluar menuju DAS Batanghari. Normalisasi kanal/sungai selat juga sangat di butuhkan pada parit yang bercabang langsung dengan Sungai Selat, sehingga bila kontrol air tidak mampu menampung luapan dari Sungai Batanghari, parit-prot yang sudah di normalisasi dapat membantu mengalirkan luapan air ke aliran kanal yang lain.

## F. PENUTUP

Kompleks percandian Muara Jambi yang sejak pendiriannya di abad ke-IX M telah dilengkapi dengan jaringan kanal untuk menjawab tantangan lingkungan sekitarnya yakni luapan DAS Batanghari pada musim penghujan. Pada perkembangannya setelah kurang lebih tidak difungsikan dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sekitarnya, kanal/sungai buatan ini mengalami pendangkalan serta penyempitan aliran. Alhasil pada musim penghujan setiap tahun kanal-kanal ini meluap dan tidak mampu menampung debit air yang datang dari sungai Batang Hari. Kanal dan sungai ini yang awalnya dibuat untuk melindungi kawasan candi dari luapan DAS Batanghari,



justru berbalik menjadi ancaman. Terdapat beberapa situs yang dikategorikan rawan dan terancam akan banjir musiman, yakni; Candi Astano, Candi Kembar Batu, dan Candi Kedaton. Penanganan intensif dan preventif harus segera dilakukan; baik melaku-

kan normalisasi kanal secara periodik dan terencana, pembuatan bendungan air, pembautan bank air, serta melakukan reboisasi pada hulu DAS Batanghari sehingga meminimalisir debit air dan lumpur bawaan disaat musim penghujan.

### Daftar Pustaka

- Anonim. 2012. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Jakarta: BNPB
- Atmodjo, Junus Satrio. 2001. "Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Distribusi Komoditas Perdagangan di Kawasan Pedalaman dan Pesisir Jambi Abad XI-XIII: Sebuah Tinjauan Arkeologi". Tesis. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- BP3 Jambi. 2009. "Laporan Studi Penjajakan Menapo Pelayangan Situs Muarajambi". Jambi: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, BP3 Wilayah Kerja Provinsi Jambi, Sumsel, Bengkulu, dan Kepulauan Babel.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. "Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 259/M/2013. Tentang Satuan Ruang Geografis Muarajambi Sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional".
- Kodoatie, Robert, J dan Roestam Sjarief. 2006. Pengelolaan Bencana Terpadu. Penerbit Yarsif Watampone: Jakarta.
- Modul Piami XVI. Yogyakarta: 2016
- Neustupny, E. 1993. Archaeological Method. New York: Cambridge Univ. Press.
- Rusmiyati. 2014. "Museum Situs di Kawasan Muarajambi". Tesis, Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Soewarno. 1991. Hidrologi: Pengukuran dan Pengelolaan Data Aliran Sungai (hidrometri). Bandung: NOVA. Hal: 23
- Soewarno. 1991. Hidrologi: Pengukuran dan Pengelolaan Data Aliran Sungai (Hidrometri). Bandung: NOVA. Hal: 32.
- Verrina, Gina Putri. 2013. Analisa Run-off Pada Sub Das Lematang Hulu. Universitas Sriwijaya: Palembang.
- Widiatmoko, Agus. 2015. Situs Muarajambi Sebagai Mahawihara pada Abad 7-9 Masehi. Disertasi, Depok: Fakultas Sastra Indonesia.
- Winardi. 1986. Pengantar metodologi research. Bandung: Alumn.



## Senjata, Kemaluan, dan Nisan: Semiotika Budaya Pesan Penjaga Makam Daeng Mangkona untuk Perantau

Oleh : Syamsul Rijal

### Abstrak

Pesan penjaga makam Lamohang Daeng Mangkona untuk para perantau harus dipahami secara denotasi dan konotasi. Makna denotasi dan konotasi ini sesuai dengan teori semiotika yang dikemukakan oleh Roland Barthes, yakni makna yang berlapis-lapis yang terdapat dalam petanda. Secara deskriptif kualitatif, pesan tersebut dapat dijelaskan secara semiotika budaya. Pertama, senjata, yang tidak hanya dipahami sebagai sebuah benda atau alat pertahanan diri, tetapi juga dimaknai sebagai ilmu yang harus dimiliki seseorang sebelum merantau. Kedua, kemaluan bukan berarti alat kelamin manusia, tetapi bentuk perilaku atau etika yang harus dijaga ketika berada di tempat perantauan. Ketiga, nisan yang disimbolkan sebagai jejak kebaikan sebaiknya selalu ditanamkan di tempat perantauan.

### A. Pendahuluan

Menurut sejarah, Kota Samarinda tidak dapat dilepaskan dari nama Lamohang Daeng Mangkona. Lamohang Daeng Mangkona merupakan seorang perantau dari Tanah Bugis (Wajo) Sulawesi Selatan. Hasil Perjanjian Bongaya antara Belanda dan raja-raja di Sulawesi Selatan membuat Lamohang Daeng Mangkona geram dan memilih meninggalkan kampung halamannya. Pelayarannya ke tanah Borneo berakhir di sebuah delta sungai besar, yakni Sungai Mahakam. Lamohang Daeng Mangkona bersama rombongan bermukim di salah satu wilayah aliran Sungai Mahakam yang bernama Tanah Rendah lalu meminta izin Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura untuk

mendirikan perkampungan di sana. Kehadiran Lamohang Daeng Mangkona dan rombongannya yang berangkat pada 1668 dicatat sebagai tahun berdirinya Kota Samarinda (id.wikipedia.org)

Bukti sejarah kehadiran Lamohang di Kutai dapat dilihat dengan peninggalan makam yang kini dijaga dan dirawat oleh salah seorang keturunan Bugis. Tepatnya di Kecamatan Samarinda Seberang, Makam Lamohang Daeng Mangkona dan rombongannya ditemukan oleh Ayah dari Abdillah (juru kunci makam Daeng Mangkona). Menurut Abdillah, sebelum masyarakat luas mengetahui keberadaan makam ini, masyarakat di sekitar Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang sering menye-



but pemilik makam dengan nama Petta Pute.



Foto 1. Makam Lamohang Daeng Mangkona di Samarinda Seberang

Kedatangan Daeng Mangkona di Borneo, khususnya di Tanah Kutai menyimpan banyak cerita yang menghubungkan antara orang Bugis dan suku-suku di Pulau Kalimantan. Salah satu hal menarik dan khas bagi orang Bugis adalah kebiasaan berlayar atau merantau ke pulau lain. Sejalan dengan kebiasaan merantau ini, sering didengar petuah oleh leluhur Bugis bagi anak cucunya untuk menjaga tiga hal. Ketiga hal tersebut adalah ujung badik, ujung lidah, dan ujung kemaluan. Filosofi tiga ujung tersebut menjadi simbol pengingat orang-orang Bugis dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari (Rijal, 2016).

Yang lebih menarik lagi, muncul versi rantau tentang tiga hal yang perlu dijaga orang Bugis. Ketika berkunjung dan berziarah ke makam Lamohang Daeng Mangkona di Samarinda Seberang, Abdillah, penjaga makam Daeng Mangkona menjelaskan pan-

jang lebar tentang sejarah kedatangan Daeng Mangkona di Samarinda. Salah satu yang menarik dari perbincangan itu, penjaga makam tersebut menjelaskan tiga pesan yang perlu dijaga ketika hendak merantau. Ketiga hal tersebut berbeda dengan tiga filosofi yang sering didengar di Tanah Bugis (Rijal, 2016).

Sedikit berbeda dengan filosofi tiga ujung yang disebutkan di atas, Abdillah yang merupakan anak dari penemu makam Lamohang Daeng Mangkona menyampaikan tiga hal yang perlu dijaga dan dibawa saat hendak merantau ke negeri orang. Hal tersebut berkaitan dengan benda-benda yang sering menyertai orang Bugis ketika merantau. Benda tersebut adalah senjata, kemaluan, dan nisan. Secara filosofis, ketiga benda tersebut mengandung makna-makna simbolis yang universal. Benda itu tidak hanya dapat digunakan orang Bugis, tetapi juga dapat menjadi filosofi tambahan bagi seluruh masyarakat perantau di mana pun berada. Sebab itu, ketiga benda tersebut dinilai bermanfaat untuk diketahui semua orang setelah dijelaskan secara semiotika budaya (Rijal, 2016).

## B. Semiotika Budaya

Benda-benda bersejarah yang disimpan dan dipelihara masyarakat sebagai pusaka tentu memiliki makna



khusus bagi pemiliknya. Hubungan antara benda dengan makna yang dikandung merupakan rahasia kultural dipertahankan secara mitologi oleh kelompok masyarakat tertentu. Dalam benda-benda tersebut, terdapat kode-kode atau tanda yang berkorelasi dengan tanda lain hingga membentuk satu ikatan makna.

Dalam semiotika, kode-kode tersebut dianggap sebagai sinyal-sinyal tertentu yang dapat mengandung dan menyampaikan makna tertentu (Eco, 1976:74). Selanjutnya, “kode-kode tersebut menyediakan syarat-syarat rumit yang saling terkait dan berpengaruh antara berbagai tanda” (Eco, 1976:81). Tanda atau kode tersebut merupakan internalisasi budaya satu masyarakat yang menyepakati dan memelihara maknanya.

Semiologi atau semiotika memang erat dengan kajian makna. Oleh karena itu, Barthes juga mengartikan semiotika sebagai ilmu tentang pesan-pesan sosial atau pesan-pesan kultural yang melingkungi suatu teks (Barthes, 2007:264). Selain itu, semiotika sering dipahami secara ringkas sebagai ilmu tentang tanda. Seperti yang dikemukakan oleh Berger (2015: 1), bahwa “tanda adalah sesuatu yang dapat menambah dimensi yang berbeda pada sesuatu, dengan memakai apa pun

yang dapat dipakai untuk mengartikan sesuatu hal lainnya”.

Roland Barthes menjelaskan cara kerja semiotika dengan memaknai suatu teks (benda, tulisan, atau kode-kode lain) berdasarkan hubungan makna antara pengalaman personal dan kultural penggunaanya (Kriyantono, 2007:268). Konsep ini kemudian disebut Barthes sebagai dua sistem signifikasi, yakni denotasi dan konotasi. Denotasi dianggap sebagai makna level pertama, yang dimaknai secara deskriptif, literal, dan secara kasat mata terdapat dalam setiap organisasi kebudayaan. Level kedua, dimaknai secara konotasi yang mengaitkan penanda dengan aspek-aspek kultural. Penanda tersebut mengalami proses asosiasi makna dengan tanda atau kode lain (Barker, 2009:74). Makna konotasi inilah yang membuat sebuah tanda memiliki makna yang berlipat ganda, sehingga dikenal dengan istilah lapis pertama dan lapis kedua.

Makna denotasi adalah makna langsung yang dikandung suatu tanda. Makna tersebut biasa disebut pertanda. Sementara, makna konotasi adalah makna tidak langsung yang terbungkus oleh kebudayaan pemilik tanda tersebut. Karena makna konotasi selalu terbungkus makna kultural, tanda-tanda tersebut akhirnya ditangkap sebagai mitos atau petunjuk ten-



tang sesuatu. Perwujudan mitos-mitos itulah yang berpengaruh kuat secara kultural dalam satu masyarakat (Berger, 2015:65).

Mitos bekerja pada level kedua lapis makna semiotika berdasarkan sistem semiotik level pertama. Semiotik level dua mengambil seluruh sistem tanda dari level pertama, baik bentuk maupun penandanya. Oleh karena itu, mitos merupakan semacam sistem ganda dalam sistem semiotik yang terdiri atas sistem linguistik dan sistem semiotik (Sunardi, 2004:81).

### C. Pembahasan

Rekonstruksi budaya memang perlu dilakukan untuk melihat makna-makna yang tersembunyi di balik satu benda yang sering digunakan sebagai simbol. Hal ini penting sekali, sebab nenek moyang kita banyak menyimpan rahasia-rahasia yang berisi pelajaran hidup melalui benda-benda yang disakralkan atau dikeraamatkan. Demikian halnya tiga benda yang dipesankan untuk perantau oleh penjaga makam Lamohang Daeng Mangkona, tentu menyimpan makna-makna simbolik yang perlu dikaji diketahui oleh banyak orang.

Pertama, benda tersebut adalah senjata. Mendengar kata senjata, secara sepintas sangat mengerikan. Akan tetapi, secara semiotik,

senjata menyimpan banyak makna filosofis bagi seorang perantau. Senjata memang identik dengan adu fisik, perkelahian, peperangan, dan bahkan senjata sangat identik dengan perbuatan kriminal. Akan tetapi, senjata dapat bermakna positif jika ditempatkan sesuai fungsinya sebagai alat pertahanan diri (Rijal, 2016).

Sementara pada sisi yang lain, sebelum kita sampai pada pertahanan diri, senjata merupakan simbol ke-siap siagaan kita menghadapi segala masalah. Pada era modern ini, saat hukum positif sudah menjadi pengadilan tertinggi, senjata tidak dapat lagi dibawa ke mana-mana. Namun, ada nilai-nilai budaya yang dapat menjadi pegangan di balik kata senjata ini. Mendengar kata senjata, orang Bugis langsung mengasosiasikan dengan benda yang bernama badik. Orang Bugis menyebut badik dengan nama *kawali*.

Selain tombak dan keris, badik masih lebih populer di kalangan masyarakat Bugis. Selain bentuknya yang unik dan khas, badik juga lebih mudah dibawa ke mana-mana, serta lebih mudah disimpan. Hal ini disebabkan ukuran badik yang kecil sehingga mudah disimpan di berbagai tempat.

Bagi laki-laki Bugis, badik bukan sekadar senjata sebagai alat pertahanan, tetapi dapat berfungsi sebagai



benda yang multifungsi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya jenis-jenis badik yang berbeda fungsi. Ada badik yang berfungsi sebagai alat atau simbol keselamatan. Jika seseorang membawanya, makanya diyakini dia dapat terhindar dari masalah, termasuk masalah kriminal. Ada pula yang berfungsi sebagai pembawa rezeki. Badik sejenis ini biasanya digunakan dalam berniaga. Tentu fungsi badik ini tidak lagi sepenuhnya sebagai senjata untuk melawan musuh. Ada pula badik yang digunakan khusus untuk keamanan atau penjaga rumah. Jika badik jenis ini disimpan di rumah, diyakini rumah akan aman dari incaran pencuri.



Foto 2. Badik: Senjata Tradisional Masyarakat Bugis

Masih banyak lagi fungsi badik yang diyakini oleh masyarakat Bugis. Fungsi-fungsi badik biasanya dibedakan berdasarkan pamornya atau berdasarkan cara menempahnya saat dibuat. Bagi orang Bugis, badik dapat memberikan rasa ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran, kemelaratan, kemiskinan, dan bahkan penderitaan bagi yang menyim-

pannya (Chaldot, 2012).

Berdasarkan fungsi badik tersebut, badik sebagai salah satu senjata yang perlu dibawa ketika merantau tidak lagi dapat dimaknai sebagai senjata untuk hal-hal pertahanan fisik. Istilah senjata harus selalu dibawa, dapat dimaknai sebagai ke-siap siagaan menghadapi segala masalah dan musibah. Artinya, sebelum merantau, semua bekal sudah disiapkan. Peralatan dan perlengkapan untuk hidup dan bekerja harus tersedia. Bahkan, senjata dapat dimaknai sebagai ilmu yang melekat pada seseorang, baik ilmu dunia maupun ilmu agama. Jadi, dengan membawa “senjata”, seseorang dianggap siap merantau untuk mencari penghidupan di negeri orang.

Jadi, secara denotatif senjata bermakna alat pertahanan diri atau alat perlindungan. Biasanya juga dipakai untuk menyerang musuh. Akan tetapi, secara konotatif, senjata dimaknai sebagai ilmu atau bekal yang harus disiapkan sebelum merantau.

Kedua, benda yang pasti dibawa ketika merantau, yakni kemaluan. Benda itu tidak kalah mengerikannya dibanding senjata. Sepintas kata kemaluan ini terdengar “nakal” dan urakan. Akan tetapi, Abdillah menjelaskan, lebih lanjut bahwa kata kemaluan bukan mengacu ke makna



organ kelamin, namun lebih bermakna secara perilaku, yakni ke-maluan. Jadi, kemaluan yang dimaksud adalah rasa malu yang harus dibawa serta ketika merantau (Rijal, 2016).

Kata kemaluan sebenarnya mengandung banyak makna secara linguistik dan budaya. Seseorang yang merantau ke kampung orang sebaiknya tidak melakukan perbuatan memalukan. Berperilaku dan berbicara sopan. Malu melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji, antara lain mengemis, mencuri, dan merampok. Bahasa sederhana yang sering didengar adalah “jangan bikin malu-malu di kampung orang” (Rijal, 2016).

Manusia dikatakan makhluk yang berbeda dengan binatang karena memiliki rasa malu. Mungkin juga rasa malu ini sudah tersirat di dalamnya sebagai makna bahwa organ kelamin harus tetap dijaga setiap manusia. Dengan demikian, simbolis makna kemaluan lebih mengacu pada etika sebagai manusia beradab yang harus tetap dijaga kapan dan di mana pun kita berada.

Jadi, secara denotatif kemaluan bisa bermakna sebagai organ tubuh sekaligus sebagai perasaan malu yang harus dijaga setiap orang. Akan tetapi, secara konotatif kemaluan bermakna etika atau perilaku baik dalam pergaulan yang harus dijaga setiap

perantau.

Ketiga, benda yang perlu dibawa adalah nisan. Pesan ini tentang benda ini jarang terdengar bagi banyak kalangan. Bahkan, benda tersebut kedengaran horor dan seram ketika kita sedang merantau. Sepintas mungkin terdengar suram bagi masa depan seorang perantau. Tetapi, di balik itu, nisan mengandung makna filosofi tinggi yang justru akan mengangkat harkat dan martabat kita sebagai manusia.



Foto 3. Nisan Makam Lamohang Daeng Mangkona

Ada beberapa makna simbolis dari nisan yang perlu dijelaskan. Pertama, merantau dengan membawa nisan menandakan kita siap mati di negeri orang. Siap mati, artinya kita telah memiliki berbagai bekal sebelum merantau. Bahkan, siap mati harus diterapkan ketika membela kebenaran dan kejujuran (Rijal, 2016).

Kedua, manusia mati meninggalkan nama. Nama tersebut tertulis di batu nisan. Baik atau buruknya satu nama, bergantung pemilikinya.



Artinya, nisan itu digunakan untuk menulis atau mengukirkan nama baik manusia. Untuk meninggalkan nama baik, seseorang harus melalui proses yang baik dan menciptakan kenangan-kenangan baik, baik berupa benda atau bangunan fisik maupun perbuatan-perbuatan baik yang bermanfaat.

Nisan menyimbolkan jejak kebaikan seseorang. Artinya, perantau tidak hanya mencari penghidupan di negeri orang, tetapi juga harus membangun negeri yang didatangi tersebut. Bukan hanya datang mengeruk kekayaan suatu negeri lalu pergi begitu saja tanpa diketahui jejaknya. Bukan hanya bekerja mencari rezeki di negeri orang, tetapi juga memberikan sumbangsih pemikiran dan pembangunan di negeri yang ditempatinya merantau.

Jadi, secara denotatif, nisan bermakna sebagai tonggak kayu atau batu yang ditanam di atas makam atau kubur sebagai penanda. Akan tetapi, secara konotatif, nisan bermakna nama baik yang ditanamkan di tempat perantauan. Nama baik itu bisa muncul dengan sumbangsih pemikiran dan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Dengan demikian, nama baik pelaku kebaikan akan terus dikenang meskipun telah meninggal dunia.

#### D. Simpulan

Analisis semiotika budaya tentang tiga benda yang perlu dibawa ketika merantau telah memberi pesan penting bagi masyarakat. Pertama, senjata tidak mesti dimakna sepenuhnya sebagai benda tajam untuk mempertahankan diri dan menyerang musuh. Akan tetapi, senjata dapat dimaknai sebagai segala bentuk persiapan kita ketika hendak merantau. Persiapan itu berupa bekal hidup yang dapat dimaknai sebagai ilmu, baik ilmu dunia, maupun ilmu agama. Kedua, kemaluan yang dapat dimaknai sebagai etika dan perilaku yang perlu dijaga ketika berada di tempat perantauan. Ketiga, nisan yang dapat dimaknai sebagai simbol keutuhan hati ketika bekerja di tanah perantauan. Artinya, para perantau wajib melakukan hal-hal baik sebagai sumbangsih pembangunan di tempat rantaunya. Dengan demikian, namanya akan terukir baik dalam batu nisan dan akan dikenang sepanjang masa.



## Daftar Pustaka

- Barker, Chris. 2009. *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Penerjemah: Inyik Ridwan Muzir. Bantul: Kreasi Wacana.
- Barthes, Roland. 2007. *Petualangan Semiotologi*. Penerjemah: Stephanus Aswar Herwinko. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Berger, Arthur Asa. 2015. *Pengantar Semiotika: Tanda-tanda dalam Kebudayaan Kontemporer*. Cetakan ke-4. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Chaldot. 2012. "Makna dalam Badik (Senjata Khas Bugis Makassar)". <http://chaldot-chaldot.blogspot.co.id>. Diakses tanggal 11-09-2017.
- Eco, Umberto. 1976. *Teori Semiotika: Signifikasi Komunikasi, Teori Kode, Serta Teori Produksi Tanda*. Penerjemah: Inyik Ridwan Muzir. Indiana University Press.
- Kriyantono, Rachmat. 2007. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana. [https://id.wikipedia.org/wiki/La\\_Mohang\\_Daeng\\_Mangkona](https://id.wikipedia.org/wiki/La_Mohang_Daeng_Mangkona). Diakses tanggal 11-09-2017.
- Rijal, Syamsul. 2016. "Tiga Ujung untuk Perantau; Senjata, Kemaluan, Nisan". *Pro Kaltim (Kaltim Post)*. Edisi Senin, 16 Mei 2016. [kaltim.prokal.co](http://kaltim.prokal.co). (diakses tanggal 7-09-2017).
- Sunardi, St. 2013. *Semiotika Negativa*. Cetakan III. Yogyakarta: Buku Baik.



## Lamin Pemung Tawai Sebagai Wadah Pertunjukan Seni di Desa Budaya Pampang

Oleh :Nasrullah

### Abstrak

Tulisan ini membahas keberadaan Lamin Pemung Tawai yang ada di Desa Budaya Pampang sebagai ruang pertunjukan. Tulisan ini adalah kajian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi lapangan wawancara, dan penelusuran literatur terkait. Teori yang digunakan adalah fase kebudayaan C.A. van Peursen yang mengangkat tentang strategi kebudayaan.

Adapun hasil kajian mengenai Lamin Pemung Tawai ini adalah ditemukannya perubahan fungsi lamin dari yang dulunya adalah tempat tinggal bersama, menjadi tempat pertunjukan. Selain itu, perubahan fungsi ruang juga mengalami perubahan. Termasuk *pagen* (teras) yang dulu dijadikan sebagai tempat pertemuan para orang tua masyarakat Dayak untuk merumuskan keputusan, kini menjadi ruang pertunjukan sekaligus tempat penonton duduk menyaksikan pertunjukan seni yang dipentaskan. Adapun gejala operasionalisme kebudayaan terlihat dari diadakannya lamin dan aktivitas kesenian di dalamnya sebagai objek wisata. Perubahan-perubahan tersebut ditemukan terutama terkait dengan faktor migrasi dan modernisasi.

### PENDAHULUAN

Lamin Pemung Tawai terletak Desa Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Bagi masyarakat Dayak, termasuk pada masyarakat Dayak Kenyah, *lamin* merupakan sebuah tempat tinggal bersama komunitas masyarakatnya. Namun, itu dulu, dan masih ada pula yang berlangsung sampai sekarang. Lamin, sebagai rumah adat merupakan sebuah wujud kebudayaan artifisial, sebagaimana dikonsepsikan oleh Koen-

tjaraningrat dalam karya antropologinya. Dalam hal ini, lamin bisa dianggap sebagai sebuah wujud budaya berupa benda (artefak) yang bersifat artifisial.

Hadirnya administrasi pemerintah kota Samarinda di daerah yang didiami oleh masyarakat Dayak Kenyah di Pampang menjadikan komunitas masyarakat Dayak ini berada dalam satuan administrasi Negara Indonesia. Pilihan sebagai eksistensi budaya di kalangan masyarakat Dayak Kenyah sendiri dan kepenting-



an pariwisata bagi pemerintah Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur menjadikan Lamin yang terdapat di Desa Budaya Pampang menjadi milik masyarakat Dayak Kenyah sekaligus menjadi klaim pemerintah. Setidaknya aturan berupa peraturan pemerintah kota hadir di sana.

Dengan demikian, tradisi yang dahulunya bersifat kultural sekarang berubah menjadi semi struktural. Kehadiran negara dan pemerintahnya disini menjadi sebuah regulasi sekaligus negosiasi bagi komunitas masyarakat Dayak Kenyah di Desa Budaya Pampang ini. Terutama mengenai orientasi pelestarian budaya dan kepentingan pariwisata.

Cara pandang kebudayaan dari fase mistis ke fase ontologis lalu ke fase fungsional menurut Van Peursen (1988) dapat digunakan untuk melihat perubahan fungsi kebudayaan, termasuk yang ada di Desa Budaya Pampang, Samarinda, Kalimantan Timur. Selain itu, tidak adil jika kita hanya melihatnya dengan cara pandang demikian. Cara pandang post-struktural yang melihat adanya tегangan dan negosiasi dalam praktik berkebudayaan di Lamin Desa Budaya Pampang ini juga memungkinkan untuk digunakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi langsung di lapangan,

penelusuran literatur, dan wawancara dengan narasumber kunci. Adapun metode penyajian dilakukan secara deskriptif analitis. Hasil penelusuran dan pengumpulan data akan dipaparkan kemudian dianalisis menggunakan teori yang terkait dengan perubahan fungsi kebudayaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi, perubahan yang ditimbulkan, serta konsekuensi dari perubahan tersebut akan menjadi hasil penelitian yang ada.

## HASIL DAN ANALISIS

Orang Dayak Kenyah mulai bermukim di daerah Pampang sekitar tahun 1960-an. Namun, mulai ramai sekitar tahun 1980-an. Orang Dayak Kenyah yang ada di Desa Budaya Pampang berasal dari Apokayan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Perpindahan atau migrasi yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Kenyah dari Apokayan ke Pampang, Samarinda bagian Utara ini dalam rangka memperbaiki penghidupan untuk masa depan yang lebih baik. Perpindahan suatu kelompok masyarakat disertai dengan perpindahan sebuah kebudayaan dari daerah asal ke daerah tujuan. Dengan demikian, perpindahan orang Dayak Kenyah dari Apokayan ke Pampang menimbulkan terjadinya migrasi budaya dari Apokayan ke Pampang.

Migrasi dan perpindahan tradisi



budaya orang Dayak Kenyah dari Apokayan ke Pampang terlihat dengan masih dijaganya tradisi kesenian sebagai salah satu wujud dan unsur kebudayaan. Kesenian merupakan sebuah unsur kebudayaan sebagai wujud fisik ataupun artifisial dari sebuah kebudayaan (Koentjaraningrat, 1996: 74-80). Migrasi sebagai sebuah dinamika masyarakat setidaknya menjadikan perpindahan manusia sekaligus sebagai perpindahan budaya (Tirtosudarmo, 1997, 2007). Hal ini pula yang terjadi pada migrasi internal (*internal migration*) masyarakat Dayak Kenyah yang ada di Pampang saat ini.

Setelah bermigrasi dari Apokayan ke Pampang, pada tahun 1990 lamin didirikan atas partisipasi pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Keberadaan lamin ini diharapkan akan menjadi ciri khas budaya masyarakat Dayak Kenyah yang ada di Pampang. Pada tahun 1991 lamin yang sekarang bernama Lamin Adat Pemung Tawai diresmikan oleh pemerintah (Dahri & Irma, 2016). Menurut penuturan dari Laing Along dalam suatu wawancara, keberadaan lamin di awal tidak langsung menjadi objek wisata. Namun, sudah menjadi aktivitas berkesenian yakni tari dan musik khas masyarakat Dayak Kenyah. Barulah pada tahun 1995 pemerintah menetapkan aktivi-

tas berkesenian setiap hari Minggu di Lamin Adat Pemung Tawai Pampang menjadi objek wisata. Hal inilah yang menandai babak baru terhadap fungsi keberadaan lamin tersebut.



SIEBU, A LONG-GLAY NOBLE, AND HIS WIFE, THE SISTER OF THE RAJA BEGAR, LONG, PAMANGKAS

Orang Dayak di Depan rumah panjang (*lamin*) zaman dulu



TAMALAE, A LATELY FORMED PENYAMBONG KAMPONG

Bentuk Rumah Panjang (*lamin*) pada zaman dulu, tampak samping

Sejak awal, keberadaan lamin di Pampang tidaklah seperti fungsi lamin di daerah asal mereka sebelumnya yakni sebagai tempat tinggal.



Khususnya bagi bangsawan orang Dayak pada umumnya. Sejak didirikan sampai diresmikan oleh pemerintah, lamin di Pampang memang tidak digunakan untuk tempat tinggal, namun sebagai pusat kebudayaan, termasuk berkesenian orang Dayak Kenyah yang ada di Pampang itu sendiri. Setidaknya, itu terjadi sejak tahun 1991 sampai tahun 1995. Barulah tahun 1995, fungsi lamin adat berubah menjadi tempat berkesenian sekaligus objek wisata. Kegiatan berkesenian tetap dilakukan, dan sebagai objek wisata, orang luar diajak untuk menyaksikan pertunjukan yang diadakan setiap hari Minggu tersebut. Sebagai objek wisata dari tahun 1995 hingga saat ini, lamin yang secara historis dulunya menjadi tempat tinggal, sekarang menjadi tempat berkesenian yang menjadi objek wisata serta ramai dikunjungi oleh orang luar Dayak Kenyah itu sendiri. Artinya, sebagai objek wisata ada faktor ekonomi yang berperan di dalam keberadaan lamin di Pampang saat ini.



Anak anak perempuan para penari di Pampang  
(Dok. Pribadi)



Lamin tampak dari halaman depan  
(Dok. Pribadi)

Perubahan fungsi lamin juga turut mempengaruhi penataan ruang dan peruntukannya (Pergitawati dkk, 2014). Tempat melakukan aktivitas kesenian saat ini adalah ruang yang diberi nama *pagen* (teras) pada sejarah rumah lamin di daerah asal masyarakat Dayak. Dulunya, fungsi *pagen* tersebut sebagai tempat berkumpul, bukan untuk kegiatan menari dan bermusik seperti yang kita bisa saksikan sekarang. Adapun tempat menari dan bermusik, biasanya dilakukan di halaman rumah panjang orang Dayak (Lumholtz, 1920).



Tarian Dayak yang dipentaskan di halaman (dulu)  
(Carl Lumholtz, 1920)





Tarian Dayak di Teras Lamin Pampang (Kini)  
(Dok. Pribadi)

Mengenai perubahan dan pergeseran akibat migrasi dan modernisasi tersebut, Marten Abet selaku ketua adat menyatakan bahwa:

*Generasi sekarang hanya melihat tarian sebagai ritual. Tradisi menggunakan anting hingga kuping memanjang dan tato sudah mulai ditinggalkan. Dilihat dari sisi hunian, dahulu seluruh masyarakat tinggal di dalam sebuah lamin (rumah adat Suku Dayak), sedangkan saat ini masyarakat membangun rumah masing-masing.*

Dari kutipan di atas, terlihat bagaimana pengaruh yang ditimbulkan akibat migrasi dan modernisasi yang terjadi. Terdapat perubahan pola perilaku dan pemaknaan budaya oleh generasi sekarang, terutama bagaimana peran dan fungsi lamin itu sendiri. Pilihan untuk membangun rumah masing masing dan menfungsikan lamin hanya sebagai tempat menari dan bermain musik semata, apalagi untuk tujuan wisata ternyata

juga menjadi kecemasan tokoh adat masyarakat Dayak Kenyah itu sendiri yang ada di Desa Budaya Pampang.

Pada suatu kunjungan di Minggu pertama September 2017, penulis sempat menyaksikan fungsi lain dari lamin di Pampang yang dijadikan sebagai tempat menjual sayur dan ikan kering air tawar oleh masyarakat setempat. Selain aktivitas penjualan karcis, jasa berfoto dengan para penari dan orang Dayak bertelinga panjang juga digemari para wisatawan (lihat gambar di bawah). Dengan demikian, fungsi ekonomi dari lamin juga sudah menjadi perihal yang lazim sekarang ini.



Penjual Sayur di sela - sela pertunjukan di Lamin Adat Pampang (Dok.pribadi)



Suasana pembelian karcis untuk berfoto dengan penari (Dok. Pribadi)



Sementara itu, Ririn Prasetya Pergitawati dkk (2014), selaku peneliti arsitektur yang meneliti perubahan pola ruang pada lamin yang ada di Desa Budaya Pampang ini menuliskan bahwa:

*Dengan tuntutan permasalahan yang terjadi, seiring dengan perubahan dan pergeseran nilai lokal, demi mempertahankan budaya tersebut dengan campur tangan pemerintah untuk dapat membangun kembali nilai lokal tersebut dengan mengalih fungsikan lamin adat dari rumah tinggal menjadi rumah pentas budaya.*

Dari pernyataan tersebut, selaku ilmuwan, Pergitawati mengakui bagaimana peran pemerintah dalam upaya pelestarian nilai lokal bagi masyarakat adat Dayak Kenyah yang ada di Pampang. Hal ini tentunya bertalian dengan fungsi pelestarian budaya yang diperankan oleh pemerintah yang berintegrasi dengan masyarakat di Pampang itu sendiri. Pada mula lamin ini berdiri bisa jadi demikian, namun seiring berjalannya waktu, fungsi ekonomi semakin dominan, mengingat tempat ini dijadikan tempat dan aktivitas berkesenian sebagai objek wisata.

## PEMBAHASAN

Tidak dapat dipungkiri, peran pemerintah menjadi faktor determinan dari keberadaan Lamin Pemung

Tawai di Desa Budaya Pampang. Dari situlah pergeseran dari lamin pada kebudayaan awal masyarakat Dayak Kenyah sebagai tempat tinggal menjadi tempat berkesenian. Sampai akhirnya setelah dijadikan obyek wisata, lamin berubah fungsi menjadi tempat pementasan untuk pertunjukan seni tradisi Dayak Kenyah di Pampang. Terutama untuk pertunjukan tari yang diiringi oleh musik *sape*.

Dengan pergeseran dari tempat tinggal bersama ke tempat berkesenian, lalu menjadi objek wisata pertunjukan kesenian, maka saat ini lamin di Desa Budaya Pampang bisa dikatakan telah mengalami pergeseran fungsi. Dari dulunya sebagai tempat tinggal, lalu untuk berekspresi seni, sekarang menjadi tempat yang bisa menghasilkan uang atau dalam hal ini menjadi sebuah aktivitas ekonomi, setidaknya setiap hari Minggu. Di masa pementasan pun, lamin kadang juga digunakan untuk menjual sayuran dan ikan oleh masyarakat Dayak Kenyah setempat.

Dalam pandangan C.A. Van Peursen dalam karyanya Strategi Kebudayaan, tindakan pemerintah bersama masyarakat Dayak Kenyah di Desa Budaya Pampang bisa dikategorikan sebagai strategi budaya pada fase kebudayaan fungsional. Terutama sekali yang berkaitan dengan fungsi pelestarian nilai dan produk



budaya yang telah turun temurun di masyarakat Dayak Kenyah. Fase fungsional merupakan fase setelah fase mistis dan fase ontologis dimana pada fase fungsional ini, manusia dan kebudayaannya berelasi dalam sebuah motif kepentingan fungsional. Dalam artian, manusia menggunakan dan menerima dunianya (kebudayaan) jika memiliki arti penting, dan juga manfaat bagi dirinya.

Akan tetapi, van Peursen juga mengingatkan bahwa manusia harus menghindari apa yang dinamakannya “operasionalisme” pada fase fungsional. Fungsi pelestarian budaya, khususnya kesenian, pada lamin harus dicegah menjadi operasionalisme semata, terutama ketika menjadi objek wisata yang telah bersentuhan dengan fungsi lain, yakni fungsi ekonomi. Operasionalisme ekonomi terlihat pada gejala pemungutan karcis berfoto terhadap penari dan orang tua bertelinga panjang, termasuk beberapa toko souvenir yang ada di dekat halaman parkir yang terletak di depan lamin. Meski ini juga dapat dilihat sebagai pergeseran fungsi, namun upaya negosiasi kebudayaan juga nampak disini. Setidaknya menghadapi modernisasi dan globalisasi informasi dan kebutuhan ekonomi itu sendiri.

Dengan demikian, Lamin Pemung Tawai yang terdapat di Desa Budaya Pampang, Samarinda ini

mengalami konsekuensi pergeseran fase kebudayaan ke arah fungsional sebagaimana pandangan Van Peursen dalam teorinya mengenai fase kebudayaan di atas. Gejala operasionalisme fungsi lamin juga kelihatan dari bergesernya fungsi pelestarian budaya berupa seni pertunjukan tari dan musik menjadi fungsi ekonomi akibat status sebagai desa budaya dan objek wisata. Dari perubahan status oleh pemerintah tersebut, Lamin Adat Pemung Tawai berikut aktivitas kesenian masyarakat Dayak Kenyah di dalamnya pada setiap hari Minggu kini menjadi objek yang ‘dipandang’ dan ‘dipajang’ oleh pihak di luar dirinya. “Dipandang” memiliki arti, orang di luar Pampang berdatangan untuk menyaksikan pementasan tari dan musik disana sebagai sebuah wujud budaya. Sedangkan ‘dipajang’ memiliki arti, lamin dan aktivitas berkesenian pada setiap hari Minggu tersebut menjadi bahan promosi pemerintah dan pelaku wisata untuk menggaet para wisatawan agar berkunjung ke Pampang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Lamin Pemung Tawai yang ada di Desa Budaya Pampang, Samarinda telah mengalami perubahan atau pergeseran fungsi dari lamin yang dulunya rumah tempat tinggal komunal masyarakat Dayak menjadi tempat



wisata seni pertunjukan tari dan musik. Migrasi dan modernisasi merupakan faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Lamin adat (rumah panjang) di Apokayan bisa jadi seperti lamin masyarakat Dayak secara umum, yakni berfungsi sebagai tempat tinggal bersama oleh puluhan atau bahkan ratusan kepala keluarga. Namun, sejak masyarakat Dayak Kenyah bermigrasi ke Pampang, Samarinda, lalu berjumpa dengan kehidupan modern yang cenderung individualis, masyarakat Dayak Kenyah di Pampang inipun mengalami perubahan orientasi dalam berkebudayaan, khususnya dalam menata tempat tinggal, cara hidup dan juga dalam berkesenian. Termasuk perubahan dalam bentuk lamin dan peruntukan ruang-ruang di Lamin Pemung Tawai sekalipun.

Sejak didirikan, Lamin Pemung Tawai memang tidak diperuntukkan sebagai tempat tinggal, namun diperuntukkan oleh pemerintah untuk kegiatan berkesenian pada tahun 1991 sampai 1995. Selama empat tahun tersebut, aktivitas di Lamin Pemung Tawai berupa aktivitas berkesenian, namun belum disaksikan oleh pihak luar komunitas masyarakat Dayak Kenyah di Pampang itu sendiri. Barulah pada tahun 1995, aktivitas kesenian di Lamin Pemung Tawai ditetapkan oleh pemerintah sebagai objek wisata hingga saat ini.

Aktivitas berkesenian ini, terutama sejak menjadi objek wisata menjadikan pola dan fungsi ruang berubah. Salah satunya adalah teras (*pagen*) yang dulunya berfungsi primer, yakni sebagai ruangan yang dianggap penting dan digunakan para pemimpin keluarga dalam memutuskan sebuah keputusan dalam kepemimpinan Suku Dayak Kenyah, menjadi tempat pertunjukan dan tempat para penonton (wisatawan) menyaksikan pertunjukan seni tari dan musik sampai sekarang ini di Desa Budaya Pampang.

Lamin sebagai sebuah wujud budaya dalam bentuk rumah adat sepatutnya mendapatkan upaya pelestarian. Terutama di kalangan masyarakat Dayak Kenyah yang ada di Desa Budaya Pampang, Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur sepatutnya pula menjaga dan melestarikan produk budaya seperti lamin yang merupakan kekayaan budaya ini. Tidak hanya sebagai objek wisata, namun sebagai wadah pembudayaan dan pendidikan nilai budaya.



## Daftar Pustaka

- Dahlan, Dahri, Hanum, Irma Surayya. 2016. "Perubahan Bentuk dan Fungsi Lamin Di Desa Budaya Pampang". Laporan Penelitian. Samarinda: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman.
- Koentjaraningrat. 1996. Pengantar Antropologi I. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 2007. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Lumholtz, Carl. 1920. Through Central Borneo Volume I, An Account of Two Years Travel in the Land of The Head – Hunters Between the Years 1913-1917. New York: Charles Scribner's Son.
- Maunati, Yekti. 2004. Identitas Dayak, Komodifikasi dan Politik Kebudayaan. Yogyakarta: LKIS.
- Pergitawati, Ririn Prasetya, Antariksa, Ridjal, Abraham Muhammad. 2014. "Perubahan Pola Ruang Dalam Rumah Lamin Adat Dayak Kenyah Akibat Pengaruh Modernisasi Di Desa Pampang, Samarinda" dalam *Arsitektur e-Journal*, Volume 7 No.2.
- Putra, Ami Suswandi. 2013. "Pola Kemitraan Pariwisata Dalam Manajemen Atraksi Desa Wisata Pampang Kota Samarinda" dalam *Jurnal Nasional Pariwisata*. Vol. 5.
- Tirtosudarmo, Riwanto. 1997. "Economic Development, Migration, and Ethnic Conflict in Indonesia: A Preliminary Observation" dalam *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol.12.
- Tirtosudarmo, Riwanto. 2007. Mencari Indonesia. Jakarta: YOI & LIPI Press.
- Van Peursen, C.A. 1988. Strategi Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius.



## PEDOMAN PENULISAN BULETIN KUNDUNGGA

### I. ISI DAN KRITERIA UMUM

Naskah makalah/karya tulis ilmiah untuk publikasi Buletin Kundungga dapat berupa artikel hasil penelitian, ulasan balik (*review*) dan ulasan/tinjauan (*feature*) tentang Cagar Budaya baik sains maupun terapan terutama yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur. Naskah yang diajukan belum pernah dipublikasikan atau tidak sedang diajukan pada wadah publikasi lain.

Penulisan Judul dan Naskah, sebagai berikut :

1. Judul diketik dengan huruf kapital di tengah atas halaman dan dicetak tebal (*bold*) huruf arial 14. Sub judul ditulis dalam huruf arial 12.
2. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Inggris sesuai kaidah masing-masing bahasa yang digunakan.
3. Naskah harus selalu dilengkapi dengan abstraksi (dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris).
4. Kata-kata bahasa asing yang tidak dapat dialih bahasakan/disadur dicantumkan dalam bentuk asli dan ditulis dengan huruf miring (*Italic*).

### II. FORMAT UMUM

Seluruh bagian dari naskah termasuk abstraksi, judul, tabel, gambar, catatan kaki, keterangan gambar dan daftar acuan diketik satu spasi dan dicetak dalam format A4 menggunakan huruf Arial berukuran 11 (sebelas). Setiap lembar tulisan dalam naskah diberi nomor halaman dengan jumlah maksimum 15 halaman termasuk tabel dan gambar. Susunan naskah dibuat sebagai berikut:

#### 1. Judul (*Title*)

Pada halaman judul makalah/karya tulis dicantumkan nama setiap penulis dengan jumlah penulis maksimum 5 (lima) orang, nama dan alamat Instansi bagi masing-masing penulis; disarankan dibuat catatan kaki yang berisi nomor telepon, faksimili serta e-mail.

#### 2. Abstraksi (*Abstract*)

Berisi ringkasan pokok bahasan lengkap dari keseluruhan isi naskah tanpa harus memberikan keterangan terlalu rinci dari setiap bab, dengan jumlah maksimum 250 kata.

#### 3. Pendahuluan (*Introduction*)

Bab ini dapat berisi latar belakang, maksud dan tujuan penyelidikan/penelitian,



permasalahan, metodologi, lokasi dan daerah sasaran serta materi yang diselidiki/diteliti dengan bab dan subbab tidak perlu menggunakan nomor. Bab berisi pernyataan yang mencukupi sehingga pembaca dapat memahami dan mengevaluasi hasil penyelidikan/penelitian yang berkaitan dengan topik makalah/karya tulis.

#### 4. Hasil dan Analisis (*Results and Analysis*)

Berisi hasil-hasil penyelidikan/penelitian yang disajikan dengan tulisan, tabel, grafik, gambar maupun foto; diberi nomor secara berurutan. Hindari penggunaan grafik secara berlebihan apabila dapat disajikan dengan tulisan secara singkat. Pencantuman foto atau gambar tidak berlebihan dan hanya mewakili hasil penemuan. Semua tabel, grafik gambar dan foto yang disajikan harus diacu dalam tulisan dengan keterangan yang jelas dan dapat dibaca. *Font* huruf/angka untuk keterangan tabel, gambar dan foto berukuran minimum 6 (enam).

#### 5. Pembahasan atau Diskusi (*Discussion*)

Berisi tentang interpretasi terhadap hasil penyelidikan/penelitian dan pembahasan yang terkait dengan hasil-hasil yang pernah dilaporkan.

#### 6. Kesimpulan dan Saran (*Conclusions and Recommendation*)

Berisi kesimpulan dan saran dari isi yang dikandung dalam makalah/karya tulis.

#### 7. Acuan (*References*)

Acuan ditulis dengan menggunakan sistem nama tahun (Harvard), nama penulis/ pengarang yang tercantum didahului oleh nama akhir (*surename*), disusun menurut abjad dan judul makalah/karya tulis ditulis dengan huruf miring (*Italic*).

Beberapa contoh penulisan sumber acuan :

##### **Jurnal**

Harvey, R.D. dan Dillon, J.W. 1985. Maceral distribution in Illinois coals and their paleoenvironmental implication. *International Journal of Coal Geology*, 5, h.141-165.

##### **Buku**

Petters, W.C. 1987. *Exploration and Mining Geology*. John Willey & Sons, New York, 685 h.

##### **Prosiding**

Suwarna, N. dan Suminto. 1999. Sedimentology and Hydrocarbon Potential of the Permian Mengkarang Formation, Southern Sumatera. *Proceedings Southeast Asian Coal Geology*, Bandung.

##### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

DAM, M.A.C. 1994. The Late Quarternary evolution of The Bandung Basin,



West Java, Indonesia.

Ph.D Thesis at Dept. of Quarternary Geology Faculty of Earth Science Vrije Univer-  
sitet Amsterdam, h.1-12.

### **Informasi dari Internet**

Cantrell, C. 2006. Sri Lanka's tsunami drive blossom: Local man's effort keeps on giving.

[Http://www.boston.com/news/local/articles/2006/01/26/sri\\_lankas\\_tsunami\\_Drive\\_blossoms/](http://www.boston.com/news/local/articles/2006/01/26/sri_lankas_tsunami_Drive_blossoms/)[26 Jan 2006].

### **III. WEWENANG REDAKSI**

Redaksi berwenang penuh melakukan penyuntingan atas naskah yang akan dipublikasikan tanpa merubah dan mengurangi isi naskah. Redaksi mempunyai hak dan wewenang penuh untuk menolak naskah dengan isi dan format yang tidak sesuai dengan pedoman penulisan Buletin Kundungga dan tidak berkewajiban untuk mengembalikan naskah tersebut.

### **IV. PENGIRIMAN NASKAH**

Penulis dimohon untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar naskah asli berupa *hard copy* atau *soft copy* kepada :

Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur  
Wilayah Kerja Kalimantan

Jl. H.A.M. Rifaddin No. 69 RT 24  
Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir  
Samarinda, Kalimantan Timur (75131)  
pos-el : [bpcb\\_samarinda@yahoo.com](mailto:bpcb_samarinda@yahoo.com)

